



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BERTAHAN DAN BERKEMBANG MENGHADAPI PANDEMI

LAPORAN TAHUNAN
2021

PENJELASAN SAMPUL

Pandemi Covid-19 baik di tingkat global maupun nasional berangsur-angsur pulih, terutama seiring dengan masifnya vaksinasi. Kebijakan pembatas sosial terhadap kegiatan masyarakat melonggar. Aktivitas masyarakat pun bergerak kembali, sehingga ikut mendorong pergerakan ekonomi.

Kendati demikian, pandemi belum seutuhnya selesai. Masyarakat tetap “Bertahan dan Berkembang di Tengah Pandemi” bersama aktivitasnya. Begitu juga dengan kegiatan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah, termasuk program pembangunan.

Seiring dengan perkembangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang: mengawal pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Tahunan BPK Tahun 2021

Diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Jalan Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210

Telp: (021) 255 49000

Faks: (021) 570 5376

www.bpk.go.id

LAPORAN TAHUNAN BPK TAHUN 2021

Tim Penyusunan Laporan Tahunan BPK Tahun 2021

Ketua: Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE; **Wakil Ketua:** Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA;

Anggota: Dr. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA.; Dr. Pius Lustrilanang, S.I.P., M.Si., CFrA., CSFA.; Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA.; Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.; Nyoman Adhi Suryadhyana S.E., M.E; Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA; Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.

Penyedia Konten:

Sekretariat Jenderal, Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, Inspektur Utama, Kepala Badan Diklat dan PKN, Tortama KN I, Tortama KN II, Tortama KN III, Tortama KN IV, Tortama KN V, Tortama KN VI, Tortama KN VII, Tortama Investigasi, Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko, Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat.

Editor:

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI

Penulis:

Tim Penyusunan Laporan Tahunan BPK Tahun 2021

Penata Letak:

Tim Penyusunan Laporan Tahunan BPK Tahun 2021

Perancang Sampul:

Tim Penyusunan Laporan Tahunan BPK Tahun 2021

Foto Sampul:

Tim Penyusunan Laporan Tahunan BPK Tahun 2021

Diterbitkan Oleh

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Jalan Gatot Subroto Kav. 31

Jakarta Pusat 10210

Tel. (6221) 25549000, Faks. (6221) 57950288

Website: <http://www.bpk.go.id>

E-mail: eppid@bpk.go.id

Cetakan Pertama: Januari 2022

@Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Ketentuan Pidana

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SEKAPUR SIRIH

Musibah pandemi Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia di awal tahun 2020, hingga tahun 2021 masih menyisakan dampaknya. Suasana ketidakpastian, yang dikenal dengan istilah VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) begitu terasa, seiring dengan terjadinya disrupti di bidang teknologi dan inovasi.

Banyak ahli telah membuat studi dan prediksi tentang akhir. Namun belum ada kepastian yang dapat menjamin bagaimana pandemi akan berkembang serta dampaknya bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.

Menghadapi kondisi yang tidak pasti akibat pandemi Covid-19 tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama pemerintah telah merespons melalui beragam kebijakan, sesuai dengan perannya masing-masing. BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, telah melaksanakan perannya dalam hal *oversight, insight* dan *foresight*.

Peran *oversight* dilakukan melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sementara peran *insight* diimplementasikan dengan mendalami kebijakan publik untuk memberikan pendapat, misalnya dalam hal kebijakan atau program-program pemerintah.

Menyempurnakan kematangan perannya sebagai *Supreme Audit Institution*, tahun ini BPK menerbitkan *strategic foresight* untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Peran ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh BPK.

Foresight memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam situasi ketidakpastian yang tinggi melalui identifikasi tren, peluang, dan tantangan di berbagai bidang,

eksplorasi berbagai perkembangan untuk menyusun strategi masa depan, serta identifikasi dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil.

Peranan *foresight* tersebut direalisasikan melalui pendapat (*Strategic Foresight*) dengan judul "Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh", yang dipublikasikan pada 21 Oktober 2021.

BPK juga meluncurkan website *Strategic Foresight* BPK sebagai sarana komunikasi, publikasi dan pemantauan perkembangannya. Dalam website tersebut, BPK menggambarkan kemungkinan kondisi masa depan yang akan dihadapi oleh Indonesia selama dan pasca pandemi Covid-19 ke dalam 4 skenario BPK membagi pendapat *foresight* kemungkinan masa depan Indonesia setelah adanya pandemi Covid-19 ke dalam 4 (empat) skenario. Masing-masing skenario menjelaskan kondisi yang kemungkinan akan terjadi pada 4 sektor utama yaitu sektor kesehatan, perekonomian, keuangan, dan sosial serta di sektor pendukung lainnya. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam laporan tahunan ini.

Dengan disusunnya *foresight* tersebut, BPK menjadi *Supreme Audit Institution (SAI)* pertama di Asia Tenggara yang memiliki kemampuan *foresight*. Sementara di tingkat Asia, menjadi yang kedua setelah Korea Selatan di ke-11 di dunia.

Melalui 3 (tiga) peran penting itulah: *oversight, insight* dan *foresight*, BPK dengan pemerintah bahu-membahu "Bersama Melewati Pandemi Covid-19".

Pada saat bersamaan, mandat yang dijalankan BPK secara reguler, seperti pemeriksaan keuangan, tetap berjalan. Bahkan hasil pemeriksaan menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya, begitu juga dibandingkan dengan target seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020-2024 terkait dengan pemeriksaan.

Untuk Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan LK BUN misalnya, perolehan opini "Wajar Tanpa pengecualian (WTP)" secara persentase meningkat 1 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 97% menjadi 98%.

Begitu juga dengan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di tingkat pemerintahan, baik provinsi, kabupaten maupun kota, yang mampu menembus target RPJMN 2020-20224. Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 97% pemerintah provinsi, 88% pemerintah kabupaten, dan 95% pemerintah kota.

Capaian opini tersebut telah melampaui target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar: 91%, 77%, dan 91% di tahun 2020.

Pencapaian ini menjadi bukti bahwa BPK senantiasa menjalankan fungsi, peran serta tanggung jawabnya secara profesional dan bertanggung jawab, walaupun di tengah kondisi pandemi Covid-19. Komitmen ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan, demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Kelahiran CorpU merupakan transformasi dari Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK.

Kehadiran CorpU ini merupakan implementasi amanat dari Rencana Strategis (Renstra) BPK periode 2020-2024. Prinsip utama keberadaan BPK CorpU adalah harmonisasi antara pembelajaran dengan kinerja pencapaian visi, misi, nilai-nilai dasar, tujuan, dan sasaran strategis BPK. Oleh karena itu, peran pembelajaran dalam *anticipating change, accelerating change, career development, and filling competency gap* menjadi sangat strategis.

Dengan semakin meningkatnya kemampuan SDM di lingkungan BPK, maka upaya untuk terus bersama-sama pemerintah membangun Indonesia akan terwujud. Tentu saja dengan tetap mempertahankan prinsip bebas dan mandiri, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam salah satu klausulnya, yaitu Pasal 23E.

Jakarta, xxx 2022

Ketua BPK RI

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE



BPK menjadi Supreme Audit Institution (SAI) pertama di Asia Tenggara yang memiliki kemampuan foresight. Sementara di tingkat Asia, menjadi yang kedua setelah Korea Selatan dan ke-11 di dunia.



Capaian BPK 2021

Penyampaian Pendapat

BPK telah menyampaikan sejumlah pendapat, yang merupakan peran *insight* BPK, di antaranya terkait Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Laporannya telah disampaikan kepada Presiden pada 18 Januari 2021. (Lihat halaman 85)



Dua Pimpinan BPK Jadi Auditor di PBB

Ketua BPK Dr. Agung Firman Sampurna terpilih sebagai Wakil Ketua *United Nation (UN) Panel of External Auditors* untuk tahun 2022. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang dalam sejarah, dengan BPK atau SAI memegang 2 (dua) jabatan strategis PBB di bidang audit. Selain Ketua BPK, Wakil Ketua BPK Dr. Agus Joko Pramono menjadi *Vice Chairman United Nations Independent Audit Advisory Committee (UN-IACC)*. (Lihat halaman 71)

Foresight: Pertama Kali dalam Sejarah

Pada tahun 2021 merupakan kali pertama BPK meluncurkan *foresight*, pandangan tentang kondisi masa depan untuk dijadikan pertimbangan oleh pemerintah. Tema utama dari pendapat strategis tersebut: "Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh". (Lihat halaman 125)

Pemeriksaan Penanganan Pandemi Covid-19

Untuk mendukung akuntabilitas pelaksanaan relokasi anggaran akibat pandemi Covid-19, BPK melakukan pemeriksaan tematik yang menghasilkan 11 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan 130 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Hasilnya: 241 objek pemeriksaan, 2.170 temuan, 2.843 masalah senilai Rp2,94 triliun. (Lihat halaman 47)

Lahirnya Corporate University

Pada 8 April 2021, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara (Badiklat PKN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertransformasi menjadi Corporate University yang secara resmi disingkat sebagai BPK CorpU. Kehadiran BPK CorpU ini merupakan implementasi amanat dari Rencana Strategis (Renstra) BPK RI 2020-2024. (Lihat halaman 94)

Zona Integritas

BPK merupakan salah satu lembaga yang berhasil mendapatkan predikat WBK pada delapan satuan kerja, di antaranya lima BPK Perwakilan dan tiga satuan kerja BPK Pusat. Sementara itu, satu BPK Perwakilan mendapatkan predikat WBBM. (Lihat halaman 56)

Melampaui target RPJMN

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di tingkat pemerintahan mampu melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pelampaui target RPJMN itu juga diraih oleh hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Bahkan untuk LKKL, perolehan Wajar Tanpa pengecualian (WTP) secara persentase meningkat 1 (satu) poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 97% menjadi 98%. (Lihat halaman 33)



Penghitungan Kerugian Negara ASABRI

BPK menyampaikan ke Kejaksaan Agung bahwa nilai kerugian negara yang timbul sebagai akibat adanya penyimpangan (atau perbuatan melawan hukum) dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri selama tahun 2012-2019 adalah sebesar Rp22,78 triliun. (Lihat halaman 151)

Pemeriksaan atas PHLN

BPK memeriksa 30 Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri (LKPJLN) Tahun 2020. Hasil pemeriksaan BPK atas 30 LKPJLN Tahun 2020 seluruhnya mengungkapkan opini WTP. (Lihat halaman 41)

Memorandum of Understanding

Selama tahun 2021, BPK telah menandatangani kerja sama dan nota kesepakatan terkait pemeriksaan dan non pemeriksaan dengan 6 lembaga non pemerintah dan 3 lembaga pemerintah. (Lihat halaman 130)

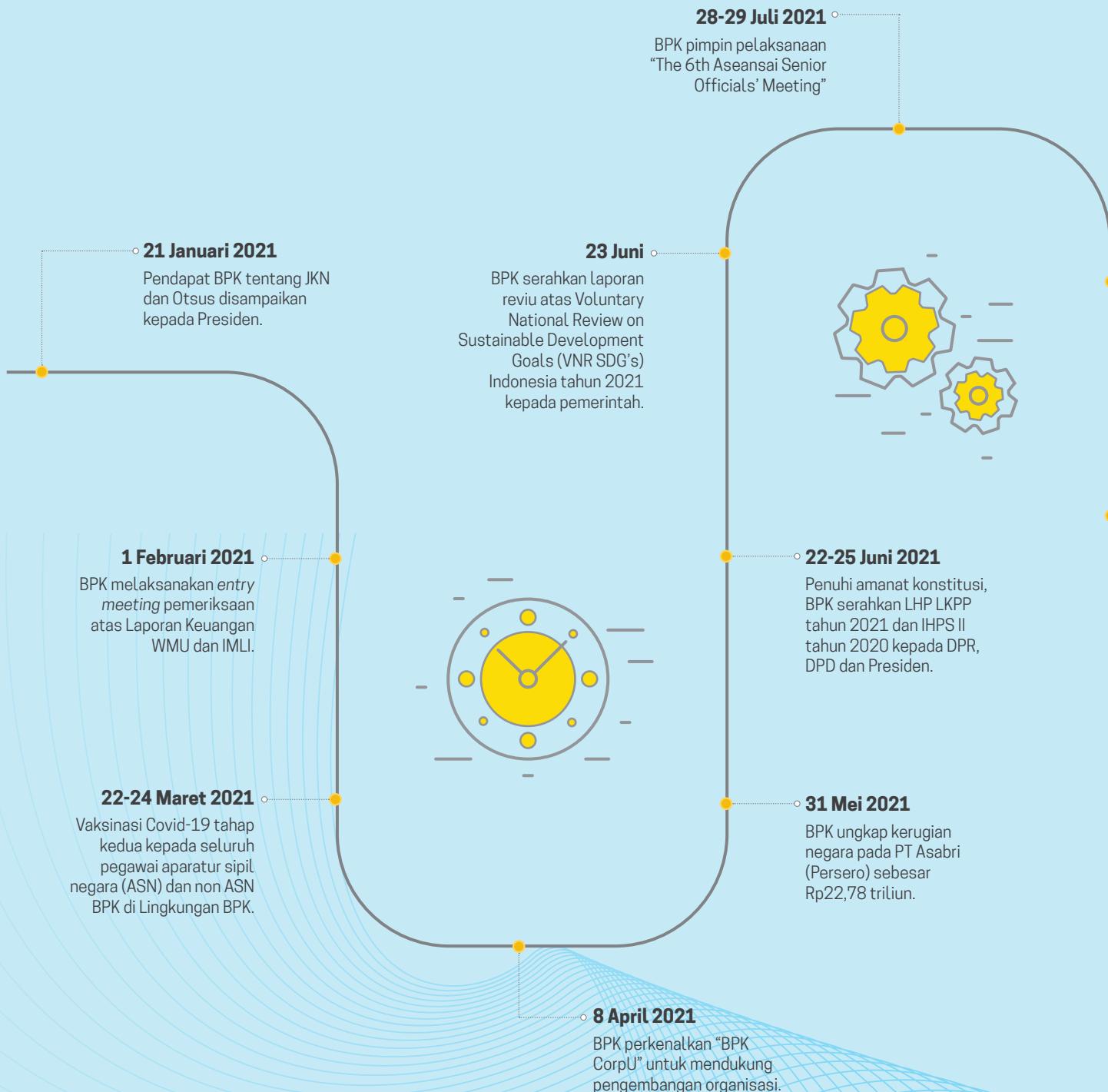
Integrity and Corruption

Ketua BPK Agung Firman Sampurna secara khusus diundang untuk bergabung dalam proyek the Chandler Sessions on Integrity and Corruption, Blavatnik School of Government, the University of Oxford bersama 14 orang pimpinan lembaga/organisasi di dunia lainnya. (Lihat halaman 75)

Inisiatif Pembentukan SAI20

Untuk mendukung peran Pemerintah Republik Indonesia yang memegang Presidensi G20 pada 1 Desember 2021 sampai Oktober 2022, BPK berinisiatif untuk membentuk SAI20, engagement baru dibawah G20. (Lihat halaman 72)

IKHTISAR PERISTIWA PENTING



26 Oktober 2021
BPK pimpin pelaksanaan “Aseansai Development Partner Coordination Meeting”.

◦ **2 Agustus 2021**
BPK dipercaya menjadi Subject Matter Expert dalam Executive Development Program SAO Thailand.

◦ **12 Agustus 2021**
BPK selenggarakan “Virtual Workshop on Performance Auditing on Modern Fisheries: Knowledge Sharing for Aseansai”.

◦ **16 Agustus 2021**
Presiden apresiasi kinerja BPK terkait pemeriksaan di tengah pandemi Covid-19.

18 November 2021
Tingkatan peran dalam pemberantasan korupsi, BPK resmikan pembentukan “Investigative Audit Task Force (IATF)”.

◦ **15 Oktober 2021**
Penyerahan buku “Strategic Foresight BPK: Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19” kepada Presiden RI di Istana Negara.

◦ **8 September 2021**
BPK presentasikan strategi dan kontribusi terhadap pencapaian SDG’s dalam Simposium Asosiasi ke Delapan.

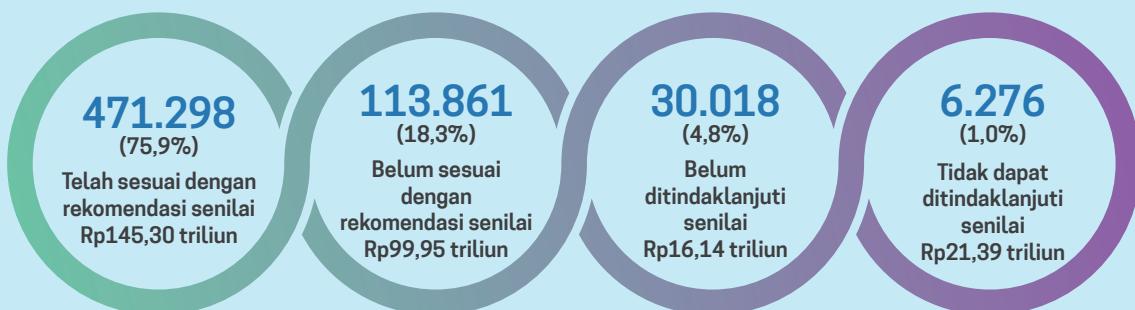
7 Desember, 16 Desember, dan 29 Desember 2021
Penyerahan IHPS I 2021 kepada DPR, DPD, dan Presiden.

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN



621.453

Total Rekomendasi
senilai Rp282,78 triliun



Periode 2005-Semester I-2021

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH DENGAN STATUS TELAH DITETAPKAN MENURUT PENGELOLA ANGGARAN PERIODE 2005-30 JUNI 2021

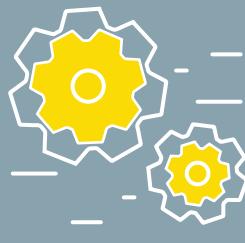


Sumber: IHPS I-2021

PENCAPAIAN

INFORMATIF

Penghargaan dengan klasifikasi “**Informatif**” sebagai Badan Publik kategori Lembaga Negara dan Lembaga Non Kementerian yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 yang diselenggarakan pada 26 Oktober 2021.



DEMI

31 PERTEMUAN INTERNASIONAL

Sepanjang tahun 2021, BPK mengikuti 31 pertemuan internasional yang secara umum, berkenaan dengan 2 (dua) hal: pemeriksaan dan koordinasi dengan lembaga internasional.



VISUALISASI TERBAIK

Penghargaan tersebut diberikan untuk laporan “The Audit on Management and Pollution Control of Citarum Watershed” atau hasil pemeriksaan atas DAS Citarum yang diterbitkan pada tahun 2019. Penghargaan diberikan oleh INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA) pada Januari 2021.

PIONIR BAGI BPK ACEH

BPK Perwakilan Provinsi Aceh memperoleh penghargaan sebagai “**Pionir Virtual Account Rekening Pengeluaran**” dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh pada 4 Maret 2021.

PENCAPAIAN



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih	v
Capaian BPK 2021	vii
Ikhtisar Peristiwa Penting	viii
Bab 1: Profil BPK Identitas dan Jejak Langkah	2
Bab 2: Kinerja BPK	30
Bab 3: Semangat untuk Negeri	100
Bab 4: Tantangan	154

BAB 1

PROFIL BPK IDENTITAS DAN JEJAK LANGKAH

- Visi dan Misi BPK
- Nilai Dasar
- Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang
- Pimpinan BPK RI
- Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan RI
- SDM BPK
- Sebaran Kantor BPK RI
- Ikhtisar Keuangan BPK Tahun 2021



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



8.526
Jumlah SDM



75 Tahun
Usia Lembaga



9
Pimpinan

Akses Informasi

Website : www.bpk.go.id
wartapemeriksa.bpk.go.id
jdih.bpk.go.id
jurnal.bpk.go.id
badiklatpkn.bpk.go.id

Email : eppid@bpk.go.id
 [@bpkriofficial](https://twitter.com/bpkriofficial)
 [@humasbpkri.official](https://facebook.com/humasbpkri.official)
 [BPK RI Official](https://youtube.com/BPK RI Official)
 08111907010

- Alamat Surat:
PO BOX 4330 Jakarta 10043
- Alamat Kantor Pusat:
Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kav. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp: 021-255 49000
Faks: 021-5795 0288

■ Nama Institusi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

■ Awal Pendirian

1 Januari 1947

■ Dasar Hukum BPK

- Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

■ 3 (tiga) Jenis Pemeriksaan BPK

- Pemeriksaan Keuangan, yaitu pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Badan Lainnya maupun lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan.
- Pemeriksaan Kinerja, yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas (3E) atas pengelolaan kegiatan/proyek/program. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.
- Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, yaitu pemeriksaan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja, yang dapat berupa pemeriksaan kepatuhan maupun investigatif. Pemeriksaan kepatuhan ini menekankan pada penilaian atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pemeriksaan ini untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Sedangkan pemeriksaan Investigatif merupakan pemeriksaan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana (UU 15 tahun 2006 pasal 13).

VISI DAN MISI BPK

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024



Visi

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”

Visi ini merupakan penegasan untuk optimalisasi mandat yang diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tersebut mengamanatkan agar BPK untuk menjalankan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.



Misi

Demi mewujudkan visi sebagai tujuan atau cita-cita masa depan, BPK telah menetapkan misi 2020-2024, yaitu:

- a. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- b. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara;
- c. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

“BPK merupakan lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 pasal 23 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. **”**

NILAI DASAR

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Nilai-nilai Dasar BPK terdiri dari:



INDEPENDENSI

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Bersikap bebas, baik dari sisi mental maupun penampilan dari gangguan pribadi, eksternal, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.



INTEGRITAS

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan.



PROFESIONALISME

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG

Dasar hukum terkait dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

WEWENANG

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPK RI memiliki 10 wewenang:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. Membina jabatan fungsional Pemeriksa;
9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah



PIMPINAN BPK RI

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI memiliki 9 (sembilan) anggota yang dipilih DPR. Anggota BPK RI memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pada bulan Oktober 2021, Anggota BPK Bahrullah Akbar memasuki masa purna bakti setelah 10 tahun bertugas di BPK. Selama itu, Bahrullah Akbar sempat menjadi Anggota VII, Anggota VI, Wakil Ketua, dan terakhir menjadi Anggota V /Pimpinan Keuangan Negara V BPK sampai dengan masa jabatannya berakhir. Untuk menggantikan Bahrullah Akbar, Ketua DPR RI melalui surat Nomor PW/12801/DPR RI/IX/2021 tanggal 21 September 2021 mengajukan Anggota BPK terpilih Nyoman Adhi Suryadnyana yang mendapat persetujuan DPR dengan ditetapkan melalui Keputusan Nomor 5/DPR RI/I/2021-2022 tanggal 21 September 2021. Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai Anggota terpilih Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) periode jabatan 2021-2026 mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 3 November 2021 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pengambilan sumpah jabatan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Setelah pengucapan sumpah atau janji sebagai Anggota BPK, maka Nyoman Adhi Suryadnyana resmi bertugas sebagai Anggota BPK bersama Agung Firman Sampurna, Agus Joko Pramono, Hendra Susanto, Pius Lustrilanang, Achsanul Qosasi, Isma Yatun, Harry Azhar Azis, dan Daniel Lumban Tobing.

Pada tanggal 18 Desember 2021, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Harry Azhar Azis tutup usia. Pemakaman dilakukan dengan upacara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta pada 19 Desember 2021. Harry Azhar Azis terakhir menjabat sebagai Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V. Karier dan pengabdian almarhum di BPK diawali periode 2014- 2019. Pada periode ini, almarhum menjabat Ketua BPK pada Oktober 2014 hingga April 2017. Selanjutnya, almarhum terpilih kembali sebagai Anggota BPK untuk periode 2019- 2024.



Achsanul Qosasi

Anggota

Pius Lustrilanang

Anggota

Harry Azhar Azis

Anggota

Isma Yatun

Anggota



Agung Firman
Sampurna

Ketua

Agus Joko
Pramono

Wakil Ketua

Hendra Susanto

Anggota

Nyoman Adhi
Suryadnyana

Anggota

Daniel Lumban
Tobing

Anggota



Dr. Achsanul Qosasi,
CSFA., CFrA.

Anggota

Dr. Pius Lustrilanang,
S.I.P., M.Si., CFrA., CSFA.

Anggota

Prof. Harry Azhar Azis,
M.A., Ph.D., CSFA., CFrA

Anggota

Dr. Isma Yatun,
CSFA., CFrA.

Anggota

Dr. Agung Firm
CSFA., CFrA

Ket



g Firman Sampurna,
A., CFrA., CGCAE.

Dr. Agus Joko Pramono,
M.Acc., Ak., CA, CSFA., CPA., CFrA

Dr. Hendra Susanto,
ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA.

Ir. Daniel Lumban Tobing,
CSFA., CFrA.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar,
M.B.A., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE.

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

Anggota

Anggota Periode 2011-2021



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE
Ketua BPK RI

Bidang Tugas

- Tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK;
- Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama Wakil Ketua;
- Hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri;
- Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif; dan
- Pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.



Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA
Wakil Ketua BPK RI

Bidang Tugas

- Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua;
- Proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan;
- Pengarahan pemeriksaan investigatif; dan
- Pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.



Dr. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA

Anggota I BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, luar negeri, perhubungan, Polri, HAM, Pemilu.



Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA

Anggota II BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional, Bank Indonesia, perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.



Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA

Anggota III BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, riset dan teknologi.



Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA

Anggota IV BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lingkungan hidup, pengelola sumber daya alam dan infrastruktur.



Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA

Anggota V BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang agama, dan urusan dalam negeri, pengusahaan kawasan.
- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah Wilayah Barat (Sumatera dan Jawa).



Nyoman Adhi Suryadnyana S.E., M.E

Anggota VI BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang kesehatan dan pendidikan.
- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah wilayah Timur (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua).



Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA

Anggota VII BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi Badan Usaha Milik Negara dan lembaga Lain yang dibentuk dan terkait dengan BUMN.



Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA., CFrA

Periode 2011-2021

- Anggota V BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Oktober 2019 s.d Oktober 2021
- Wakil Ketua BPK RI, April 2017 s.d. Oktober 2019
- Anggota VI BPK RI, Oktober 2016 s.d. April 2017
- Anggota VI BPK RI, Oktober 2014 s.d. September 2016
- Anggota VII BPK RI, November 2011 s.d Oktober 2014



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

KETUA, WAKIL KETUA, DAN 7 ANGGOTA

5 STAF AHLI

**DITAMA
REVBANG PKN**

**INSPEKTORAT
UTAMA**

**AUDITORAT
UTAMA
KEUANGAN
NEGARA I**

**AUDITORAT
UTAMA
KEUANGAN
NEGARA II**

**AUDITORAT
UTAMA
KEUANGAN
NEGARA III**

**AUDITORAT
UTAMA
KEUANGAN
NEGARA IV**

**AUDITORAT
UTAMA
KEUANGAN
NEGARA V**

JAWA DAN SUMATERA

**16
PERWAKILAN BPK
DI WILAYAH BARAT**

Catatan:

BPK memiliki kelompok jabatan fungsional di setiap struktur eselon II. Rincian jabatan fungsional tersebut dan peta jabatannya diatur lebih lanjut di Peraturan Sekretaris Jenderal BPK No. 80 dan 81 Tahun 2019.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIAT
JENDERAL**

**BADIKLAT
PKN**

**DITAMA
BINBANGKUM
PKN**

**AUDITORAT
UTAMA
KEUANGAN
NEGARA VI**

**AUDITORAT
UTAMA
KEUANGAN
NEGARA VII**

**AUDITORAT
UTAMA
INVESTIGASI**

**18
PERWAKILAN BPK
DI WILAYAH TIMUR**

**BALI,
NUSA TENGGARA,
KALIMANTAN,
SULAWESI,
MALUKU,
DAN PAPUA**

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dipimpin sembilan anggota dengan kepemimpinan bersifat kolektif kolegial. Pimpinan BPK RI terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh

anggota. Masing-masing anggota BPK RI mempunyai tugas, yang telah diatur secara terperinci. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, pimpinan BPK RI dibantu Pelaksana BPK RI, yang masing-masing dipimpin pejabat eselon I.



WAKIL KETUA BPK RI

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua;
- Melaksanakan proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan;
- Melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua;
- Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

ANGGOTA IV/PIMPINAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA IV BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN IV

ANGGOTA V/PIMPINAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN V

ANGGOTA VI/PIMPINAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN VI

ANGGOTA VII/PIMPINAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VII BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN VII

STAF AHLI

- Bidang Keuangan Pemerintah Pusat
- Bidang Keuangan Pemerintah Daerah
- Bidang Manajemen Risiko
- Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/ Daerah yang Dipisahkan Lainnya
- Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan PKN

- Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan
- Penelitian dan Pengembangan

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum PKN

- Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah
- Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN III, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN IV, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VII

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN VII, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Auditorat Utama Investigasi

Pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli.

BPK Perwakilan

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten, BUMD dan lembaga terkait pada lingkup tugas AKN V dan AKN V.

DATA PEGAWAI BERDASARKAN GENDER

3.261
wanita (38,25%)



5.265
pria (61,75%)

Grand Total
8.526

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

D3

Pria 192 (49,48%)	Wanita 196 (50,52%)
Grand Total 388	

S1/D4

Pria 2.398 (54,07%)	Wanita 2.037 (45,93%)
Grand Total 4.435	

S2

Pria 1.305 (61,59%)	Wanita 814 (38,41%)
Grand Total 2.119	

S3

Pria 29 (76,32%)	Wanita 9 (23,68%)
Grand Total 38	

Lainnya

Pria 1.341 (86,74%)	Wanita 205 (13,26%)
Grand Total 1.546	

Grand Total

Pria 5.265 (61,75%)	Wanita 3.261 (38,25%)
Grand Total 8.526	

DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN

Jabatan Fungsional Tertentu		Jabatan Pelaksana		Jabatan Struktural	
Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
2.562 (58,36%)	1.828 (41,64%)	779 (48,33%)	833 (51,67%)	472 (75,76%)	151 (24,24%)
Grand Total		Grand Total		Grand Total	
4.390		1.612		623	
Tenaga Ahli		Lainnya		Grand Total	
Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
27 (81,82%)	6 (18,18%)	1.425 (76,28%)	443 (23,72%)	5.265 (61,75%)	3.261 (38,25%)
Grand Total		Grand Total		Grand Total	
33		1.868		8.526	
Pegawai Tugas Belajar, CPNS, Honorer					

DATA JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

Pemeriksa Ahli Madya/ Madya		Pemeriksa Ahli Muda/ Muda		Pemeriksa Ahli Pertama/ Pertama	
Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
260 (58,69%)	183 (41,31%)	1.103 (60,74%)	713 (39,26%)	1.007 (59,13%)	696 (40,87%)
Grand Total		Grand Total		Grand Total	
443		1.816		1.703	
Pemeriksa Ahli Utama/ Utama		Grand Total			
Pria	Wanita	Pria	Wanita		
12 (92,31%)	1 (7,69%)	2.382 (59,92%)	1.593 (40,08%)		
Grand Total		Grand Total			
13		3.975			

DATA JUMLAH PEGAWAI PERWAKILAN

Kantor Perwakilan	Pria	% Pria	Wanita	% Wanita	Grand Total
BPK Perwakilan Provinsi Aceh	110	60,44%	72	39,56%	182
BPK Perwakilan Provinsi Bali	76	58,02%	55	41,98%	131
BPK Perwakilan Provinsi Banten	57	57,58%	42	42,42%	99
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	66	64,08%	37	35,92%	103
BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	64	61,54%	40	38,46%	104
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	123	62,12%	75	37,88%	198
BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	51	65,38%	27	34,62%	78
BPK Perwakilan Provinsi Jambi	66	57,39%	49	42,61%	115
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	146	66,06%	75	33,94%	221
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	169	64,50%	93	35,50%	262
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	172	62,09%	105	37,91%	277
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	84	63,16%	49	36,84%	133
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	77	56,62%	59	43,38%	136
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	81	59,56%	55	40,44%	136
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	79	66,39%	40	33,61%	119
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	55	65,48%	29	34,52%	84
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	52	60,47%	34	39,53%	86

Kantor Perwakilan	Pria	% Pria	Wanita	% Wanita	Grand Total
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	57	66,28%	29	33,72%	86
BPK Perwakilan Provinsi Lampung	88	58,67%	62	41,33%	150
BPK Perwakilan Provinsi Maluku	82	75,93%	26	24,07%	108
BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	60	60,61%	39	39,39%	99
BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	74	58,27%	53	41,73%	127
BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	117	61,26%	74	38,74%	191
BPK Perwakilan Provinsi Papua	145	69,38%	64	30,62%	209
BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	82	70,69%	34	29,31%	116
BPK Perwakilan Provinsi Riau	87	59,18%	60	40,82%	147
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	67	65,69%	35	34,31%	102
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	90	48,65%	95	51,35%	185
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	82	70,09%	35	29,91%	117
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	102	67,11%	50	32,89%	152
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	76	53,15%	67	46,85%	143
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	96	61,15%	61	38,85%	157
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	109	61,58%	68	38,42%	177
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	128	60,95%	82	39,05%	210
Grand Total	3070	62,15%	1870	37,85%	4940

SEBARAN KANTOR BPK RI

BPK RI memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di Ibukota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi

di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Denpasar. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

• **Kantor Perwakilan**
Kantor BPK RI Kalimantan Utara
Jl. Mulawarman No.98, Kota Tarakan 77111
Jumlah pegawai: 84

• **Kantor Perwakilan**
Kantor BPK RI Kalimantan Timur
Jl. Moh. Yamin No. 4, Kota Samarinda 75111
Jumlah pegawai: 119

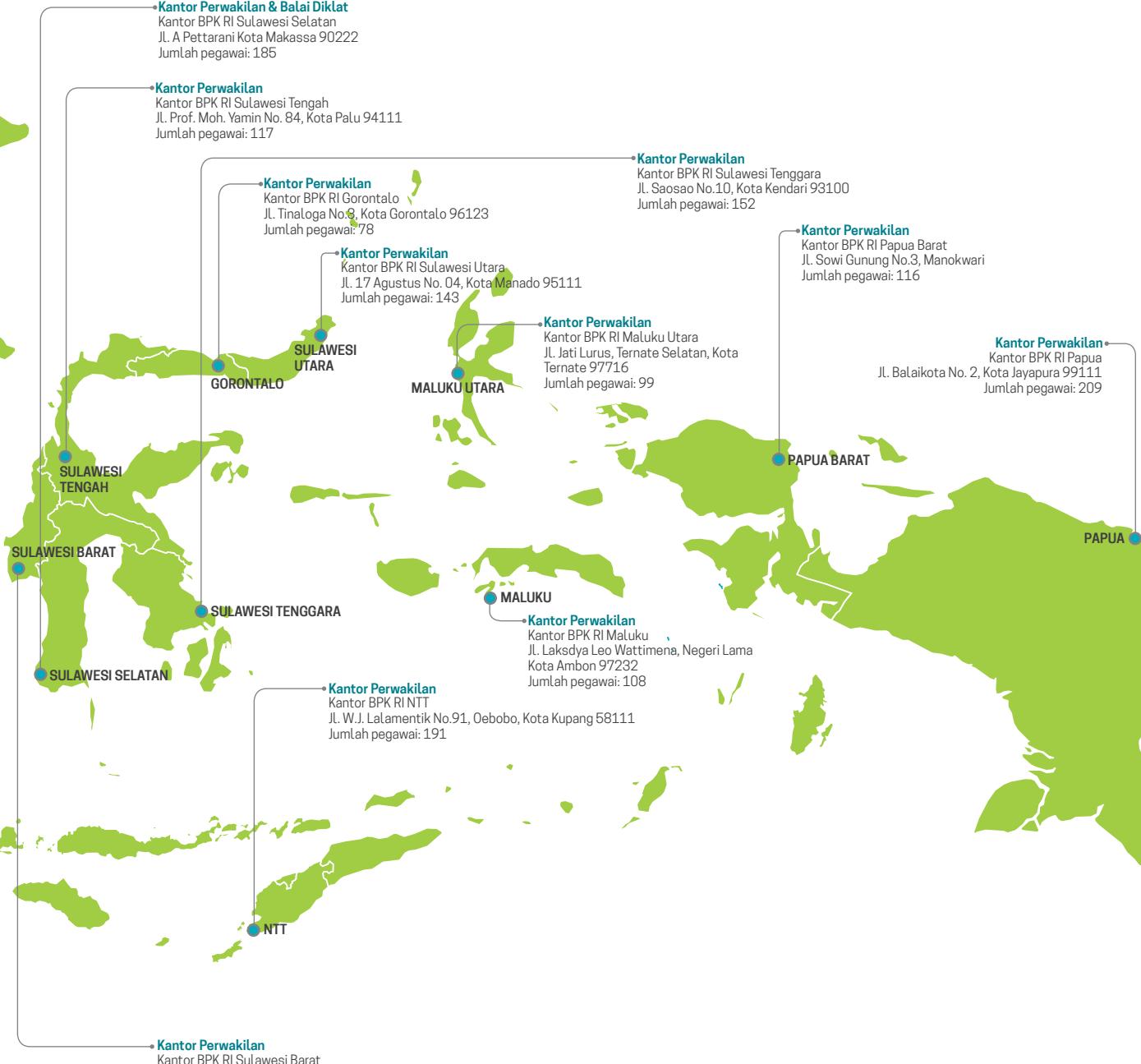
• **Kantor Perwakilan & Balai Diklat**
Kantor BPK RI Sulawesi Selatan
Jl. A Petarani Kota Makassar 90222
Jumlah pegawai: 185

• **Kantor Perwakilan**
Kantor BPK RI Sulawesi Tengah
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 84, Kota Palu 94111
Jumlah pegawai: 117

• **Kantor Perwakilan**
Kantor BPK RI Sulawesi Tenggara
Jl. Saosao No.10, Kota Kendari 93100
Jumlah pegawai: 152

• **Kantor Perwakilan**
Kantor BPK RI Papua Barat
Jl. Sowi Gunung No.3, Manokwari
Jumlah pegawai: 116

• **Kantor Perwakilan**
Kantor BPK RI Papua
Jl. Balaikota No. 2, Kota Jayapura 99111
Jumlah pegawai: 209



• **Kantor Perwakilan**
Kantor BPK RI Sulawesi Barat
Jl. H. Abdul Malik Pattana Endang, Rangas, Kab. Mamuju 91512
Jumlah pegawai: 157

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
DAN 2020 (DALAM RUPIAH)**

NO	URAIAN	2021	
		ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	9,243,300,000	29,180,653,415
	PENERIMAAN HIBAH	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	9,243,300,000	29,180,653,415
B	BELANJA		
	BELANJA PEGAWAI	2,102,475,877,000	2,092,217,889,692
	BELANJA BARANG	1,437,112,117,000	1,404,354,916,271
	BELANJA MODAL	171,648,051,000	171,142,044,074
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0
C	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	3,711,236,045,000	3,667,714,850,037
C	PEMBIAYAAN		

		2020			
REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
5	6	7	8	9	10
	0				0
0	0	0	0	0	0
19,937,353,415	316	8,995,794,000	25,364,103,898	16,368,309,898	282
0	0	0	0	0	0
19,937,353,415	316	8,995,794,000	25,364,103,898	16,368,309,898	282
	0				0
(10,257,987,308)	100	2,021,936,812,000	1,961,586,733,636	(60,350,078,364)	97
(32,757,200,729)	98	1,300,598,499,000	1,213,615,416,985	(86,983,082,015)	93
(506,006,926)	100	276,908,460,000	263,882,512,463	(13,025,947,537)	95
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
(43,521,194,963)	99	3,599,443,771,000	3,439,084,663,084	(160,359,107,916)	96
	0				0

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2021 DAN 2020 (DALAM RUPIAH)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2021	2020	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,546,135,900	1,362,172,130	183,963,770	13.51
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	1,731,278,514	169,600,126	1,561,678,388	920.80
Piutang Bukan Pajak	768,115,743	5,598,331,720	(4,830,215,977)	(86.28)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(80,351,106)	(104,502,185)	24,151,079	(23.11)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	687,764,637	5,493,829,535	(4,806,064,898)	(87.48)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	72,930,700	99,976,996	(27,046,296)	(27.05)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(364,654)	(13,887,801)	13,523,147	(97.37)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	72,566,046	86,089,195	(13,523,149)	(15.71)
Persediaan	15,242,558,731	16,181,445,206	(938,886,475)	(5.80)
JUMLAH ASET LANCAR	19,280,303,828	23,293,136,192	(4,012,832,364)	(17.23)
ASET TETAP				
Tanah	5,954,117,599,963	5,920,800,077,963	33,317,522,000	0.56
Peralatan dan Mesin	2,228,345,474,211	2,159,391,106,309	68,954,367,902	3.19
Gedung dan Bangunan	2,586,456,185,466	2,544,150,887,350	42,305,298,116	1.66
Jalan, Irigasi dan Jaringan	396,232,320,663	394,002,898,853	2,229,421,810	0.57
Aset Tetap Lainnya	17,878,342,009	19,964,084,075	(2,085,742,066)	(10.45)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	8,560,897,430	148,295,000	8,412,602,430	5,672.88
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,477,655,359,426)	(2,300,441,430,959)	(177,213,928,467)	7.70
JUMLAH ASET TETAP	8,713,935,460,316	8,738,015,918,591	(24,080,458,275)	(0.28)

PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	3,052,875,377	3,070,515,603	(17,640,226)	(0.57)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(2,656,503,072)	(2,626,452,252)	(30,050,820)	1.14
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	396,372,305	444,063,351	(47,691,046)	(10.74)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	396,372,305	444,063,351	(47,691,046)	(10.74)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	197,781,459,838	181,618,568,202	16,162,891,636	8.90
Aset Lain-Lain	13,571,193,478	8,561,600,761	5,009,592,717	58.51
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(151,257,204,074)	(131,361,355,608)	(19,895,848,466)	15.15
JUMLAH ASET LAINNYA	60,095,449,242	58,818,813,355	1,276,635,887	2.17
JUMLAH ASET	8,793,707,585,691	8,820,571,931,489	(26,864,345,798)	(0.30)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	5,718,851,571	6,357,134,523	(638,282,952)	(10.04)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	3,187,000	3,187,000	0	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	2,172,778,102	2,307,177,053	(134,398,951)	(5.83)
Utang Jangka Pendek Lainnya	88,594,500	0	88,594,500	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7,983,411,173	8,667,498,576	(684,087,403)	(7.89)
JUMLAH KEWAJIBAN	7,983,411,173	8,667,498,576	(684,087,403)	(7.89)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	8,785,724,174,518	8,811,904,432,913	(26,180,258,395)	(0.30)
JUMLAH EKUITAS	8,785,724,174,518	8,811,904,432,913	(26,180,258,395)	(0.30)
JUMLAH EKUITAS	8,785,724,174,518	8,811,904,432,913	(26,180,258,395)	(0.30)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8,793,707,585,691	8,820,571,931,489	(26,864,345,798)	(0.30)

BAB 2

KINERJA BPK

- Hasil Pemeriksaan Semesteran
- Ringkasan Hasil Pemeriksaan Semesteran Pengelola Anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan Badan Lainnya
- Pemeriksaan Laporan Keuangan: Melampaui Target RPJMN
- Beragam Jenis Opini BPK
- Pemeriksaan LKKL
- Pemeriksaan LKPD 2020
- Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya
- Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri
- Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
- Pemeriksaan Kinerja
- Pemeriksaan Penanganan Pandemi Covid-19
- Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Oleh Entitas
- Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
- Beragam Penghargaan Tahun 2021
- Peran Strategis BPK di Dunia Internasional
- Performance Highlight 2021
- Penyampaian Pendapat BPK
- Corporate University Merespons Perkembangan Pengetahuan
- Laporan Keberlanjutan

HASIL PEMERIKSAAN SEMESTERAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester I dan II setiap tahun buku. IHPS merupakan dokumen ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.

IHPS tersebut menjadi bahan dasar penyusunan laporan tahunan BPK. Laporan Tahun 2021 memuat hal-hal dan data yang dianggap penting dan signifikan, yang tersaji dalam IHPS-II 2020 dan IHPS-I 2021. Informasi lebih lengkap mengenai IHPS dapat diakses melalui *link* <https://www.bpk.go.id/ihps>



<https://www.bpk.go.id/ihps>

“

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/ BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

“ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN SEMESTERAN PENGELOLA ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, BUMN DAN BADAN LAINNYA



1.050
Laporan Hasil
Pemeriksaan

11.383
Temuan

30.965
Rekomendasi

PENGELOLA ANGGARAN: PEMERINTAH PUSAT

Jenis Pemeriksaan	LHP	Temuan	Rekomendasi
Pemeriksaan Keuangan	155	1.248	3.302
Pemeriksaan Kinerja	58	572	1.394
Pemeriksaan DTT	35	325	809
Total	248	2.145	5.505

PENGELOLA ANGGARAN: PEMERINTAH DAERAH

Jenis Pemeriksaan	LHP	Temuan	Rekomendasi
Pemeriksaan Keuangan	542	6.822	18.966
Pemeriksaan Kinerja	119	1.225	3.145
Pemeriksaan DTT	98	722	2.154
Total	759	8.769	24.265

PENGELOLA ANGGARAN: BUMN DAN BADAN LAIN

Jenis Pemeriksaan	LHP	Temuan	Rekomendasi
Pemeriksaan Keuangan	4	31	81
Pemeriksaan Kinerja	5	78	209
Pemeriksaan DTT	34	360	905
Total	43	469	1.195

Sumber: IHPS II-2020 dan IHPS I-2021

Keterangan:

DTT: Dengan Tujuan Tertentu

LHP: Laporan Hasil Pemeriksaan

PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN: MELAMPAUI TARGET RPJMN

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti tertuang dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2021 memperlihatkan hasil yang sangat baik. Untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di tingkat pemerintahan mampu melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pelampaui target RPJMN itu juga diraih oleh hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Bahkan untuk LKKL, perolehan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara persentase meningkat 1 (satu) poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 97% menjadi 98%.

BERAGAM JENIS OPINI BPK

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*

Laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *Qualified Opinion*

Laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Opini Tidak Wajar atau *Adversed Opinion*

Laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

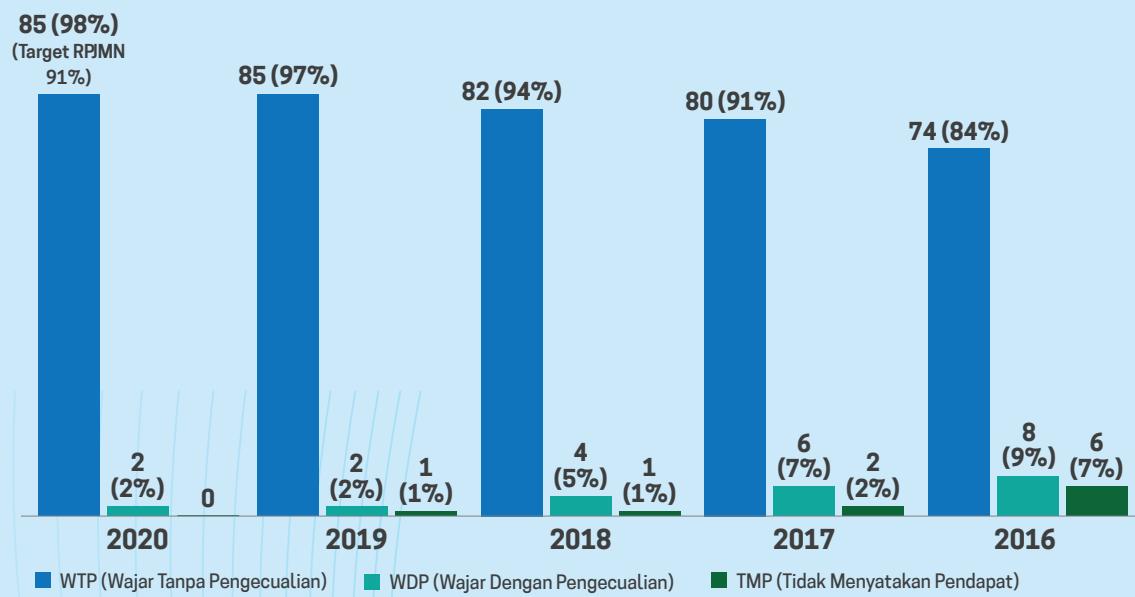
Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Sumber: UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

PEMERIKSAAN LKKL DAN LK BUN

Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan hasil yang terus membaik. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan pada pemerintah pusat memuat 85 LKKL dan 1 (satu) Laporan Keuangan Bendahara umum negara (LKBUN).

HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (LKKL) (2016-2020)



Sumber: IHPS I-2021

NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI



97
LHP

(termasuk 11 LHP
dukungan LKBUN)



1.037
Temuan



2.820
Rekomendasi



2.002

Permasalahan

984 (49%)

KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

371 (38%)

Kelemahan sistem
pengendalian akuntansi
dan pelaporan

381 (39%)

Kelemahan sistem
pengendalian
pelaksanaan anggaran
pendapatan dan
belanja

232 (23 %)

Kelemahan struktur
pengendalian intern

1.018 (51%)

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan nilai Rp2,59 triliun

413 (41%)

Penyimpangan
administrasi

Keterangan:

Pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti
rekomendasi BPK dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas
negara sebesar Rp576,27 miliar.

Sumber: IHPS I-2021

605 (59%)

Ketidakpatuhan yang
dapat mengakibatkan:

· 397 (65%)

Kerugian: Rp707,18 miliar

· 46 (8%)

Potensi kerugian: Rp257,35 miliar

· 162 (27%)

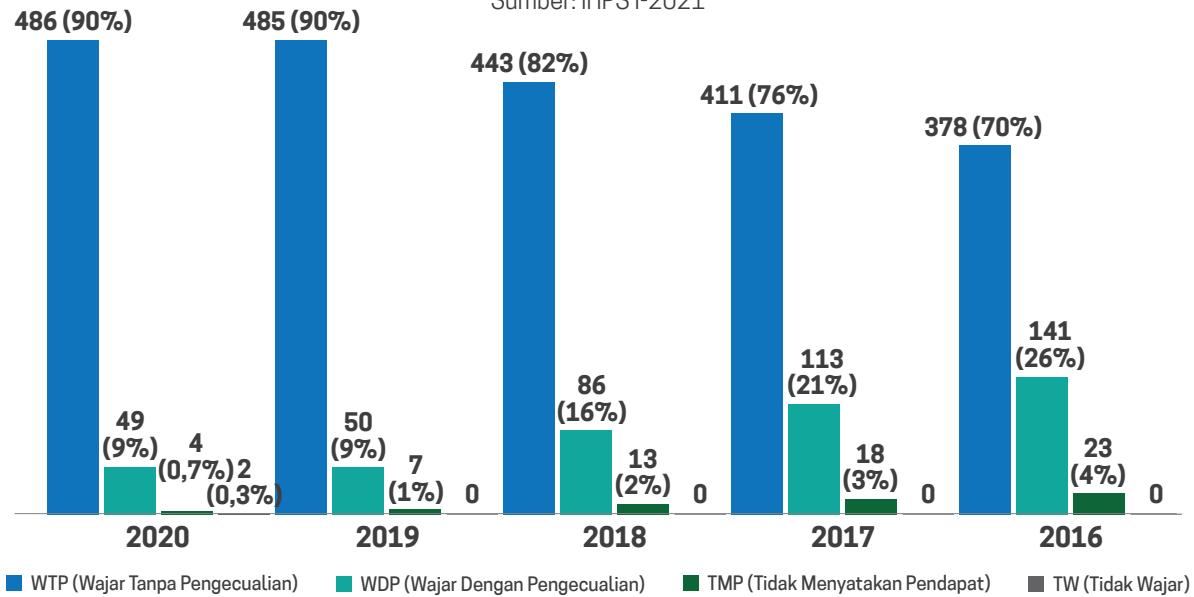
Kekurangan penerimaan: Rp1,63 triliun

PEMERIKSAAN LKPD 2020

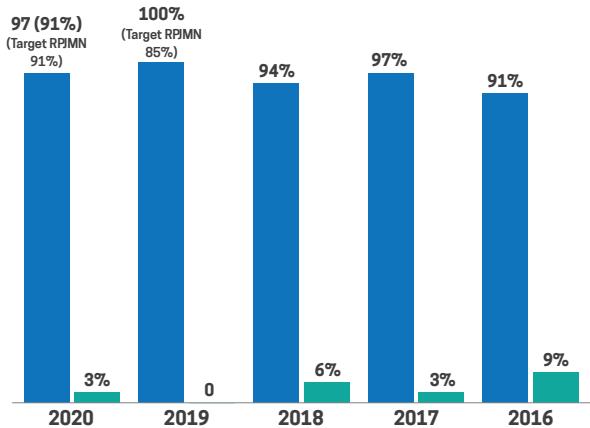
BPK melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dalam 5 (lima) tahun terakhir terus membaik. Pada tahun 2020, jumlah pemerintahan yang mendapatkan opini hasil audit: "Wajar Tanpa Pengecualian" mencapai 90%.

PERKEMBANGAN HASIL PEMERIKSAAN LKPD (2016-2020)

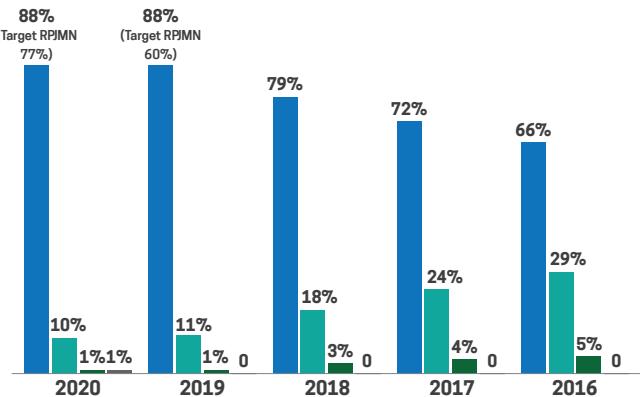
Sumber: IHPS I-2021



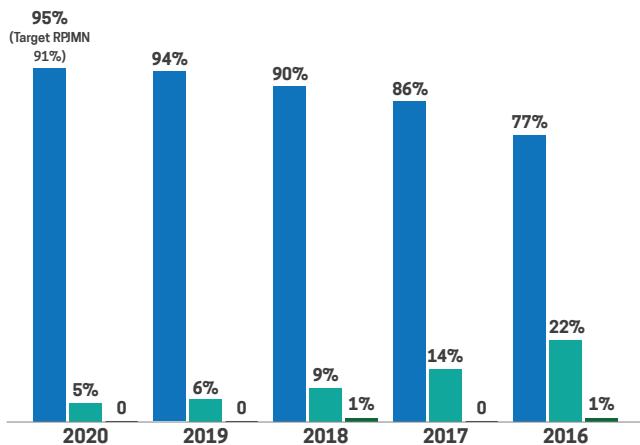
OPINI HASIL PEMERIKSAAN LKPD MENURUT PEMERINTAHAN (2015-2020) PROVINSI



KABUPATEN



KOTA



■ WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ■ WDP (Wajar Dengan Pengecualian) ■ TMP (Tidak Menyatakan Pendapat) ■ TW (Tidak Wajar)

Sumber: IHPS I-2021

NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintah daerah.



541
LHP



6.809
Temuan



18.922
Rekomendasi



11.662
Permasalahan

5.367 (46%)
KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.699 (32%)

Kelemahan sistem
pengendalian akuntansi
dan pelaporan

2.498 (46%)

Kelemahan sistem
pengendalian
pelaksanaan anggaran
pendapatan dan
belanja

1.170 (22%)

Kelemahan struktur
pengendalian intern

6.295 (54%)

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan nilai Rp2,07 triliun

2.247 (36%)

Penyimpangan
administrasi

4.048 (64%)

Ketidakpatuhan yang
dapat mengakibatkan:

• 2.645 (65%)

Kerugian: Rp1,19 triliun

• 549 (14%)

Potensi kerugian: Rp260,36 miliar

• 854 (21%)

Kekurangan penerimaan: Rp623,87 miliar

Keterangan:

Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset. Pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah sebesar Rp310,42 miliar.

Sumber: IHPS I-2021

PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Tahunan (LKT) Bank Indonesia, Laporan Keuangan (LK) Otoritas Jasa Keuangan, LK Lembaga Penjamin Simpanan, LK Badan Pengelola Keuangan Haji. Untuk tahun buku 2020, semua lembaga tersebut mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”.



4
LHP



31
Temuan



81
Rekomendasi



50 (77%) KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

25 (50%)

Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan

11 (22%)

Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

14 (28%)

Kelemahan struktur pengendalian intern

15 (23%)

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan nilai: Rp28,28 miliar

9 (60%)

Penyimpangan administrasi

6 (40%)

Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kekurangan penerimaan: **Rp28,28 miliar**

Keterangan:

Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset. Pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah sebesar Rp130,07 juta.

Sumber: IHPS I-2021

LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN & HIBAH LUAR NEGERI

Pada semester I tahun 2021, BPK memeriksa 30 Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2020. Hasil pemeriksaan BPK atas 30 LKPHLN Tahun 2020 seluruhnya mengungkapkan opini WTP. Adapun sumber pendanaan pinjaman dan hibah luar negeri tersebut, berasal dari:

11 berasal dari Asian Development Bank (ADB)

4 dari World Bank

11 dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

3 dari International Fund for Agricultural Development (IFAD)

1 dari Global Financing Facility (GFF)

Permasalahan

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beragam temuan dan permasalahan sebagai berikut:



96

Temuan



138

Permasalahan

62

Kelemahan SPI

76

Tidak Patuh Ketentuan
Perundang-undangan

Rp25,32 miliar

Nilai Ketidakpatuhan

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) PADA PEMERINTAH PUSAT



35
Objek Pemeriksaan



325
Temuan



809
Rekomendasi



584
Permasalahan

262

KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

56

Ketidakhematan,
ketidakefisienan dan
ketidakefektifan:
Rp3,29 triliun

266

Ketidakpatuhan
terhadap ketentuan
peraturan perundang-
undangan dengan nilai
Rp3,68 triliun

• 112

Penyimpangan administrasi

• 154

Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

• 95

Kerugian: **Rp129,90 miliar**

• 44

Kekurangan penerimaan: **Rp2,19 triliun**

• 15

Potensi kerugian: **Rp1,36 triliun**

Keterangan:

Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset. Pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp96,34 miliar.

Sumber: IHPS II-2020 dan IHPS I-2021

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) PADA PEMERINTAH DAERAH



98
Objek Pemeriksaan



722
Temuan



2.154
Rekomendasi



1.235
Permasalahan

496

KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

53

Ketidakhematan,
ketidakefisienan dan
ketidakefektifan:

Rp137,86 miliar

• 32

Ketidakefektifan senilai
Rp76,34 juta

• 21

ketidakhematan senilai
Rp137,78 miliar

686

Ketidakpatuhan
terhadap ketentuan
peraturan perundang-
undangan dengan nilai
Rp1,30 triliun

• 210

Penyimpangan administrasi

• 476

Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

• 265

Kerugian: **Rp452,37 miliar**

• 112

Kekurangan penerimaan: **Rp587,55 miliar**

• 99

Potensi kerugian: **Rp262,44 miliar**

Keterangan:

1. Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset. Pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas daerah sebesar Rp31,74 miliar.
2. Jumlah LHP tidak termasuk atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik.

Sumber: IHPS II-2020 dan IHPS I-2021

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) BUMN DAN BADAN LAINNYA



34
Objek Pemeriksaan



360
Temuan



905
Rekomendasi



632
Permasalahan



632
Permasalahan

359

KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

47

Ketidakhematan,
ketidakefisianan dan
ketidakefektifan senilai

Rp280,74 miliar.

· 21

Ketidakhematan senilai
Rp178,11 miliar

· 26

Ketidakefektifan senilai
Rp102,63 miliar

226

Ketidakpatuhan
terhadap ketentuan
peraturan perundang-
undangan dengan nilai
Rp8,39 triliun.

· 95

Penyimpangan administrasi

· 131

Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

· 40

Kerugian: **Rp172,76 miliar**

· 18

Potensi kerugian: **Rp501,86 miliar**

· 73

Kekurangan penerimaan: **Rp7,72 triliun**

Keterangan:

Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset. Pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/perusahaan sebesar Rp81,19 miliar.

Sumber: IHPS II-2020 dan IHPS I-2021

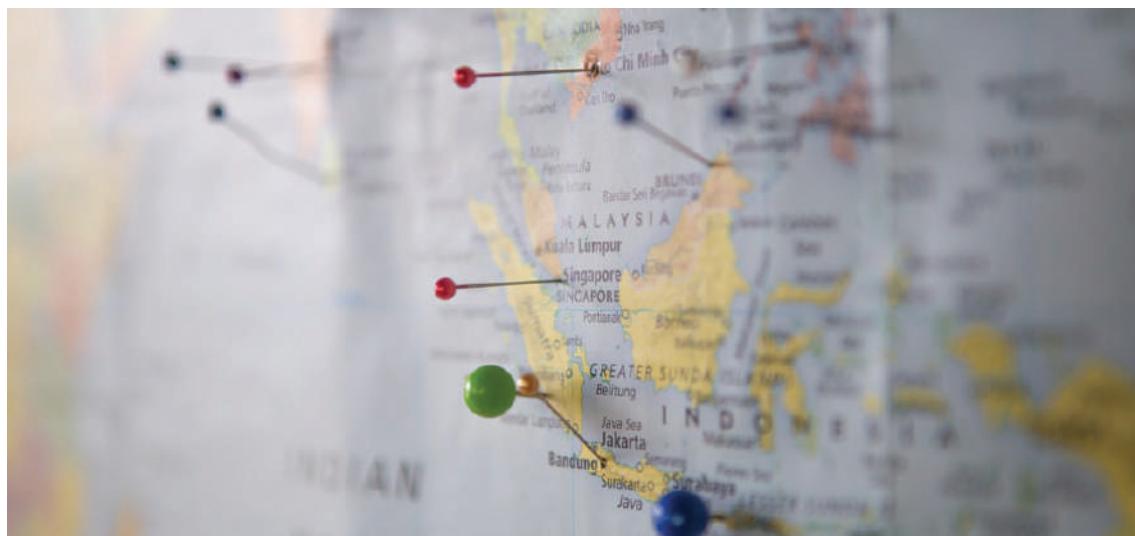
PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Sedangkan bagi pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarnya secara efektif.

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA PADA PEMERINTAH PUSAT

No.	Keterangan	Jumlah
1	Objek Pemeriksaan	58
2	Temuan	572
3	Rekomendasi	1.394
4	Permasalahan	719
	a. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	1
	b. Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	566
	- Ketidakhematan	39
	- Ketidakefisienan	12
	- Ketidakefektifan	515 senilai Rp0,23 miliar
	c. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan UU	152
	- Penyimpangan administrasi	77
	- Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:	75
	• Kerugian	58 senilai Rp1,97 triliun
	• Potensi kerugian	-
	• Kekurangan penerimaan	17 senilai Rp219,35 juta

Sumber: IHPS II-2020 dan IHPS I-2021



RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH

No.	Keterangan	Jumlah
1	Objek Pemeriksaan	119
2	Temuan	1.225
3	Rekomendasi	3.145
4	Permasalahan	1.327 senilai Rp3,13 miliar
	a. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	-
	b. Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	1.319
	- Ketidakhematan	1
	- Ketidakefisienan	-
	- Ketidakefektifan	1.318
	c. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan UU	8 senilai Rp3,13 miliar
	- Penyimpangan administrasi	-
	- Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:	-
	• Kerugian	6 senilai Rp1,20 miliar
	• Potensi kerugian	1 senilai Rp1,92 miliar
	• Kekurangan penerimaan	1 senilai Rp12,74 juta

Sumber: IHPS II-2020 dan IHPS I-2021

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA PADA BUMN DAN BADAN LAINNYA

No.	Keterangan	Jumlah
1	Objek Pemeriksaan	5
2	Temuan	78
3	Rekomendasi	209
4	Permasalahan	82
	a. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	-
	b. Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	78
	- Ketidakhematan	-
	- Ketidakefisienan	-
	- Ketidakefektifan	78
	c. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan UU	4
	- Penyimpangan administrasi	-
	- Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan	4
	• Kerugian	-
	• Potensi kerugian	1 senilai Rp176,08 juta
	• Kekurangan penerimaan	3 senilai Rp1,30 miliar

Sumber: IHPS II-2020 dan IHPS I-2021

PEMERIKSAAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Pemeriksaan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terkait dengan efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan badan lainnya.

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL



241
Objek Pemeriksaan



2.170
Temuan



5.754
Rekomendasi



2.843
Permasalahan

887 (31%) KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.241 (44%)

Ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan senilai **Rp209,80 miliar.**

• 72 (6%)

Ketidakhematan senilai **Rp122,74 miliar**

• 1 (1%)

Ketidakefisienan

• 1.168 (93%)

Ketidakefektifan senilai **Rp87,05 miliar**

715 (25%)

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan nilai **Rp2,73 triliun.**

• 378 (53%)

Penyimpangan administrasi

• 337 (47%)

Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

• 251 (74%)

Kerugian: **Rp453,77 miliar**

• 12 (4%)

Potensi kerugian: **Rp2,69 miliar**

• 74 (22%)

Kekurangan penerimaan: **Rp2,28 triliun**

Keterangan:

Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset. Pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas daerah/ negara/perusahaan sebesar Rp18,54 miliar.

Sumber: IHPS II-2020

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

“ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN (TLRHP) OLEH ENTITAS

Per 30 Juni 2021 Menurut Jumlah Rekomendasi

BPK melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Pada periode 2005-semester I 2021, BPK telah menyampaikan 621.453 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp282,78 triliun dengan rincian sebagai berikut.



621.453
Total Rekomendasi
Senilai Rp282,78 triliun

471.298 (75,9%)
Telah sesuai dengan
rekomendasi senilai
Rp145,30 triliun

113.861 (18,3%)
Belum sesuai dengan
rekomendasi senilai
Rp99,95 triliun

30.018 (4,8%)
Belum ditindaklanjuti
senilai Rp16,14 triliun

6.276 (1,0%)
Tidak dapat
ditindaklanjuti senilai
Rp21,39 triliun

Sumber: IHPS I-2021

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH 2005-31 JUNI 2021

BPK melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-30 Juni 2021 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian tersebut tidak termasuk nilai kerugian dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-30 Juni 2021 sebesar Rp4,16 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH DENGAN STATUS TELAH DITETAPKAN MENURUT PENGELOLA ANGGARAN PERIODE 2005-30 JUNI 2021

Pemerintah Pusat
Rp860,33 miliar

Pemerintah Daerah
Rp3,15 triliun

BUMN
Rp129,11 miliar

BUMD
Rp20,85 miliar

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH PERIODE 2005-30 JUNI 2021

TOTAL

Rp4,16 TRILIUN

STATUS MENURUT TINGKAT PENYELESAIAN

Angsuran 9%
Rp391,05 miliar

Pelunasan 42%
Rp1,76 triliun

Penghapusan 3%
Rp114,17 miliar

Sisa 46%
Rp1,89 triliun



PEMERINTAH PUSAT (Rp)

Angsuran 11%
94,65 miliar

Pelunasan 40%
342,48 miliar

Penghapusan 7%
63,39 miliar

Sisa 42%
359,81 miliar

Total
860,33 miliar



PEMERINTAH DAERAH (Rp)

Angsuran 9%
290,72 miliar

Pelunasan 44%
1,38 triliun

Penghapusan 1%
36,84 miliar

Sisa 46%
1,44 triliun

Total
3,15 triliun



BUMN (Rp)

Angsuran 4%
4,96 miliar

Pelunasan 22%
28,58 miliar

Penghapusan 11%
13,94 miliar

Sisa 63%
81,63 miliar

Total
129,11 miliar



BUMD (Rp)

Angsuran 3%
0,72 miliar

Pelunasan 32%
6,85 miliar

Penghapusan 0%
-

Sisa 65%
13,55 miliar

Total
20,85 miliar

Sumber: IHPS I-2021

BERAGAM PENGHARGAAN TAHUN 2021

Pada tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memperoleh beragam penghargaan, baik level nasional maupun internasional, sebagai pengakuan atas kinerja lembaga.

PENGHARGAAN KELEMBAGAAN



Penghargaan **“Visualisasi atau Infografis Terbaik”** untuk laporan “The Audit on Management and Pollution Control of Citarum Watershed” atau hasil pemeriksaan atas DAS Citarum yang diterbitkan pada tahun 2019. Penghargaan diberikan oleh INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA), sebagai puncak acara dari pertemuan WGEA Assembly ke-20 yang digelar pada 19-21 Januari 2021.



Penghargaan **“Silver Winner”** untuk majalah Warta Pemeriksa edisi Maret 2020 dari PR Indonesia untuk Kategori Lembaga Sub Kategori Media Cetak. Penghargaan disampaikan dalam The 6th Public Relations Indonesia Award 2021 yang ditayangkan melalui *live streaming* di kanal Youtube PR Indonesia Magazine pada 31 Maret 2021.



Penghargaan **“BKN Award 2020”** untuk kategori Implementasi Penilaian Kinerja Terbaik dari Badan kepegawaian Negara (BKN). Penghargaan diberikan pada 1 Juli 2021.



Penghargaan **“Terpopuler di Media Digital”** (Januari – Juni 2021) Sub Kategori Kepala Lembaga kepada Ketua BPK RI Agung Firman dari Anugerah Humas Indonesia #3 2021 yang diberikan pada 17 September 2021.



Penghargaan dengan klasifikasi **“Informatif”** sebagai Badan Publik kategori Lembaga Negara dan Lembaga Non Kementerian yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 yang diselenggarakan pada 26 Oktober 2021. Predikat ini merupakan peningkatan dari capaian tahun 2020 yaitu “Menuju Informatif” dan merupakan klasifikasi tertinggi yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi tahunan yang diselenggarakan oleh KIP.



BPK RI menerima penghargaan sebagai **“Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik I Tahun 2021”** untuk kategori Lembaga Negara, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian Anugerah JDIH Nasional pada 2 November 2021.



BPK RI menerima penghargaan **“GATRA AWARDS 2021”** sebagai Lembaga Audit Profesional dan Modern (Kategori Politik dan Pemerintahan). Penghargaan diberikan oleh Gatra Media Group, pada 1 Desember 2021. Penghargaan ini merupakan apresiasi GATRA Media Group kepada institusi negara dan swasta serta individu atau kelompok yang menginspirasi masyarakat dengan kontribusi positif.



BPK meraih **Peringkat Kedua** Penghargaan atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran (TA) 2020 dalam kategori pagu sedang dengan nilai kinerja anggaran TA 2020 sebesar 95,88 (sangat baik) dari Kementerian Keuangan. Kementerian negara/lembaga yang diberikan piagam penghargaan adalah yang memperoleh nilai kinerja anggaran dalam kategori sangat baik (lebih dari 90,00).



BPK satker BPK Pusat (003024) meraih **Terbaik III** capaian IKPA TA 2020 kategori Pagu Anggaran di atas Rp200 Miliar.



BPK meraih **Terbaik I** atas pencapaian IKPA Satker BPK Pusat (003024) Periode Semester I tahun Anggaran 2021 kategori Pagu Besar (>Rp500Miliar).



BPK meraih **Terbaik IV** atas pencapaian IKPA Satker Sekretariat Jenderal (003019) Periode Semester I tahun Anggaran 2021 kategori Pagu Besar (>Rp500Miliar).



BPK meraih piagam penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan capaian **Opini WTP**.



BPK meraih penghargaan capaian Opini WTP atas Laporan Keuangan **minimal sepuluh kali berturut-turut** dari Tahun 2011 s.d 2020.



Tiga satuan kerja pada BPK Pusat yakni Auditor Utama Keuangan Negara (AKN) III dan AKN IV, serta Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) mendapatkan Penghargaan Zona Integritas menuju **“Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)”** dari Menteri Pendaugunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 20 Desember 2021.

Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Keberhasilan pembangunan ZI dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

BPK merupakan salah satu lembaga yang berhasil mendapatkan predikat WBK pada delapan satuan kerja, di antaranya Lima BPK Perwakilan dan tiga satuan kerja yang telah disebutkan di atas. Sementara itu, BPK Perwakilan Jawa Timur mendapatkan predikat WBBM.

PENGHARGAAN BPK PERWAKILAN



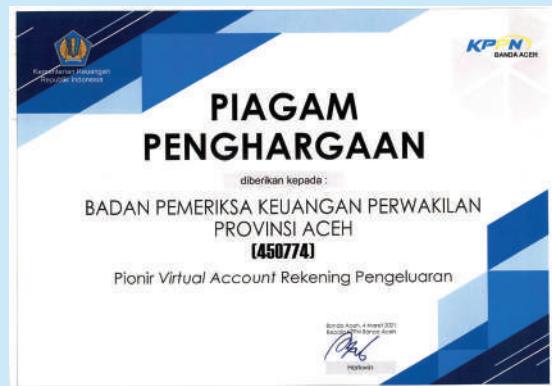
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh penghargaan **“BMN Award”** Kategori B Pengawasan dan Pengendalian BMN Tahun 2020 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang. Penghargaan diberikan pada 9 Februari 2021 di kantor KPKNL Palembang.



BPK RI Perwakilan Provinsi Yogyakarta menerima penghargaan **“Peringkat III Terbaik”** Satker Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Tahun 2020 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta pada 11 Februari 2021.



BPK Perwakilan Provinsi Aceh memperoleh penghargaan sebagai **“Satker yang Tidak Terdapat Retur SP2D pada tahun 2020”** dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh pada 23 Februari 2021.



BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan penghargaan **“Peringkat Kedua”** untuk kategori Satuan Kerja Terbaik dalam Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2020. Penghargaan diberikan secara virtual oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkal Pinang pada 25 Februari 2021.

BPK Perwakilan Provinsi Aceh memperoleh penghargaan sebagai **“Pionir Virtual Account Rekening Pengeluaran”** dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh pada 4 Maret 2021.

BPK RI Perwakilan Provinsi Yogyakarta mendapatkan **“Apresiasi”** dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY dalam acara pemberian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Award pada 26 Oktober 2021.

BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan penghargaan **“Valuation Award”** sebagai Satker Terbaik Peringkat III Wilayah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau pada 27 Oktober 2021.



BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan piagam penghargaan sebagai Satuan Kerja Mitra KPPN Jakarta VII dengan indikator kinerja **“Pelaksana Anggaran Terbaik III”** tahun 2020 pada kategori pagu anggaran pagu sampai dengan Rp50 miliar.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah atas **“Pencapaian Terbaik Kedua Nilai 100 (Sangat Baik)”** dengan tingkat penyerapan anggaran 20,48% dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2021 Klasifikasi Pagu Besar Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Tengah.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan sebagai **“Badan Publik Informatif”** kategori Instansi Vertikal dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat pada 6 Desember 2021. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas keterbukaan informasi publik di BPK Perwakilan Sumbar.



BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mendapatkan penghargaan sebagai **"Satuan Kerja Terbaik Tahun 2020"** untuk kategori Pemanfaatan BMN dan Kontribusi PNBP di Wilayah Kerja KPKNL Ternate. Penghargaan diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara pada 4 April 2021.

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mendapatkan penghargaan sebagai **"Satuan Kerja dengan Pengelola Uang Persediaan Terbaik Tahun 2020"**. Penghargaan diberikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate pada 25 Februari 2021.



BPK Perwakilan Provinsi Bali mendapatkan Penghargaan Zona Integritas menuju **“Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)”** dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 20 Desember 2021.



BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Penghargaan Zona Integritas menuju **“Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)”** dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 20 Desember 2021.



BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mendapatkan Penghargaan Zona Integritas menuju **“Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)”** dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 20 Desember 2021.



BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan Penghargaan Zona Integritas menuju **“Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)”** dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 20 Desember 2021.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan Penghargaan Zona Integritas menuju **“Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)”** dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 20 Desember 2021.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mendapatkan Penghargaan Zona Integritas menuju **“Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”** dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 20 Desember 2021.



PERAN STRATEGIS BPK DI DUNIA INTERNASIONAL

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjalin hubungan internasional sejak 1968. Setidaknya terdapat 3 (tiga) organisasi pemeriksaan dunia yang aktif diikuti oleh BPK, selain peran aktif sebagai pemeriksa eksternal pada organisasi-organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Tiga organisasi tersebut: *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), *Asian Organization of Supreme Audit Institutions* (ASOSAI), dan *ASEAN Organization of Supreme Audit Institutions* (ASEANSAI).

BPK juga memiliki kerja sama bilateral dengan BPK/*Supreme Audit Institution* (SAI) negara lain. Tujuannya, antara lain meningkatkan kedekatan hubungan kelembagaan dan kapasitas pemeriksaan maupun non pemeriksaan dan eksternalisasi kapasitas BPK.

KEGIATAN BILATERAL

Sebagai rangkaian dari upaya peningkatan kemitraan dengan SAI negara-negara lain, BPK terus melakukan berbagai kerja sama bilateral melalui berbagai program/kegiatan yang beragam. Saat ini BPK memiliki kerja sama aktif dengan 18 SAI dengan 16 diantaranya berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama bilateral serta kerja sama dan hubungan bilateral yang dilakukan secara isidental. Pada tahun 2021, BPK berkolaborasi dengan 9 (sembilan) *Supreme Audit Institution* (SAI) negara lain untuk melaksanakan kegiatan sebagai implementasi kerja sama bilateral. Selain itu, BPK juga melaksanakan kegiatan dengan 2 (dua) SAI lain di luar perjanjian kerja sama bilateral. *Highlights* aktivitas yang dilaksanakan pada 2021 berjumlah 48 kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

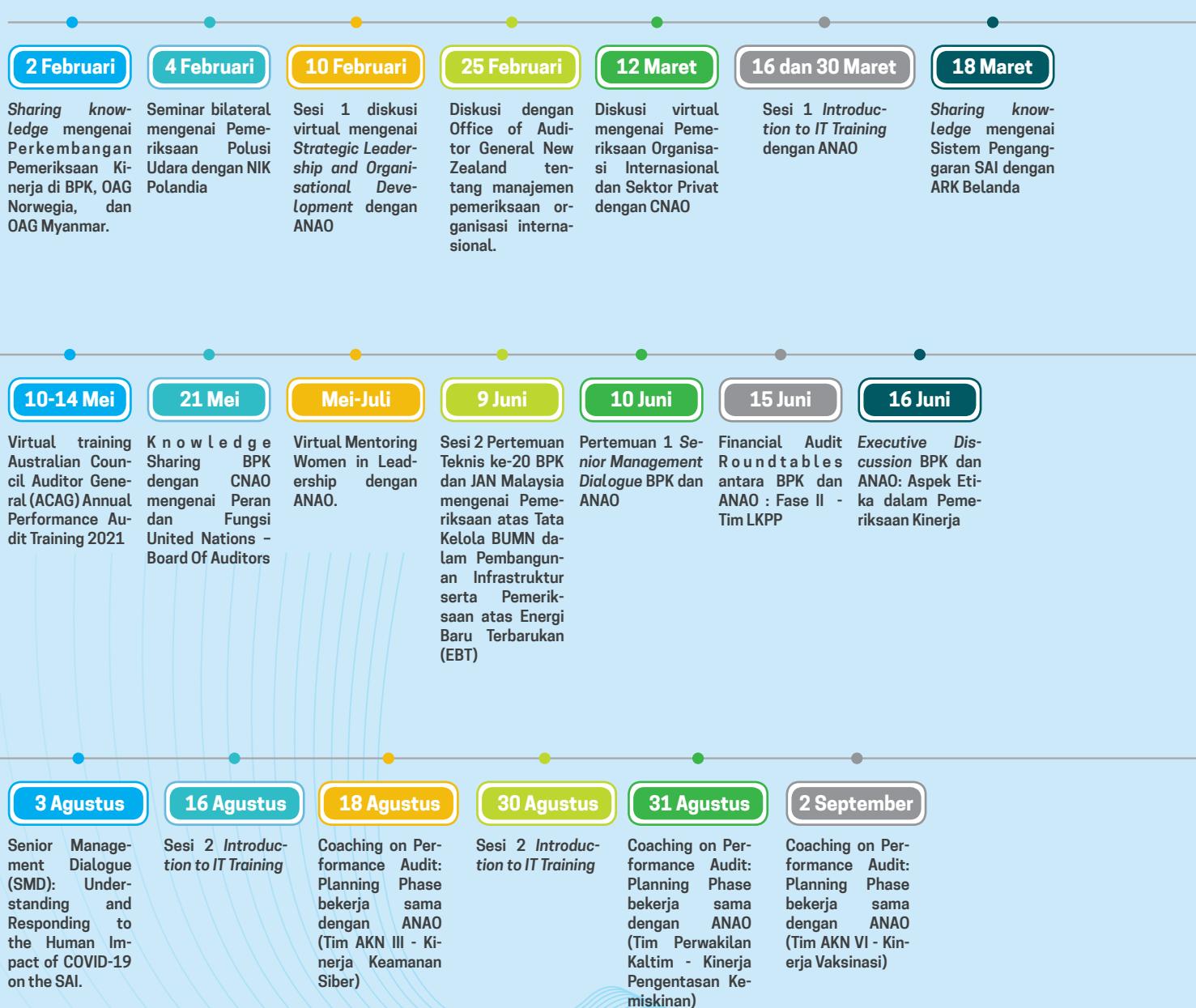
48 Kegiatan

Jumlah kegiatan yang dilakukan
BPK dalam kerja sama internasional
sepanjang tahun 2021.

13 SAI Negara
Mitra Kerja
Sama di 2021

-  Najwyzsza Izba Kontroli (NIK) Polandia
-  Australian National Audit Office (ANAO) Australia
-  Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia
-  Account of Chamber of the Russian Federation (ACH) Rusia
-  State Audit Office of Vietnam (SAV) Vietnam
-  State Audit Office of the Kingdom of Thailand (SAO) Thailand
-  The Board of Audit and Inspection (BAI) Korea
-  National Audit Office of The People's Republic of China (CNAO)
-  The State Audit Organization (SAO) Lao PDR
-  Office of Auditor General (OAG) Norway
-  Algemene Rekenkamer (ARK) Belanda
-  Office of the Auditor General New Zealand
-  United State Government Accountability Office (U.S. GAO)

RANGKAIAN KEGIATAN DENGAN SAI NEGARA MITRA



19 Maret	1 April	6 April	3 Mei	4 Mei	5 Mei	6 Mei
Pelaksanaan Financial Audit Roundtables Discussion dengan ANAO	Sesi 2 diskusi virtual mengenai Strategic Leadership and Organisational Development dengan ANAO	Bilateral Seminar Covid-19: Business and Industry Support, Digitalization and Innovation Development hosted by ACH Rusia	Sesi 1 Quality Assurance Knowledge Sharing BPK dan ANAO: "Review of Financial Audits in Pandemic Situation"	Sesi 1 Pertemuan Teknis ke-20 BPK dan JAN Malaysia mengenai Pemeriksaan atas Sektor Pariwisata.	Sesi 1 IT Knowledge Sharing antara BPK dan ANAO: "How Data Is Shaping The Role Of The SAI To Enhance Efficiency, Especially In Pandemic Situation"	Sesi 1 Knowledge sharing and networking dalam Pemeriksaan Keuangan - Financial Audit Roundtables Discussion dengan ANAO - Tim LK Mahkamah Agung
24 Juni	28 Juni	30 Juni	8-16 Juli	27 Juli	30 Juli	2-3 Agustus
Online Professional Talk dengan SAV, Vietnam: "Experience in Human Resources Training Arrangement and Management and Human Resources Quality Assessment Method"	Sesi 2 Quality Assurance Knowledge Sharing BPK dan ANAO: "Knowledge Sharing on Contemporary Quality Approaches"	Sesi 2 IT Knowledge Sharing antara BPK dan ANAO: "The SAI and The Cyber Resilience of Government"	Online Training on Environmental Audit: Assessing Environmental Impact and Loss dengan AITI BAI Korea dan KOICA	Sesi 3 Executive Discussion BPK dan ANAO: Aspek Etika dalam Pemeriksaan Kinerja	Pelaksanaan Senior Management Dialogue (SMD) menge�ai Auditing in a Post-Pandemic Environment: The role of the SAI Auditing in a Post-Pandemic Environment.	Executive Development Program Class 10 SAO Thailand: Ketua BPK Agung Firman Sampurna memberikan sambutan pada program pengembangan kompetensi untuk pejabat SAO Thailand
13-14 September	16 September	24 September	28 September	30 September	5 Oktober	
Diskusi terkait International Financial Audit Standard dan Performance antara Tim Auditor Eksternal dengan ANAO	BPK melakukan diskusi tentang Strategic Foresight dengan U.S. GAO	Mentoring Women in Leadership: Initial Meeting Periode II	Sesi 3 Quality Assurance Knowledge Sharing BPK dan ANAO: "Contemporary Quality Approaches: Risk-based File Selection and Review"	Sesi 2 Executive Discussion BPK dan ANAO: Mengukur Dampak dan Kinerja Supreme Audit Institution (SAI)	Sesi 3 IT Knowledge Sharing antara BPK dan ANAO: "The Role of The SAI in Auditing The Implementation of E-Government"	

14 Oktober	22 Oktober	22 Oktober	Oktober-Desember	1-9 November	2 November
Seminar bilateral dengan ACH Rusia: "Managing International Relations", "International Institutions and External Audit by SAIs"	Coaching on Performance Audit: Implementation Phase bekerja sama dengan ANAO (Tim AKN III - Kinerja Cyber Security)	Virtual Workshop antara BPK dan SAO Lao PDR mengenai Penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara	Mentoring Women in Leadership: Periode Lanjutan	Audit Capacity Building Training Program for Mid-Level or Higher Officials of BPK oleh BAI Korea	Sesi 4 IT Knowledge Sharing antara BPK dan ANAO: "Developing of Enterprise Resource Planning (ERP)"
10 November	11 dan 25 November	15-19 November	29 November	15 Desember	
Coaching on Performance Audit: Implementation Phase bekerja sama dengan ANAO (Tim AKN VI - Kinerja Vaksinasi)	Sesi 1 QA Coaching Tim Reviu Itama dengan ANAO: Tahap Pendahuluan dan Pelaksanaan	ACAG Introduction to Performance Auditing bekerja sama dengan ANAO secara virtual	Technical Discussion on HR Policy antara BPK dan ANAO	Coaching on Performance Audit: Implementation Phase bekerja sama dengan ANAO (Tim AKN VI - Kinerja Vaksinasi)	

ORGANISASI INTERNASIONAL

Pada tahun 2021, BPK memperluas keterlibatannya dalam organisasi internasional. Sejumlah posisi seperti anggota, sekretaris hingga ketua dijabat oleh perwakilan dari BPK. BPK juga ditunjuk sebagai ahli (*expert*), pembicara, *trainer* dan sebagainya untuk sejumlah kegiatan internasional strategis lainnya. Berikut adalah rincian keterlibatan BPK dalam organisasi internasional.

INTOSAI

Peran strategis terkait dengan International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) adalah:

- Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menjadi anggota INTOSAI *Development Initiative (IDI) Board* yang bertugas memberikan *strategic advise* atas kegiatan IDI.
- BPK menerima Penghargaan INTOSAI WGEA atas Visualisasi Hasil Pemeriksaan DAS Citarum
- BPK yang diwakili R. Yudi Ramdan Budiman menjadi Associate di IDI yang bertugas membantu IDI dalam pelaksanaan program SDGs dan Nila Eka Putri menjadi Associate di IDI yang bertugas membantu IDI dalam pelaksanaan SAI *Performance Measurement Framework* (SAI PMF).
- BPK yang diwakili oleh Oktarika Ayoe Sandha menjadi salah satu mentor dalam IDI *Transparency, Accountability and Inclusiveness (TAI)* yang digagas oleh INTOSAI *Development Initiative*.
- Kepala Seksi Manajemen Kinerja I BPK Sonia Moeharjono Puteri menjadi *resource person* untuk *Strategy, Performance Measurement and Reporting (SPMR)* Program Tahap 2.
- Selain sebagai penyelenggara, BPK menjadi *trainer* pada INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA) *International Training on Auditing SDGs: Focus on Climate Action* yang diikuti oleh 35 peserta dari 9 SAIs.
- BPK menjadi instruktur dalam 8th *International Training Programme on Environmental Auditing* yang diselenggarakan SAI India yang diwakili oleh Pitriyanti dan Jarot Sembodo K,yek INTOSAI
- Sebagai wujud implementasi komitmen BPK sebagai anggota INTOSAI Working Group on IT Audit (WGITA), BPK menyelenggarakan INTOSAI WGITA Virtual Seminar bertema “IT Audit in the Era of Industry 4.0: Opportunities and Challenges”

ASEANSAI

Peran strategis di ASEAN Organization of Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) adalah:

- Sebagai *longer-term Secretariat of ASEANSAI*, BPK menjalankan tugasnya untuk menjadi *driving force* kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ASEANSAI.
- Sebagai Ketua *Task Force on Legal Capacity* yang berhasil menyusun kajian tentang *legal capacity* di ASEANSAI

ASOSAI

Peran strategis di Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) adalah:

- Dua ahli dari AKN IV BPK: Pitriyanti dan Normas Andi Ahmad menjadi expert di ASOSAI *Cooperative Audit on Mekhong River Basin*.
- BPK berperan menyusun modul *training* bagi para peserta ASOSAI *Pilot Capacity Development Program on “Audit on Implementation of SDGs”* yang diselenggarakan oleh ASOSAI *Capacity Development Administrator (CDA)*.
- BPKI terpilih menjadi *Project Leader* kegiatan ASOSAI *Research Project ke-13* dengan topik “*Remote Audit for SAI: Future and Challenges*”. Program ini merupakan ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui kerja sama penelitian antara SAI untuk peningkatan kapasitas masing-masing SAI.

PERSERIKATAN BANGSA BANGSA

Peran strategis dalam kegiatan yang digelar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah:

- Ketua BPK Agung Firman Sampurna memberikan *special remarks* dalam kegiatan *United Nations High Level Political Forum (UN HLPF) Side Event: Inclusive and Resilient Creative Economy for Sustainable Development*.
- Ketua BPK terpilih sebagai Vice Chairman of UN Panel of External Auditor untuk periode 2022
- Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menjadi pembicara UNDESA-IBP *Virtual Event: "How can External Audits Promote Budget Credibility? Leveraging the Role of Supreme Audit Institutions*, kerja sama antara International Budget Partnership (IBP) dan United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA).
- Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menjadi pembicara dalam simposium UN/INTOSAI ke-25, berbagi pengalaman terkait “Collaborative Audit to Enhance Quality and Coverage of Audit on Covid-19 Response and National Economic Recovery”.
- Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menjadi panelis dalam “5th South-East Asia Multi-Stakeholder Forum on Implementation of the SDGs”.
- BPK menyelenggarakan *side event thematic session 4 “Sustainable Transport and Green Development: Climate Change Mitigation, Adaptation, and Resilience”*, yang merupakan bagian dari *Second United Nations Global Sustainable Transport Conference*. Anggota IV/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK, Isma Yatun menjadi salah satu panelis dalam event tersebut.
- Wakil Ketua BPK terpilih kembali sebagai Vice Chairman IAAC periode 2022

LEMBAGA LAINNYA

- Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan materi “Mobilizing SDG financing by maximising existing revenue streams and budgetary expenditure towards the SDGs” dalam acara *Inter-Parliamentary Union (IPU)* dan DPR RI yang dihadiri oleh para anggota parlemen sedunia.

INISIATIF PEMBENTUKAN SAI20

Untuk mendukung peran Pemerintah Republik Indonesia yang memegang Presidensi G20 pada 1 Desember 2021 sampai Oktober 2022, BPK berinisiatif untuk membentuk SAI20, engagement baru di bawah G20. SAI20 ini bertujuan untuk Pembentukan SAI20 ini bertujuan untuk mempromosikan kolaborasi antara SAI negara-negara G20 dan stakeholder untuk memberikan peran oversight, insight dan foresight untuk membangun ekonomi terutama untuk mendukung pemulihan yang lebih kuat dan pemulihan bersama dan mendukung upaya untuk mendorong implementasi SDGs.

Untuk mewujudkan pembentukan SAI20 tersebut, BPK telah berkoordinasi secara intensif dengan kementerian luar negeri dan kementerian Koordinator perekonomian. Selain itu, BPK juga melakukan bilateral talk dengan para SAI anggota G20 untuk menyampaikan gagasan pembentukan SAI20 untuk memperoleh dukungan. Pertemuan pertama SAI20 direncanakan akan diselenggarakan pada 26 – 27 Januari 2022 di Bali.



PERTEMUAN INTERNASIONAL

BPK secara aktif melakukan pertemuan internasional, baik secara virtual maupun fisik seiring dengan semakin membaiknya penanganan kasus Covid-19. Sepanjang tahun 2021, tercatat ada 31 pertemuan internasional yang dihadiri oleh BPK. Secara umum, pertemuan tersebut berkenaan dengan 2 (dua) hal: pemeriksaan dan koordinasi dengan lembaga internasional.

TERKAIT PEMERIKSAAN

1 Februari

BPK menggelar dua taklimat awal atau *entry meeting* yang diselenggarakan secara terpisah sebagai tanda dimulainya pemeriksaan BPK atas *World Maritime University* (WMU) dan *International Maritime Law Institute* (IMLI) Tahun Anggaran (TA) 2020. Kegiatan ini merupakan bagian dari penugasan BPK sebagai pemeriksa eksternal Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) periode 2020-2030.

2 Maret

BPK menggelar *entry meeting* pemeriksaan atas *International Maritime Organization* (IMO). Pertemuan awal tim pemeriksa dengan manajemen IMO ini bertujuan untuk menyampaikan beberapa poin utama terkait dengan pemeriksaan.

4 Maret

Courtesy Call Virtual antara Tim Pemeriksa IMO Tahun Anggaran 2020 dengan Sekretaris Jenderal IMO. Kegiatan ini memberikan penjelasan mengenai pemeriksaan atas Laporan Keuangan IMO yang saat ini sedang berlangsung.

31 Maret

Exit Meeting pemeriksaan atas IMO yang menandakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) IMO Tahun Anggaran 2020 telah memasuki tahap akhir pemeriksaan dan akan dilanjutkan ke tahap pelaporan.

17-27 Mei

BPK yang diwakili oleh Thomas Gatot Hendarto kembali ditunjuk menjadi bagian dari Tim Independent External Auditor International Anti-Corruption Academy (IACA). Berdasarkan keputusan IACA's Board of Governors tanggal 7 Maret 2018, BPK mendapatkan mandat untuk melakukan pemeriksaan 3 (tiga) tahun buku Laporan Keuangan IACA 2018-2020.

30 Juni

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan IMO Tahun Anggaran 2020 kepada Majelis IMO dalam acara "125th Session of IMO Council".

KOORDINASI DENGAN LEMBAGA INTERNASIONAL

17 Februari

17-19 Februari

19 Februari

9 April

20 April

Pertemuan *United Nation Independent Audit Advisory Committee* (UN IAAC) ke-53 dihadiri oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua IAAC terpilih.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menghadiri pertemuan ke-54 *Independent Audit Advisory Committee* (IAAC) Meeting dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua IAAC.

BPK mengikuti pertemuan khusus pemeriksa eksternal PBB dengan *International Public Sector Accounting Standards (IP-SAS) Task Force*.

BPK berpartisipasi dalam “36th Meeting of the Technical Group” yang merupakan rangkaian dari *Panel of External Auditors of the United Nations – the Specialized Agencies and the IAEA*.

BPK terlibat dalam *The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) Sustainability Reporting Roundtable*.

Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dengan organisasi profesional internasional serta memperkaya pengalaman BPK dalam upaya penyusunan *sustainability report*.

8 Juli

9 Juli

9 Juli

21-23 Juli

24 Juli

BPK mengikuti pertemuan dengan *Under Secretary General UN for Management Strategy, Policy And Compliance (USG DMSPC)* di New York, Amerika Serikat.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono melakukan pertemuan dengan *Secretariat of Office of Internal Oversight Services (OIOS)*, dalam kapasitasnya sebagai anggota dan Wakil Ketua *Independent Audit Advisory Committee* (IAAC).

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua IAAC bertemu dengan *Chair of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) United Nations (UN)* Abdallah Bachar Bong di New York, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari *courtesy visit* yang baru pertama kali dilakukan sejak Wakil Ketua menjadi anggota IAAC karena adanya pandemi Covid-19.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menghadiri pertemuan ke-55 *Independent Audit Advisory Committee* (IAAC) Meeting dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua IAAC.

Pertemuan IAAC dengan UN CHEF de CABINET

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua IAAC bertemu *Chef de Cabinet (UN CdC) PBB* Maria Luiza R Viotti untuk menyampaikan update kepada Sekretaris Jenderal PBB terkait pekerjaan dan kegiatan Komite selama setahun terakhir sejak Juli 2020 serta menyampaikan isu dan hal penting yang perlu menjadi perhatian.

21-23 April

Wakil Ketua BPK turut serta dalam pertemuan virtual UN IAAC ke-54

22 April

Ketua BPK menggelar pertemuan dengan Ketua *Board of Governors International Atomic Energy Agency (IAEA)*. Pertemuan ini untuk mengomunikasikan laporan hasil pemeriksaan, sesuai dengan *International Standards on Auditing (ISA) 260*.

4 Mei

Sebagai pemeriksa eksternal *International Atomic Energy Agency (IAEA)*, BPK menghadiri *Programme and Budget Committee (PBC) Meeting IAEA* secara virtual. BPK menyampaikan pernyataan terkait hasil pemeriksaan

17 Mei

BoG Meeting-World Maritime University

Kehadiran BPK dalam pertemuan *Board of Governors (BoG) World Maritime University (WMU)* merupakan bentuk implementasi dari ISA 260. Pemeriksa eksternal disyaratkan untuk mengomunikasikan isu-isu penting yang ditemukan selama proses pemeriksaan kepada *Those Charged with Governance*, dalam hal ini adalah BoG WMU.

26-28 Mei

BPK menghadiri *relay zoom "37th Session Programme and Budget Committee (PBC) Meeting United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)"* yang dihadiri oleh 170 Negara Anggota UNIDO.

26 - 27 Juli

Ketua BPK Agung Firman Sampurna secara khusus diundang untuk bergabung dalam proyek the Chandler Sessions on Integrity and Corruption, Blavatnik School of Government, the University of Oxford bersama 14 orang pimpinan lembaga/organisasi di dunia lainnya.

13 September

BPK menggelar *Focus Group Discussion (FGD)* penerapan *International Standards on Auditing (ISA)* dalam pemeriksaan keuangan pada lembaga internasional.

14 September

BPK menggelar *Focus Group Discussion (FGD)* penerapan *International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI)* dalam pemeriksaan kinerja pada lembaga internasional.

24 September

Tim Auditor Eksternal BPK menggelar *Focus Group Discussion (FGD)* terkait pemeriksaan pada lembaga internasional, belajar dari pengalaman yang dimiliki oleh National Audit Office of the People's Republic of China (CNAO).

6 Oktober

Ketua BPK melakukan diskusi secara virtual dengan Profesor Stone terkait gagasan awal penulisan *paper* untuk proyek the Chandler Sessions on Integrity and Corruption, Blavatnik School of Government, the University of Oxford

1 November

BPK menghasilkan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) 2020 sebagai wujud kepedulian BPK terhadap seluruh pemangku kepentingan BPK dan masyarakat luas serta menunjukkan inisiatif BPK dalam keberlanjutan di sektor ekonomi, lingkungan dan sosial.

1-3 Desember

37th (2021) *Meeting of the Technical Group of UN Panel of External Auditors* dilaksanakan secara *hybrid* dari kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat. BPK sebagai anggota menyampaikan paparan “Refinement of accounting policy for harmonizing the budget consolidation related to IPSAS 24 and IPSAS 35”.

6-7 Desember

BPK menghadiri 61st *Regular Session of the Panel* merupakan pertemuan lanjutan dari 37th (2021) *Meeting of the Technical Group of UN Panel of External Auditors* yang dilaksanakan secara *hybrid* dari kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, BPK menyampaikan paparan “Refinement of Accounting Policy for Harmonizing the Budget Consolidation Related to IPSAS 24 and IPSAS 35”.

7-8 Desember

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono yang merupakan Wakil Ketua IAAC bersama anggota IAAC memberikan masukan terhadap sistem pengawasan PBB dalam *UN Oversight Committees Meeting* ke-5.

9-10 Desember

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menghadiri pertemuan ke-56 *Independent Audit Advisory Committee (IAAC) Meeting* dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua IAAC. Pertemuan tersebut rutin diselenggarakan bagi anggota IAAC.

PERFORMANCE HIGHLIGHT 2021

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I

80 KEGIATAN PEMERIKSAAN



20

Jumlah LHP Keuangan



48

Jumlah LHP Kinerja



12

Jumlah LHP DTT

Rp1.901.706,67 NILAI TOTAL TEMUAN



Rp274.097,75

Nilai Kekurangan Penerimaan Negara



Rp1.447.043,56

Nilai Potensi Kerugian Negara



Rp180.565,36

Nilai Indikasi Kerugian Negara

dalam juta rupiah

ENTITAS YANG DIPERIKSA



Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut

“Kuncinya adalah dengan bekerja cerdas dan ikhlas. Dengan dua hal itu, insya Allah semua keterbatasan dan ketidakmungkinan akan dapat dilalui dengan baik. *Just do it because impossible is nothing.*”



Hendra Susanto
Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II

44 KEGIATAN PEMERIKSAAN



26

Jumlah LHP Keuangan



5

Jumlah LHP Kinerja



13

Jumlah LHP DTT

Rp1.185.911,89 NILAI TOTAL TEMUAN



Rp992.008,05

Nilai Kekurangan Penerimaan Negara



Rp14.537,16

Nilai Potensi Kerugian Negara



Rp179.366,68

Nilai Indikasi Kerugian Negara

dalam juta rupiah

ENTITAS YANG DIPERIKSA



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN



Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut

“

“Keberhasilan BPK dalam menjalankan kewenangannya, terutama sangat tergantung pada komitmen seluruh pemeriksa.”

“

Pius Lustrilanang
Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III

70 KEGIATAN PEMERIKSAAN



55

Jumlah LHP Keuangan



5

Jumlah LHP Kinerja



10

Jumlah LHP DTT

Rp2.571.168,88 NILAI TOTAL TEMUAN



Rp2.350.068,94

Nilai Kekurangan Penerimaan Negara



Rp37.906,84

Nilai Potensi Kerugian Negara



Rp183.193,10

Nilai Indikasi Kerugian Negara

dalam juta rupiah

ENTITAS YANG DIPERIKSA



Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut



“Ini adalah pandemi dan kejadian luar biasa sehingga kita harus melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, pemeriksaan terhadap penanganan pandemi Covid-19 merupakan respons BPK terhadap dinamika kinerja pemerintah.”



Achsanul Qosasi
Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV

53 KEGIATAN PEMERIKSAAN



42

Jumlah LHP Keuangan



5

Jumlah LHP Kinerja



6

Jumlah LHP DTT

Rp2.458.422,00 NILAI TOTAL TEMUAN



Rp2.188.156,01

Nilai Kekurangan Penerimaan Negara



Rp127.082,79

Nilai Potensi Kerugian Negara



Rp143.183,20

Nilai Indikasi Kerugian Negara

dalam juta rupiah

ENTITAS YANG DIPERIKSA



Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut

jj

“Di BPK, saya sebagai anggota BPK mewakili perempuan Indonesia untuk memberikan kontribusi di bidang pemeriksaan.”

”

Isma Yatun
Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V

541 KEGIATAN PEMERIKSAAN



292

Jumlah LHP Keuangan



111

Jumlah LHP Kinerja



138

Jumlah LHP DTT

Rp2.570.650,83 NILAI TOTAL TEMUAN



Rp1.150.672,17

Nilai Kekurangan Penerimaan Negara



Rp243.035,67

Nilai Potensi Kerugian Negara



Rp1.176.942,99

Nilai Indikasi Kerugian Negara

dalam juta rupiah

ENTITAS YANG DIPERIKSA



BPKH
Badan Pemeriksa Keuangan Negara



Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut

Keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa

“BPK perlu mampu menghubungkan setiap rupiah yang keluar dari APBN atau APBD dengan kemakmuran rakyat. Sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan menambah lapangan kerja.”

Harry Azhar Azis

Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI

457 KEGIATAN PEMERIKSAAN



264

Jumlah LHP Keuangan



115

Jumlah LHP Kinerja



78

Jumlah LHP DTT

Rp1.814.598,49 NILAI TOTAL TEMUAN



Rp376.601,29

Nilai Kekurangan Penerimaan Negara



Rp293.743,24

Nilai Potensi Kerugian Negara



Rp1.144.253,96

Nilai Indikasi Kerugian Negara

dalam juta rupiah

ENTITAS YANG DIPERIKSA



Lembaga terkait di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri entitas tersebut

Keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua



“Setiap melaksanakan tour of duty ke daerah-daerah saya selalu mengusung pepatah Jangan pernah bertanya apa yang sudah negara berikan untuk kita tapi justru kita tanyakan apa yang sudah kita berikan untuk negara.”



Nyoman Adhi Suryadnyana
Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII

46 KEGIATAN PEMERIKSAAN



Jumlah LHP Keuangan



Jumlah LHP Kinerja



Jumlah LHP DTT

Rp8.402.443,19 NILAI TOTAL TEMUAN



Rp7.731.805,76

Nilai Kekurangan Penerimaan Negara



Rp502.769,47

Nilai Potensi Kerugian Negara



Rp167.867,95

Nilai Indikasi Kerugian Negara

dalam juta rupiah

ENTITAS YANG DIPERIKSA



Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut

Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita
Pengembangan Proyek Asahan



“Kehadiran pemeriksa eksternal dan aparat pengawasan intern merupakan wujud nyata komitmen penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang lebih kuat dan lebih baik serta berkeseimbangan.”



Daniel Lumban Tobing
Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK

PERFORMANCE HIGHLIGHT 2021

AUDITORAT UTAMA INVESTIGASI

266 KEGIATAN PEMERIKSAAN

 3 Pemeriksaan Investigatif	 32 Penghitungan Kerugian Negara	 131 Pemberian Keterangan Ahli pada Tahap Penyidikan	 100 Pemberian Keterangan Ahli pada Persidangan
--	---	---	--

Rp46.623.405,08 NILAI TOTAL KERUGIAN

 Rp22.852.990,17 Indikasi Kerugian Negara/Daerah	 Rp23.770.414,91 Kerugian Negara/Daerah
---	--

dalam juta rupiah

PEMANFAATAN LAPORAN HASIL PI/PKN/PKA OLEH INSTANSI BERWENANG DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM

49 Pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif (PI)

- 20 LHP PI Digunakan untuk Tahap Penyelidikan
- 29 LHP PI Digunakan untuk Tahap Penyidikan

530 Pemanfaatan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN)

- 108 LHP PKN Digunakan untuk Tahap Penyidikan
- 422 LHP PKN Digunakan untuk Tahap Penyidikan yang sudah lengkap (P-21)

860 Pemanfaatan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) pada Tahap Penyidikan

524 Pemanfaatan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) Persidangan

- 524 PKA Digunakan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

“Penyidik dan pemeriksa juga harus konsisten dengan domain masing-masing, yaitu APH pada aspek hukum dan konstruksi kasus, sedangkan pemeriksa harus konsisten pada metode investigasi dan penghitungan kerugian negara.”

“

Agus Joko Pramono
Wakil Ketua BPK

“

PENYAMPAIAN PENDAPAT BPK

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan pendapat. Hal itu disampaikan kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

Pendapat tersebut disampaikan terkait dengan permasalahan yang berulang dan masih belum terselesaikan. Tujuan penyampaian pendapat ini dalam rangka perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pendapat BPK dimaksud meliputi perbaikan di bidang pengelolaan aset, pendapatan dan belanja, serta pelayanan masyarakat.

Pada 2021, BPK telah menyampaikan sejumlah pendapat. Di antaranya, terkait Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Laporannya telah disampaikan kepada Presiden pada 18 Januari 2021.

Penyampaian pendapat ini juga sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024. Melalui peran *insight*, BPK dapat memberikan pendapat mengenai program-program, kebijakan dan operasi yang kinerjanya baik, serta menyarankan praktik-praktik terbaik (*best practices*) untuk dijadikan acuan. Salah satu peran BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas adalah melalui pemberian pendapat.

” Pendapat BPK ini memiliki arti penting, karena BPK bukan saja menjalankan peran *oversight*, tetapi juga berupaya memberikan nilai dan manfaat lebih bagi para pemangku kepentingan melalui peran *insight* dan *foresight*. ”

Ketua BPK RI
Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE, QGIA

KEBERLANJUTAN DANA OTSUS PAPUA DAN PAPUA BARAT

Provinsi Papua diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua sesuai dengan UU Otonomi Khusus. Kebijakan tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Selain itu, tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk dalam kategori belum mandiri. Padahal pemberian dana tunai melalui transfer daerah tersebut ditujukan untuk menjadi katalis bagi Provinsi Papua dalam mengejar ketertinggalan.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua yang dilakukan pada 2008-2019 menunjukkan banyaknya permasalahan yang berulang dan belum terselesaikan. Umumnya merupakan permasalahan mendasar dalam pengelolaan Dana Otsus Papua pada aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, BPK memberikan pendapatnya agar dapat memberikan nilai dan manfaat bagi pemangku kepentingan atas keberlanjutan Program Otsus Papua. Program tersebut masih memiliki masalah mendasar pada aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Akibatnya, program yang akan berakhir pada tahun 2021 itu belum optimal dalam pencapaian tujuan.

Rp86,45 Triliun
Dana Otsus Papua 2002-2019

Rp28,06 Triliun
Dana Tambahan Infrastruktur
2002-2019

Rp114,51 Triliun
Total Dana Otsus Papua
2002-2019

PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN DANA OTSUS PAPUA

1. Pemberian Dana Otsus dalam bentuk tunai dengan transfer daerah belum dikelola secara memadai dan menimbulkan terjadinya penyimpangan.
2. Salah satu tantangan dalam pelaksanaan Program Otsus adalah mengenai *entitlement* dalam rangka kepastian hukum untuk membuka ruang investasi.
3. UU Otsus tidak mengamanatkan penyusunan *grand design* pembangunan Papua sehingga implementasinya belum sepenuhnya sejalan dengan semangat UU Otsus dan berpotensi adanya tumpang tindih pelaksanaan kewenangan serta pendanaannya.
4. Permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan UU Otsus tidak dapat segera diatasi karena tidak adanya aturan terkait pihak yang melakukan evaluasi. Begitupula dengan tugas pengawasan.
5. Peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi (Perdasi) yang diamanatkan dalam amanat UU Otsus belum seluruhnya ditetapkan.
6. Pengelolaan urusan bersama (UB) bidang pendidikan pada Biro Otsus Papua belum optimal karena belum melakukan pengembangan kapasitas masyarakat Papua untuk peningkatan kualitas dan daya saing.
7. Kapasitas SDM pada satuan pelaksana kurang memadai sehingga berdampak pada perencanaan dan alokasi Dana Otsus yang belum selaras dengan UU Otsus, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang tidak transparan dan akuntabel, serta pengawasan yang belum optimal.

361 Masalah

Dengan nilai Rp759,13 miliar atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

106 Masalah

Kelemahan SPI

239 Masalah

Dalam pengelolaan Dana Otsus terkait dengan nilai ekonomis, efisiensi, dan efektifitas

10 PENDAPAT BPK UNTUK DANA OTSUS PAPUA

1. Melanjutkan Program Otsus Papua dengan memperbaiki tata kelola dan membangun sistem yang menjamin akuntabilitas dan transparansi serta ukuran kinerja yang jelas.
2. Pelaksanaan Program Otsus Papua diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas infrastruktur fisik, khususnya prasarana transportasi jalan dan jembatan.
3. Membangun kesadaran perlunya *entitlement* dalam rangka kepastian hukum untuk mengembangkan investasi, misalnya dengan pembentukan *task force* yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan MRP.
4. Perbaikan dalam aspek regulasi dengan menyusun dan menetapkan *grand design* pembangunan Papua dengan melibatkan Pemprov Papua dan Papua Barat.
5. Menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan evaluasi atas implementasi UU Otsus Papua, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
6. Mendorong penyusunan Perdasus dan Perdasi yang belum ditetapkan sesuai dengan amanat UU Otsus.
7. Memperkuat kelembagaan MRP dengan membentuk instrumen kelembagaan antara lain Komite Pengawas dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
8. Meningkatkan kapasitas masyarakat Papua dengan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mencetak tenaga kerja terampil.
9. Menggunakan penyedia yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaan infrastruktur dan harus melibatkan masyarakat Papua sehingga terjadi *transfer of knowledge*.
10. Peningkatan kapasitas SDM pada satuan-satuan pelaksana pengelolaan Dana Otsus Papua sehingga mampu mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas pengelolaan Program Otsus secara optimal.

INDIKATOR KESEJAHTERAAN PAPUA MASIH RENDAH (2019)

Indeks Pembangunan Manusia

60,84

Papua

64,70

Papua Barat

71,92

Nasional

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dan Papua Barat dalam 10 tahun terakhir selalu meningkat. Posisinya masih selalu di bawah indikator rata-rata nasional, walaupun telah memasuki kategori sedang.

Tingkat Kemiskinan

26,55%

Papua

21,51%

Papua Barat

9,22%

Nasional

Persentase penduduk miskin Provinsi Papua dan Papua Barat jauh di atas persentase penduduk miskin nasional. Dibandingkan dengan RPJMD, Papua belum memenuhi target, sementara Papua Barat sudah melampaui.

Rasio Gini

0,390

Papua

0,390

Papua Barat

0,380

Nasional

Pada periode 2010-2019 Rasio Gini Provinsi Papua dan Papua Barat berfluktuasi. Secara keseluruhan, rasio gini Papua menurun, dari 0,414 pada 2010 menjadi 0,390 pada 2019, rasio gini Papua Barat sebaliknya: dari 0,381 menjadi 0,390.

Pengeluaran Per Kapita

Rp7,34 Juta
Papua

Rp8,13 Juta
Papua Barat

Rp11,30 Juta
Nasional

Pengeluaran per kapita Provinsi Papua dan Papua Barat meningkat dari Rp6,25 juta dan Rp6,68 juta di tahun 2010 menjadi Rp7,34 juta dan Rp8,13 juta pada tahun 2019. Namun masih jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar Rp11,30 juta pada tahun 2019.

Kinerja Pertumbuhan Ekonomi

-15,72%
Papua

2,66%
Papua Barat

5,24%
Nasional

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua dan Papua Barat jauh dari target RPIMD yang telah ditetapkan. Bahkan ekonomi Papua mengalami kontraksi, sedangkan Papua Barat tumbuh tipis, jauh di bawah kinerja ekonomi nasional.

Angka Harapan hidup

65,65 tahun
Papua

65,90 tahun
Papua Barat

71,34 tahun
Nasional

Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Papua dan Papua Barat meningkat dari 64,31 tahun dan 64,59 tahun pada 2010 menjadi 65,65 tahun dan 71,34 tahun pada 2019. Namun, AHH kedua provinsi tersebut masih jauh di bawah nasional yang 71,34 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah

6,65 tahun
Papua

7,44 tahun
Papua Barat

8,34 tahun
Nasional

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Papua dan Papua Barat meningkat, 5,59 tahun dan 6,77 tahun pada 2010 menjadi 6,65 tahun dan 7,44 tahun pada 2019. Namun, RLS masih berada di bawah RLS nasional yaitu sebesar 8,34 tahun.

Harapan Lama Sekolah

11,06 tahun
Papua

12,72 tahun
Papua Barat

12,95 tahun
Nasional

Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Papua dan Papua Barat meningkat, dari 8,57 tahun dan 11,10 tahun pada 2020 menjadi 11,06 tahun dan 12,72 tahun pada 2019. Namun, HLS kedua provinsi tersebut masih di bawah HLS nasional, yaitu 12,95 tahun.

Tingkat Kesempatan Kerja

96,49%
Papua

93,57%
Papua Barat

94,77%
Nasional

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Provinsi Papua lebih baik dari pencapaian rata-rata nasional. Sedangkan posisi Provinsi Papua Barat lebih rendah. Hal ini menunjukkan kesempatan kerja pada Provinsi Papua lebih tinggi dari nasional dan Papua Barat.

Tingkat Pengangguran Terbuka

3,51%
Papua

6,43%
Papua Barat

5,23%
Nasional

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua lebih rendah dibandingkan nasional maupun Provinsi Papua Barat. Sementara TPT Provinsi Papua Barat yang sebesar 6,43%, melebihi posisi rata-rata nasional.

Sumber Data: BPS

MENDORONG EFEKTIVITAS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti efektivitas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memiliki beragam masalah mulai dari kepesertaan, pelayanan, maupun pendanaan dan belum terselesaikan hingga kini. Temuan itu mengacu pada 8 (delapan) sasaran yang tertuang dalam Peta Jalan JKN 2012-2019.

Dalam aspek kepesertaan, jumlah peserta per 31 Desember 2019 sebanyak 224.149.019 atau 83,98% dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut masih di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang sebesar 95%.

Kemudian, pada akhir tahun 2019, defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tercatat sebesar Rp51,0 triliun. Kekurangan dana tersebut kian dalam dibandingkan posisi tahun 2015 yang sebesar Rp9,07 triliun.

Masalah-masalah tersebut berdampak pada efektivitas program serta memburuknya kondisi keuangan DJS Kesehatan. Untuk itu, permasalahan tersebut perlu diatasi secara sinergis melalui kerja sama dan koordinasi lintas kementerian dan lintas lembaga. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan dengan dukungan pemangku kepentingan terkait.

Rp25,12 Triliun
Rerata Defisit DJS Kesehatan
per tahun (2015-2019)

Rp4,44 Triliun
Rerata Bantuan Pemerintah
per tahun (2015-2019)

109,00%
Rerata Rasio Klaim
per tahun (2015-2019)

3 MASALAH DARI HASIL PEMERIKSAAN

1. Pemerintah belum memenuhi target pencapaian Universal Health Coverage karena Sistem data base kepesertaan Program JKN belum terintegrasi dengan sistem data base kementerian/lembaga/instansi lain dan pelayanan publik lainnya.
2. Peserta program JKN belum mendapatkan pelayanan yang optimal, utamanya disebabkan oleh urusan administrasi, teknis serta tidak

- meratanya sumber daya kesehatan.
- Defisit dalam pendanaan penyelenggaraan Program JKN terus terjadi meski pemerintah telah memberikan bantuan keuangan kepada Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan karena iuran dari peserta JKN belum mampu menutupi beban klaim yang terjadi.

Rp35,78 Triliun
Iuran PBI dari APBN periode
2019

Rp111,75 Triliun
Total Pendapatan Iuran 2019
(termasuk PBI APBN)

Rp117,96 Triliun
Jumlah Beban 2019

REKOMENDASI BPK KEPADA PEMERINTAH

- Mewujudkan data tunggal peserta Program JKN yang valid dan real time serta menjadikan kepesertaan JKN sebagai syarat dalam pengurusan pelayanan publik, termasuk layanan perbankan.
- Memperluas penerapan penerbitan SEP dengan *finger print* dalam layanan administrasi baik pada tingkat FKTP maupun tingkat FKRT.
- Memetakan sumber daya kesehatan secara komprehensif serta memperbaiki pengelolaan pemenuhan obat dengan pemangku kepentingan terkait.
- Melakukan evaluasi atas tarif INACBG's.
- Menyusun mekanisme pengumpulan iuran yang efektif, terutama dari segmen PPU dan PBPU.
- Melakukan reformasi besaran pembayaran kapitasi dan peran FKTP sehingga masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang ideal.
- Melakukan penyempurnaan aplikasi verifikasi klaim pelayanan kesehatan pada BPJS.
- Mendorong kolaborasi pendanaan dengan pemerintah daerah sehingga memberi ruang bagi APBD untuk berkontribusi dalam Program JKN serta mengatasi defisit keuangan DJS Kesehatan sesuai dengan kemampuan fiskal.

CORPORATE UNIVERSITY MERESPONS PERKEMBANGAN PENGETAHUAN

Pada 8 April 2021, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara (Badiklat PKN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertransformasi menjadi Corporate University yang secara resmi disingkat sebagai BPK CorpU. Lembaga ini, terutama, akan mendorong organisasi pembelajar (learning organization) mengingat organisasi seperti BPK senantiasa harus merespons perubahan yang begitu cepat, khususnya di bidang pengetahuan.

Kehadiran BPK CorpU yang diresmikan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna juga merupakan implementasi amanat dari Rencana Strategis (Renstra) BPK RI 2020–2024: “Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara.”

Prinsip utama keberadaan BPK CorpU adalah harmonisasi antara pembelajaran dengan kinerja pencapaian visi, misi, nilai-nilai dasar, tujuan, dan sasaran strategis BPK. Oleh karena itu, peran pembelajaran dalam *anticipating change, accelerating change, career development, and filling competency gap* menjadi sangat strategis.

POLA PEMBELAJARAN BPK CORPU

Proses pembelajaran dalam kerangka BPK CorpU menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, antara lain melalui pengembangan *Massive Online Open Course* (MOOC). Pengembangan konten materi pembelajaran dibuat menarik, fleksibel dan mudah diakses sehingga bisa memfasilitasi konsep *learning from anywhere and anytime*. Pembelajaran BPK CorpU menggunakan pola 70-20-10 : *on the job training-coaching and mentoring-structured learning*.

70%
On the job training

20%
coaching and mentoring

10%
structured learning

ROADMAP BPK CorpU

Beberapa *milestones* yang ditetapkan dalam *roadmap* BPK CorpU antara lain:

1. Pada tahun 2021 launching BPK CorpU, *kick off meeting* pembentukan Komite Pembelajaran, pengembangan tata kelola, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung *digital learning system*;
2. Pada tahun 2022 BPK CorpU sudah mulai berjalan dalam kegiatan pembelajaran (*running*);
3. Pada tahun 2023 BPK CorpU mengagendakan menjadi anggota *Global Council of Corporate University* (GCCU);
4. Pada tahun 2024 BPK CorpU sudah memasuki fase maturitas dimana pembelajaran dapat sepenuhnya mendukung kinerja organisasi dan BPK CorpU menjadi aktivitas keseharian dalam pembelajaran di BPK.



PEMBANGUNAN DIGITAL LEARNING SYSTEM

BPK CorpU memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun sistem pembelajaran, terutama dalam mewujudkan tag line “*Learning from Anywhere*”. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara (Badiklat PKN) menyusun *digital learning system* yang terdiri dari beberapa sistem informasi saling terintegrasi dalam pembelajaran dan manajemen pengetahuan.

Digital learning system yang dikembangkan tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi lainnya yang sudah ada, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Di antaranya adalah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM), Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan (SISDIKLAT).

Pengembangan *platform digital learning system* membentuk lingkungan pembelajaran yang massif dan terbuka dengan dukungan teknologi. Lingkungan demikian dapat menstimulasi semua pelaksana BPK untuk dapat bekerja, belajar, dan berbagi pengetahuan secara *customize* dengan siapa saja, dari mana saja, dan dengan metode dan *device* apa saja sepanjang waktu.

SISTEM INFORMASI YANG DIKEMBANGKAN

MOOC (Massive Online Open Course)

Platform digital pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan yang dapat diakses di mana dan kapan saja. Pembelajaran dikemas dalam paket menarik dan fleksibel, sehingga memudahkan pembelajar untuk menyerap materi dan melakukan assessment mandiri.

MOOC dirancang untuk menjadi terminal semua proses pembelajaran di BPK termasuk sebagai *data center* dari semua konten pembelajaran, dengan materi utama di bidang pemeriksaan keuangan negara. MOOC akan dibuka aksesnya untuk internal dan eksternal BPK. Oleh karenanya, MOOC harus *familiar* dan mudah diakses, fitur-fiturnya lengkap, mudah digunakan, kontennya *update*, serta sesuai kebutuhan dan harapan semua pemilik kepentingan BPK CorpU.

Sipendi (Sistem Informasi Pemenuhan Diklat)

Sistem informasi yang dapat memantau pengembangan kompetensi serta dapat diakses oleh individu pelaksana BPK atau pun atasan. Sipendi juga diintegrasikan dengan proses LNA (*Learning Need Analysis*) untuk mempermudah usulan topik pembelajaran beserta metode pembelajaran yang dibutuhkan.

Simpoel (Sistem Informasi Pool of Experts on Learning)

Merupakan sistem informasi database experts yang dimiliki BPK. Melalui Simpoel, BPK CorpU dapat mengelola experts yang memiliki berbagai pengetahuan di BPK untuk dapat bekerja sama dalam proses pembelajaran melalui penunjukan sebagai fasilitator diklat dan ikut dalam pengembangan materi pembelajaran.

Keberhasilan BPK CorpU adalah terwujudnya capaian kapabilitas organisasi sebagai *learning organization* untuk mencapai visi dan misi BPK. Capaian ini dapat diukur melalui indikator telah dilaksanakannya tata kelola BPK CorpU, terjadi pemenuhan kompetensi secara signifikan, dan menjadi Global BPK CorpU di akhir tahun 2023.

Melalui implementasi tata kelola BPK CorpU sebagaimana *roadmap* BPK CorpU, akan terbentuk kultur baru organisasi BPK, yaitu kultur pembelajaran yang harmoni dalam setiap proses kinerja untuk mencapai visi dan misi BPK. Kultur baru BPK CorpU tersebut akan membawa BPK mencapai puncak “*foresight*” kematangan organisasi “*supreme audit institution*”.

LAPORAN KEBERLANJUTAN

Tahun 2021 menjadi istimewa bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena inilah kali pertama BPK menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainable report*) dengan tema: “Akuntabilitas untuk Semua”.

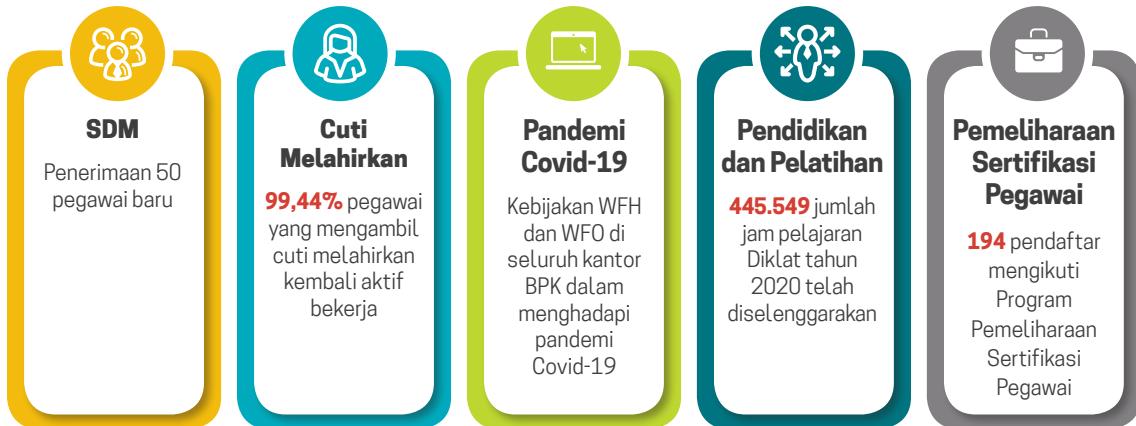
Laporan ini merupakan ikhtiar BPK agar dapat menjadi *role model* dalam melaporkan implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada kegiatan operasionalnya. Melalui pelaporan ini, BPK berharap dapat menjadi organisasi teladan bagi institusi lainnya dalam melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan serta mewujudkan peran aktif BPK dalam aspek perekonomian, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

BPK juga turut menjalankan kesepakatan INTOSAI mengenai 4 (empat) pendekatan pemeriksaan SDGs, yaitu: (1) menilai kesiapan suatu negara dalam mengimplementasikan SDGs; (2) melakukan pemeriksaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs; (3) menilai dan mendukung implementasi tujuan SDGs dalam mewujudkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan; serta (4) menjadi *role model* transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi.

PELESTARIAN LINGKUNGAN TAHUN 2020



KOMITMEN DI BIDANG SOSIAL TAHUN 2020



BIDANG EKONOMI: HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2020

Uraian	Semester I	Semester II
Temuan	7.868	5.070
Permasalahan	13.567 senilai Rp8,97 triliun	6.970 senilai Rp16,62 triliun
a. SPI	6.173 (50%)	1.956 (28%)
b. Ketidakpatuhan	6.702 (49%) senilai Rp8,28 triliun	2.026 (29%) senilai Rp12,64 triliun
c. Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	152 (1%) senilai Rp692,05 miliar	2.988 (43%) senilai Rp3,98 triliun

Informasi lebih lanjut mengenai laporan keberlanjutan BPK dapat diakses pada www.bpk.go.id

BAB 3

SEMANGAT UNTUK NEGERI

- Berkarya untuk Negeri Mengawal Subsidi, Meningkatkan Tata Kelola
- Berbakti untuk Negeri
- Kontribusi BPK untuk Pendidikan
- Beragam Kisah dalam Sorotan Publik

BERKARYA UNTUK NEGERI MENGAWAL SUBSIDI, MENINGKATKAN TATA KELOLA

Pada semester II-2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghasilkan 559 laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari entitas pemerintah pusat, PC-PEN, pemerintah daerah, BUMN dan badan lainnya. Sementara pada semester I-2021, BPK menghasilkan 732 LHP dari kegiatan pemeriksaan. Dengan demikian, untuk rentang waktu 2 (dua) semester tersebut, BPK telah menghasilkan 1.291 LHP.

Pemeriksaan yang telah dilaksanakan meliputi: Pemeriksaan Tematik, Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, serta Pemeriksaan Keuangan. Berikut adalah ringkasan dari beberapa LHP yang signifikan.



PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Pandemi Covid-19 tak hanya menimbulkan krisis di sektor kesehatan, tetapi juga berdampak besar terhadap kehidupan ekonomi dan sosial. Untuk memulihkan situasi, pemerintah telah merespons, antara lain dengan Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga melakukan *refocusing program* sehingga berdampak terjadinya realokasi anggaran. Untuk mendukung akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaannya, BPK melakukan pemeriksaan tematik melalui pendekatan *audit universe* dan *risk-based comprehensive audit* yang menghasilkan 111 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan 130 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Dari hasil pemeriksaan, BPK menemukan: efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya tercapai.



241
Objek Pemeriksaan

27 objek
pemeriksaan
pemerintah
pusat

204 objek
pemeriksaan
pemerintah
daerah

10 objek
pemeriksaan
BUMN dan
badan lainnya

4 PERMASALAHAN UTAMA

1

Alokasi Anggaran belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh dalam APBN dan realisasi penyalurannya belum sesuai rencana.

2

Pertanggungjawaban, pelaporan dan pengadaan belum sesuai perundang-undangan.

3

Penyaluran bantuan sosial belum sesuai ketentuan.

4

Realisasi program dan kegiatan manajemen bencana belum efektif.

Pemeriksaan BPK menghasilkan



2.170

Temuan



2.843

Permasalahan
senilai 2,94 triliun

887
Kelemahan
Sistem
Pengendalian
Intern (SPI)

1.241
Ketidakefisienan,
ketidakhematan,
dan
ketidakefektifan

715 Ketidakpatuhan
terhadap ketentuan
peraturan
perundang-
undangan



5.754

Rekomendasi kepada:

Menteri Keuangan

Menteri Sosial

Menteri Koperasi
dan Usaha Kecil dan
Menengah

Menteri Kesehatan

Kepala Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencana (BNPB)

Kepala Daerah

EFEKTIVITAS PENERAPAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pemeriksaan kinerja efektivitas penerapan dan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tahun 2019-semester I-2020 dilaksanakan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan instansi serta pemerintahan daerah: pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

Dari hasil pemeriksaan, BPK menemukan: Upaya Kemendagri masih kurang efektif. Sementara di tingkat pemda terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.



43

Objek Pemeriksaan

1 objek
pemeriksaan
pemerintah
pusat yakni
Kemendagri

42 objek
pemeriksaan
pemerintah
daerah:
- 4 Pemprov
- 26 Pemkab
- 12 Pemkot

7 PERMASALAHAN UTAMA

KEMENDAGRI

- 1**
Regulasi belum optimal.
- 2**
Rancangan dan proses bisnis SPBE belum ditetapkan.
- 3**
Perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi Pemerintah Daerah belum sesuai standar.

PEMERINTAH DAERAH (PEMDA)

- 1**
Komitmen pelaksanaan belum sesuai tata kelola.
- 2**
Pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur SPBE belum menyediakan dan memanfaatkan data terstandardisasi.
- 3**
Penyediaan dan pengembangan aplikasi serta layanan belum memanfaatkan aplikasi dan layanan yang baik.



11

Rekomendasi kepada:

Menteri Dalam Negeri

Gubernur

Bupati

Walikota

PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mewajibkan BPK melaksanakan pemeriksaan atas penggunaan anggaran penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pemeriksaan, BPK fokuskan pemeriksaan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 pada 5 (lima) tahapan.

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.
2. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) *Ad Hoc* dan kelompok kerja (Pokja).
3. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
4. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilu 2019.
5. Pemungutan dan perhitungan suara.

Dari hasil pemeriksaan, BPK menemukan: Permasalahan yang apabila tidak segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, maka dapat memengaruhi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang.



183

Objek Pemeriksaan

2 Tingkat
Pusat:
KPU RI dan
Kemendagri

33 KPU/
Komisi
Independen
Pemilihan
(KIP) Provinsi

145 KPU/KIP
Kabupaten/
Kota

3 Panitia
Pemilihan
Luar Negeri
(PPLN)

5 PERMASALAHAN UTAMA

1

Belum ada standar efisiensi pelaksanaan.

2

Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih belum mempertimbangkan data Bawaslu dan Kemendagri.

3

Surat suara melebihi kebutuhan PPLN.

4

BPP Ad Hoc belum memenuhi persyaratan.

5

Realisasi pelaksanaan Pemilu 2019 belum akuntabel.

Pemeriksaan BPK menghasilkan



347

Temuan



467

Permasalahan

318
Permasalahan tidak hemat, tidak efisien, dan tidak efektif.

1 Permasalahan Sistem Pengendalian Intern

148 Permasalahan tidak patuh perundang-undangan



5

Rekomendasi

Menggunakan data kependudukan Kemendagri dan Kemenlu.

Regulasi lebih detail untuk Pemilu di luar negeri.

Perlu analisis mendalam untuk persyaratan BPP Ad Hoc.

Menyetorkan kelebihan pembayaran.

KPU perlu koordinasi dengan Kemendagri.



PENGENDALIAN ILLEGAL FISHING TAHUN 2017-SEMESTER I 2020

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengendalian *illegal fishing* periode 2017-semester 1 2020 dilaksanakan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Wilayah pemeriksaan adalah di DKI Jakarta, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara.

Dari hasil pemeriksaan, BPK menemukan: Pemerintah melalui KKP dapat meningkatkan efektivitas pengendalian *illegal fishing* apabila dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan.



3 Objek Pemeriksaan

KKP DKI
Jakarta

KKP
Kepulauan
Riau

KKP Sulawesi
Utara

3 PERMASALAHAN UTAMA

- 1**
Regulasi belum memadai.
- 2**
Teknologi informasi masih lemah.
- 3**
Kerja sama belum komprehensif.



12
Temuan **12**
Permasalahan



PENGELOLAAN BANK PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) TAHUN BUKU 2018-TRIWULAN III TAHUN 2020

Pada Semester II Tahun 2020, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja tematik atas efektivitas pengelolaan bank pada BPD Tahun Buku 2018 sampai dengan triwulan III- 2020. Pemeriksaan dilakukan secara serentak pada 8 (delapan) BPD. Dari hasil pemeriksaan, BPK menemukan: Terdapat permasalahan yang mengganggu efektivitas pengelolaan bank pada bank-bank tersebut.



5 PERMASALAHAN UTAMA DI 8 BPD

- 1 Penghimpunan dana: penjualan belum pertimbangkan potensi pasar, strategi belum sesuai RBB dan laporan kinerja belum disusun.
- 2 Perkreditan: Kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan perkreditan belum memadai
- 3 Penempatan dana: Perencanaan dan realisasi belum sesuai pedoman.
- 4 Penguatan Modal: Belum sesuai perencanaan yang baik.
- 5 Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah: Pemetaan dan standardisasi, perencanaan, pengawasan internal belum memadai.



14 Rekomendasi kepada 8 BPD:

Revisi RBB

Komitmen pada Strategi Peningkatan DPK

Menyusun Laporan Kinerja dan Evaluasi Penjualan Produk DPK

Menyusun Strategi Kredit Produktif

Meningkatkan Prinsip Kehati-hatian

Menindaklanjuti Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan

Menyusun Dokumen Perencanaan yang Komprehensif

Memperbaiki Tata Kelola Penempatan Dana

Mempersiapkan Aplikasi TI

Menginisiasi dan berkoordinasi untuk Peningkatan Setoran Modal

Membuat Langkah Strategis terkait Tambahan Setoran Modal

Melakukan Pemetaan Layanan Perbankan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

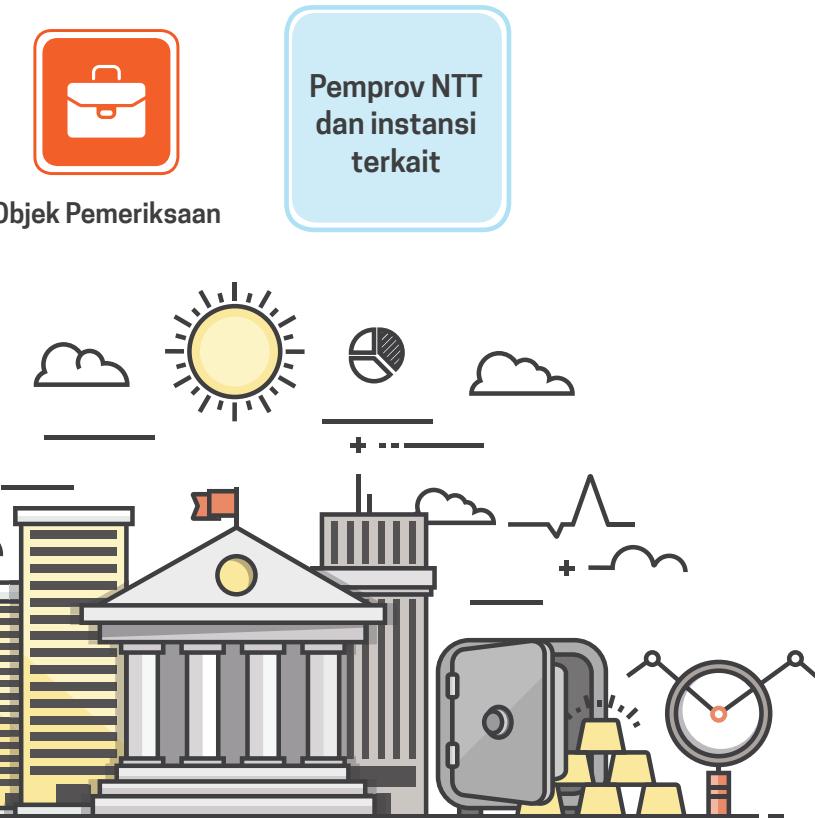
Menyusun dan Menerapkan Standar Perjanjian Kerja Sama dengan pemda

Merencanakan dan Melaksanakan Pengawasan Internal atas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada semester I-2021, BPK menghasilkan laporan hasil pemeriksaan kinerja, antara lain: 1) Efektivitas Upaya Pemerintah Provinsi NTT dalam Mendukung Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi NTT TA 2018-2020, dan 2) Penyelenggaraan Kebijakan Penanaman Modal Daerah TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan instansi terkait lainnya.

EFEKТИVITAS UPAYA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING DI PROVINSI NTT TAHUN ANGGARAN (TA) 2018-2020

BPK telah memeriksa efektivitas upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dalam mendukung percepatan pencegahan *stunting* di provinsi tersebut pada TA 2018-2020. Dari hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diselesaikan dapat memengaruhi efektivitas upaya Pemprov NTT dalam mendukung percepatan pencegahan *stunting* di wilayah Provinsi NTT.



3 PERMASALAHAN UTAMA

- 1**
Kebijakan pedoman pelaksanaan koordinasi belum ada.
- 2**
Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tidak tepat sasaran.
- 3**
Hibah ternak untuk daerah prioritas stunting tidak berhasil.

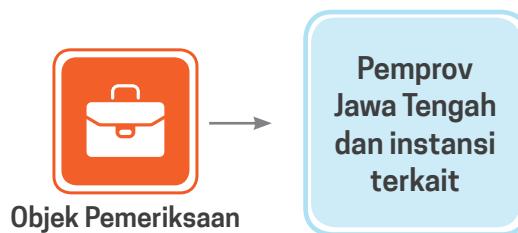


6
Temuan **9**
Permasalahan
Ketidakefektifan



PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

BPK melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kebijakan penanaman modal daerah yakni di Provinsi Jawa Tengah TA 2020 dan instansi terkait lainnya. Dari hasil pemeriksaan, BPK menemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov Jawa Tengah, maka dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan kebijakan penanaman modal daerah.



3 PERMASALAHAN UTAMA

- 1 Regulasi belum sepenuhnya tersedia.
- 2 Sistem informasi pelayanan perizinan Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi perizinan milik OPD lain.
- 3 Pemantauan atas pelaksanaan penanaman modal belum optimal.



11
Temuan **11**
Permasalahan



Rp11,46 Triliun
Nilai Potensi Penambahan Nilai Realisasi
Penanaman Modal Pemprov Jateng Tahun 2020

1.724 Perusahaan
Belum melaporkan LKPM Tahun 2020

3 Rekomendasi

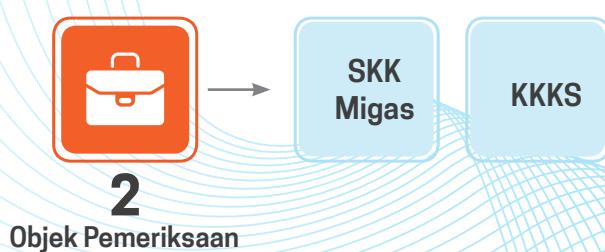
- Mengkaji perda/ perkada yang terkait pemberian insentif/ kemudahan penanaman modal.
- OPD mengintegrasikan aplikasi perizinan yang dimiliki dengan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Perizinan (SIAP) Jawa Tengah.
- Berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).



PROYEK DAN RANTAI SUPLAI MIGAS TAHUN 2018

BPK telah menyelesaikan LHP atas pelaksanaan proyek-proyek dan rantai suplai tahun 2018 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan instansi terkait. Lingkup pemeriksaan meliputi pelaksanaan proyek-proyek utama pada KKKS sesuai laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Departemen Manajemen Proyek serta pelaksanaan rantai suplai pengadaan barang dan jasa yang aktif, bernilai signifikan dan material terhadap biaya operasi tahun 2018.

Dari hasil pemeriksaan, BPK menemukan: proyek-proyek dan rantai suplai tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.



3 PERMASALAHAN UTAMA

1

Realisasi biaya Authorization for Expenditure (AFE) oleh KKKS melebihi persetujuan *closed out* AFE.

2

Terdapat 24 KKKS dengan surplus material Maintenance, Repair, and Operation (MRO) yang berlebihan.

3

Penyelesaian pekerjaan *Lease Purchase of Floating Production Unit (FPU)* untuk Pengembangan Lapangan MDA-MBH pada KKKS Husky-CNOOC Madura Ltd (HCML) berlarut-larut.



12

Temuan



14

Permasalahan

5
Kelemahan
SPI

9 Tidak Patuh
Ketentuan
Perundang-
undangan

Rp4,24 Triliun

Nilai Ketidakpatuhan



3

Rekomendasi

Kepala SKK Migas: Memerintahkan Pimpinan KKKS terkait untuk mematuhi dan melakukan koreksi biaya operasi.

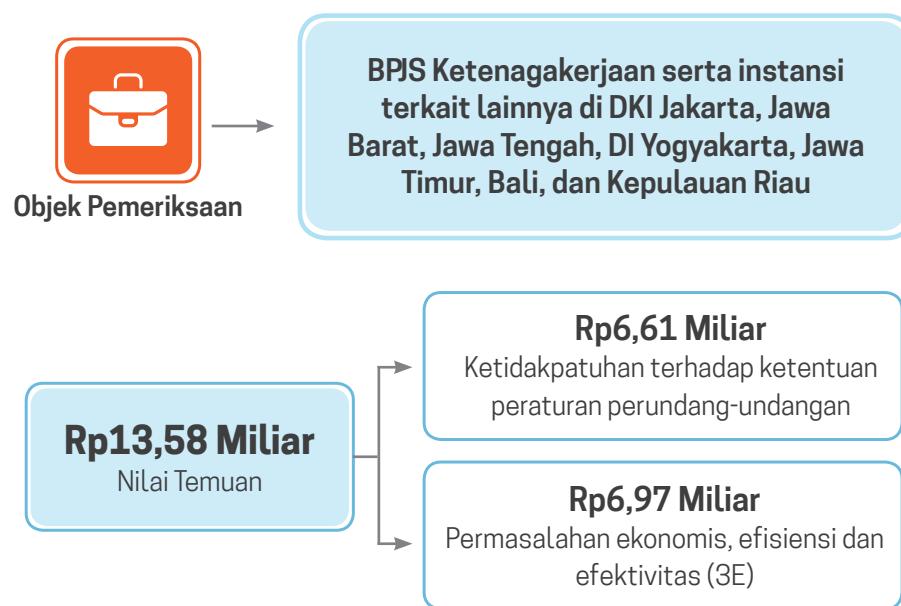
Pimpinan KKKS: Memperhitungkan kelebihan pembebanan *cost recovery* atas surplus material MRO yang berlebihan sebesar US\$75,03 juta.

Manajemen Husky-CNOOC Madura Ltd (HCML) dan Pimpinan SKK Migas: Segera memberikan keputusan terbaik atas pekerjaan *Lease Purchase Floating Production Unit (FPU)*.

PENGELOLAAN INVESTASI DAN OPERASIONAL BPJS KETENAGAKERJAAN TAHUN 2018-15 NOVEMBER 2020

Kegiatan utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) terdiri atas kepesertaan dan hubungan antarlembaga, investasi, pelayanan, serta pengaduan. Kehadiran badan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pada semester II 2020, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi dan operasional tahun 2018-15 November 2020 pada BPJS TK serta instansi terkait lainnya. Dari hasil pemeriksaan, BPK menemukan: Pengelolaan investasi dan operasional pada BPJS TK telah sesuai kriteria dengan pengecualian.



3 PERMASALAHAN UTAMA

1

Tata kelola investasi belum sepenuhnya memadai.

2

Strategic Asset Allocation (SAA) dan *Tactical Asset Allocation* (TAA) belum optimal.

3

Realisasi beban representasi manajemen tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan benar.



20
Temuan



45
Permasalahan

31
Kelemahan
SPI

12 Ketidakpatuhan
terhadap ketentuan
peraturan perundang-
undangan

2 Permasalahan
ekonomis,
efisiensi dan
efektivitas (3E)



6
Rekomendasi

Membuat mekanisme *cut loss* secara jelas dan tegas.

Mempertimbangkan *take profit* atau *cut loss*.

Melakukan rekomposisi kepemilikan reksa dana.

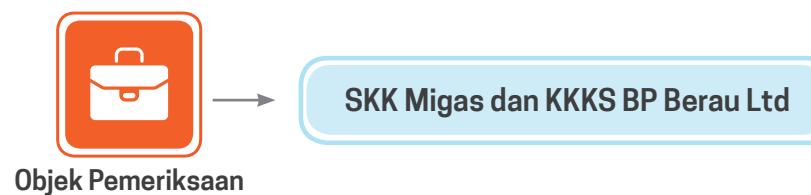
Menyusun dan menerapkan langkah-langkah pemulihan *unrealized loss* secara rinci.

Menyusun pedoman dan menerapkan evaluasi berkala atas Strategic Asset Allocation dan *Tactical Asset Allocation*.

Meminta Direksi dan Dewan Pengawas mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebagai beban representasi.

PELAKSANAAN PROYEK DAN RANTAI SUPLAI MIGAS

BPK memeriksa kepatuhan atas pelaksanaan proyek-proyek, rantai suplai, serta pembebanan biaya kantor pusat tahun 2018 Wilayah Kerja (WK) Berau, Muturi, dan Wiriagar (LNG Tangguh). Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa proyek-proyek, rantai suplai, dan pembebanan biaya kantor pusat tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.



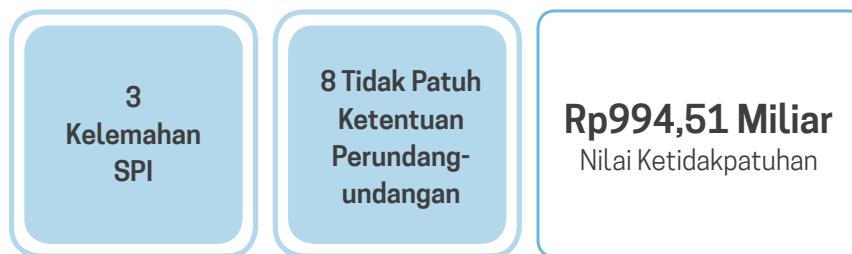
2 PERMASALAHAN UTAMA

1

Kontrak Dual Front End Engineering Design (FEED) tidak sesuai ketentuan Pedoman Tata Kerja (PTK) Nomor 007 Revisi 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai KKKS dan realisasi targetnya tidak tercapai.

2

Pengadaan Pipa Oil Country Tubular Goods (OCTG) sebesar US\$16,96 juta tidak dapat dibebankan sebagai cost recovery.



Kontrak FEED: Koreksi kurang biaya operasi WK
Berau, Muturi dan Wiriagar.

Kontrak OCTG: Koreksi kurang biaya operasi WK Berau,
Muturi dan Wiriagar.

PENGELOLAAN SUBSIDI/KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

BPK telah memeriksa kepatuhan atas pengelolaan subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) terkait subsidi energi, subsidi pupuk, subsidi bunga kredit, dan KPP di bidang angkutan umum. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa koreksi subsidi negatif senilai Rp1,85 triliun dan koreksi positif senilai Rp3,06 miliar.

Dengan demikian BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara sebesar Rp1,85 triliun dengan mengurangi nilai subsidi yang harus dibayar pemerintah. Jumlah subsidi tahun 2020 yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil, yaitu dari Rp168,16 triliun menjadi Rp166,31 triliun. Selain itu, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan subsidi/KPP telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 13 objek pemeriksaan.



Subsidi Energi	Subsidi Pupuk	Subsidi Bunga Kredit	Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)
  	    	   	 

11 PERMASALAHAN UTAMA

1

4 terkait subsidi energi di PT PLN, PT Pertamina dan PT AKR Corporindo.

2

3 terkait subsidi pupuk di PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kujang.

3

2 terkait kewajiban pelayanan publik di PT Kereta Api Indonesia dan PT Pelni.

4

2 terkait subsidi bunga kredit di PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, PT Permodalan Nasional Madani dan PT Pegadaian.



115
Temuan



181
Permasalahan

107
Kelemahan
SPI

66 Tidak Patuh
Ketentuan
Perundang-
undangan senilai
Rp2,23 triliun

8 Ketidakhematan,
ketidakefisienan dan
ketidakefektifan
senilai Rp104,45
miliar

Rp72,81 miliar

Jumlah penyetoran ke kas negara/perusahaan atas tindaklanjut dari rekomendasi BPK yang telah dilakukan oleh BUMN/anak perusahaan selama proses pemeriksaan berlangsung.



Rekomendasi

Subsidi Energi:

- PLN agar lebih cermat menghitung nilai pengajuan subsidi listrik.
- PLN berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk percepatan RUPTL.
- PLN dan AKR berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- Pertamina harus mengoreksi volume penyaluran.

Subsidi Pupuk:

- PNM agar menarik denda keterlambatan.
- Pupuk Kaltim memodifikasi desain conveyor dan peningkatkan kontrol mutu pengantongan pupuk bersubsidi.
- Pupuk Iskandar Muda, Petrokimia Gresik, Pupuk Kalimantan Timur dan Pupuk Kujang perbaiki pedoman alokasi dan mekanisme beban biaya bunga.

Kewajiban Pelayanan Publik:

- KAI agar menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya.
- Pelni agar mengintegrasikan sistem aplikasi administrasi di kapal dengan aplikasi muatan.

Subsidi Bunga Kredit:

- BRI perlu koordinasi dengan pemerintah dalam penyaluran KUR.
- BTN perlu tindaklanjuti temuan audit internal.
- PNM agar menyetorkan kelebihan pembayaran.
- Pegadaian agar mempercepat proses penyaluran subsidi yang masih mengendap.

BERBAKTI UNTUK NEGERI

STRATEGIC FORESIGHT: UNTUK MASA DEPAN INDONESIA

Dalam menjalankan fungsinya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan dapat memberikan tinjauan masa depan, yaitu implikasi jangka panjang dari keputusan/kebijakan pemerintah saat ini.

Terdapat beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai BPK melalui peran *foresight*.

4 TUJUAN DAN MANFAAT FORESIGHT BPK

- 1** Membantu menumbuhkan kepercayaan diri penyelenggara negara dalam membuat kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan negara.
- 2** Sebagai alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil pemerintah, sehingga tercipta sinergi dan kolaborasi antarlembaga.
- 3** Fasilitas pembuatan kebijakan dari BPK dalam situasi yang penuh ketidakpastian.
- 4** Sebagai bahan evaluasi dan pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan atau program pemerintah.

Penyusunan *foresight* menggunakan metode *scenario planning* dengan data yang bersumber dari hasil-hasil pemeriksaan BPK, pendapat BPK, tren dalam negeri, regional, dan global. Adapun basis data dan informasi yang digunakan hingga 25 Juli 2021.

Dalam implementasi metodologi ini, BPK bekerja sama dengan Deloitte Southeast Asia dan 20 ahli dalam bidang kesehatan, ekonomi, keuangan, sosiologi, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi. Dalam penyusunan *foresight*, BPK juga mengundang pimpinan kementerian dan lembaga terkait serta kepala daerah selaku pemangku maupun pelaksana kebijakan.

RANGKAIAN PROSES PENYUSUNAN SCENARIO PLANNING

Tahap 1

Penetapan *Focal Question*

- Pertanyaan awal yang menjadi koridor untuk memastikan relevansi keseluruhan diskusi dalam mewujudkan *scenario planning*.
- *Focal question* bisa terkait hal yang kompleks selevel negara atau interaksi internasional, namun bisa pula lebih sederhana, misalnya terkait bidang industri.
- Proses diperoleh dari hasil *brainstorming* dan diskusi dengan pakar *scenario planning*. *Focal question* pada penyusunan foresight BPK adalah "Bagaimana kondisi Indonesia lima tahun setelah Covid-19 (2021-2026)?"

Tahap 2

Mengidentifikasi *Driving Forces*

- Identifikasi faktor yang memengaruhi peristiwa, misalnya perkembangan teknologi, kondisi lingkungan, atau adanya konflik geopolitik dari berbagai sumber, baik dalam konteks global maupun nasional.
- Dalam konteks Indonesia, hasil pemeriksaan BPK merupakan sumber bagi identifikasi *driving forces*.
- Proses penentuannya dibantu oleh para pakar dengan berbagai bidang keahlian. Proses identifikasi menghasilkan 1.350 *driving forces* yang dikerucutkan menjadi 139.

Tahap 3

Menentukan *Critical Uncertainties*

- BPK menentukan *driving forces* yang memiliki ketidakpastian yang tinggi (*critically uncertain*) dan kemungkinan sangat menentukan arah perkembangan masa depan. Proses ini memerlukan pembahasan para pakar, sehingga dilakukan *shortlisting driving forces*.
- Penyederhanaan berdasarkan kemiripan sifat dan karakteristik untuk menjadi *critical uncertainties* dan dikerucutkan kembali menjadi lebih sedikit dengan nama *fundamental uncertainties* agar lebih terkendola menjadi sumbu dalam *scenario framework*.
- Dari 139 *driving forces*, dipilih 26 *critical uncertainties*. Selanjutnya, dari 26 *critical uncertainties* tersebut, dikerucutkan kembali menjadi 5 *fundamental uncertainties*.

Tahap 4

Pembuatan *Scenario Framework*

- Membuat *scenario framework*, yaitu kerangka skenario yang mungkin terjadi berdasarkan lingkup dan tujuan yang telah ditentukan.
- Penyusunan *fundamental uncertainties* menjadi sumbu-sumbu (mengarah positif maupun negatif) dalam *scenario framework*
- Proses dilakukan melalui FGD dengan pakar sektoral.
- Ditetapkan tidak terlalu banyak sumbu agar kemungkinan skenario yang terbentuk tidak terlalu kompleks, sehingga memandu pembaca fokus pada skenario yang paling signifikan.
- Dalam penyusunan foresight BPK, dari 5 *fundamental uncertainties* selanjutnya ditetapkan 2 sumbu yang membentuk empat kuadran.

Tahap 5**Penyusunan Scenario Stories**

- *Scenario stories* merupakan penjelasan dalam bentuk narasi untuk setiap skenario yang kemungkinan akan terjadi di masa mendatang.
- Pembuatan *stories* ini akan memudahkan pembaca untuk menangkap inti pesan dari setiap kemungkinan agar mereka bisa merumuskan langkah-langkah antisipatif, mencegah terjadinya kondisi buruk.
- Prosesnya dihasilkan dari diskusi dengan pakar dan divalidasi melalui *hasil brainstorming* dan *parallel benchmarking*.

Tahap 6**Penyusunan Daftar *Implications and Options***

- Pengembangan dan penyusunan pilihan rekomendasi yang paling tepat.
- Penyusunannya melibatkan pakar dengan membangun model berdasarkan data untuk menyusun rencana aksi dari setiap skenario.
- Proses ini sangat relevan dengan BPK sebagai salah satu cabang kekuasaan negara yang memiliki mandat peran auditif, bisa mengingatkan pemerintah dan DPR dalam fungsi check and balance agar “kapal tata kelola” tetap mengarah pada pencapaian tujuan bernegara.

Tahap 7**Penyusunan *Indicators and Signposts***

- Tahapan terakhir ini merupakan visualisasi skenario agar menjadi petunjuk bagi pembaca mengenai pergerakan realitas menuju kuadran skenario tertentu.
- Selain itu, guna memudahkan pemahaman skenario yang sedang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang ditemui di ruang dan waktu setelahnya.

Untuk memaksimalkan penyusunan foresight tersebut, BPK juga mempelajari hasil *foresight* dari beberapa SAI: Amerika Serikat, Canada, Belanda dan Inggris. Tidak hanya mempelajari, BPK juga meningkatkan kapasitas penyiapan *foresight* melalui diskusi dengan lembaga yang memiliki pengalaman, seperti SAI Amerika Serikat dan *Government Audit Office* (GAO) - *Center for Strategic Foresight*.

Foresight berbeda dengan *forecasting* yang bisa dikerjakan secara matematis. *Foresight* diperoleh dari pakar yang telah lama berkecimpung dalam bidang keahlian tertentu. Keahlian ini bisa berupa teknik *foresight* yang digunakan maupun keahlian terkait dengan *subject matter foresight*. BPK perlu mengidentifikasi dan menjalin kerja sama dengan para pakar tersebut, sehingga mampu menghasilkan *foresight* yang berkualitas.

Selain peran dari para ahli, *big data analytics* (BDA) juga memainkan peranan penting dalam *foresight* untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Tanpa BDA, perlu waktu dan upaya yang lebih besar untuk bisa memperoleh pemahaman yang komprehensif atas kondisi yang ingin dipetakan.

“ *Foresight* memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam situasi ketidakpastian yang tinggi melalui identifikasi tren, peluang, dan tantangan di berbagai bidang, eksplorasi berbagai perkembangan untuk menyusun strategi masa depan, serta identifikasi dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil. **”**

Ketua BPK RI
Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE, QGIA

SCENARIO FRAMEWORK MEMETAKAN EMPAT
KONDISI YANG MUNGKIN TERJADI DI MASA DEPAN



KONTRIBUSI BPK UNTUK PENDIDIKAN

BPK melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama antar lembaga untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK, salah satunya adalah menjalin hubungan dan kerja sama dengan Lembaga Nonpemerintah termasuk di dalamnya Lembaga Pendidikan (Sekolah dan Perguruan Tinggi), Asosiasi Profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sepanjang tahun 2021, BPK telah menjalankan fungsi edukasi dalam rangka memberikan kontribusi untuk pendidikan yang dilakukan dalam beberapa kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kerja Sama antara BPK dengan Akademisi

BPK memandang penting sinergi dan kolaborasi bersama para akademisi tingkat perguruan tinggi di Indonesia. Lingkup kerja sama antara BPK dengan Perguruan Tinggi bervariasi meliputi kerja sama di bidang pengembangan teknologi informasi (*Big Data Analytics*), bidang pengembangan sumber daya manusia, dan bidang penguatan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta bidang lainnya.

BPK juga sangat memperhatikan generasi muda Indonesia dengan memberikan berbagai kegiatan yang melibatkan mereka dengan tema besar “Akuntabilitas Untuk Semua”, seperti:

1. Festival Untuk Negeri (FUN) BPK : Lomba Cerdas Cermat *Online*;
2. Hackathon BPK : *Hack For Accountability and Transparency*,
3. Kuliah Umum BPK;
4. Penerimaan Kunjungan ke BPK;
5. Lomba Catur Cepat *Online*, Lomba Meme dan TikTok dalam rangkaian kegiatan BPK *Women's Leadership Session: Heart to Heart* Peringatan Hari Kartini dengan tema “Women Empowerment: A Challenge in New Millennium”.

Kerja Sama antara BPK dengan Perguruan Tinggi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat secara kelembagaan bagi kedua belah pihak. Kerja sama antara BPK dengan Perguruan Tinggi dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman/*memorandum of understanding* (MoU) dan turunannya berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS). Pada Tahun 2021, BPK

telah menandatangani sebanyak empat MoU dan enam PKS dengan Perguruan Tinggi.

Daftar nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang dijalin antara BPK dengan perguruan tinggi selama tahun 2021 dapat dilihat di bawah ini.

1. Kerja Sama dengan Akademisi

- Kuliah Umum BPK (BPK Goes to Campus)
- FUN BKP Tahun 2021
- Kunjungan Mahasiswa/Siswa ke Kantor Pusat BPK
- Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BPK
- Program Magang di Kantor Pusat BPK
- Permohonan Penelitian di Kantor Pusat BPK
- 2 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Indonesia
- PKS dengan Universitas Diponegoro
- PKS dengan Universitas Brawijaya
- PKS dengan Universitas Gadjah Mada
- PKS dengan Universitas Padjajaran
- PKS dengan Universitas Palangkaraya
- PKS dengan Universitas Sebelas Maret

2. BPK – SIP (*Smart Internship Programme*)

Sebagai wujud kontribusi BPK dalam bidang pendidikan, BPK memiliki Program Internship yang diberi nama BPK-SIP. BPK-SIP merupakan program magang bagi mahasiswa/i jenjang S1 dan D3 serta program PKL bagi siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Melalui BPK-SIP, diharapkan peserta magang dan PKL dapat memperoleh pengalaman untuk memasuki dunia kerja, meningkatkan kompetensi dalam menghadapi persaingan global, serta mendapatkan pemahaman yang baik mengenai tugas, fungsi dan peranan BPK dalam keuangan negara. Peserta BPK-SIP mendapatkan bimbingan secara rutin dari mentor yang berpengalaman, dan juga mendapatkan tambahan manfaat berupa pelatihan keahlian teknis yang semakin memperkaya kompetensi peserta hingga menjadi pribadi yang smart.

Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai tugas, fungsi dan

peranan BPK dari para peserta BPK-SIP, diharapkan BPK memperoleh dukungan yang positif dari kalangan akademisi yang merupakan salah satu pemangku kepentingan BPK untuk bersama-sama mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

2.1 Magang

BPK-SIP Magang terbagi menjadi dua periode, yaitu periode 1 : Januari s.d. Juni dan periode 2 : Juli s.d. Desember. Secara umum prosedur penerimaan BPK-SIP Magang didahului dengan peserta mengisi link registrasi yang telah disediakan dan mengunggah kelengkapan permohonan magang. Peserta kemudian akan dihubungi kembali dan mendapatkan surat balasan dari Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional.

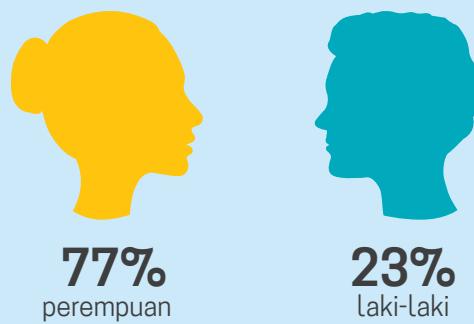
Jangka waktu pelaksanaan BPK-SIP Magang berkisar antara satu sampai dengan tiga bulan. Penempatan peserta BPK-SIP Magang akan diupayakan sesuai dengan jurusan mahasiswa/i dalam perkuliahan, dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara fisik atau virtual sesuai dengan kebutuhan satuan kerja di BPK.

Selama Tahun 2021, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional menerima permohonan magang sebanyak 129 mahasiswa/i, yang terdiri dari jenis kelamin perempuan sebanyak 99 anak (77%) dan jenis kelamin laki-laki sebanyak 30 anak (23%).

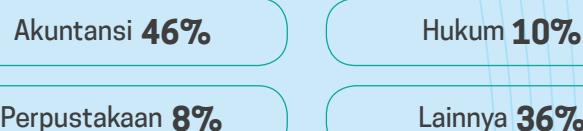
Komposisi peserta magang berdasarkan program studi/jurusan, sebagian besar 46% berasal dari jurusan akuntansi, jurusan hukum sebesar 10 %, jurusan perpustakaan sebesar 8%, dan jurusan lainnya seperti manajemen, ilmu komunikasi, ekonomi pembangunan, sistem informasi, hubungan internasional, teknik informatika, dan lainnya sebesar 36%. Peserta magang Tahun 2021 berasal dari 32 Perguruan Tinggi, yang terdiri dari sebanyak 17 (tujuh belas) Perguruan Tinggi Negeri dan 15 (lima belas) Perguruan Tinggi Swasta dari seluruh Indonesia.

PESERTA BPK-SIP MAGANG TAHUN 2021

KOMPOSISI PESERTA MAGANG TAHUN 2021 BERDASARKAN JENIS KELAMIN



KOMPOSISI PESERTA MAGANG TAHUN 2021 BERDASARKAN JURUSAN



KOMPOSISI PESERTA MAGANG TAHUN 2021 BERDASARKAN ASAL UNIVERSITAS



2.2 PKL

Sama seperti BPK-SIP Magang, BPK-SIP PKL juga terbagi menjadi dua periode, yaitu periode 1 : Januari s.d. Juni dan periode 2 : Juli s.d. Desember. Secara umum prosedur penerimaan BPK-SIP PKL didahului dengan peserta mengisi link registrasi yang telah disediakan dan mengunggah kelengkapan permohonan PKL. Peserta kemudian akan dihubungi kembali dan mendapatkan surat balasan dari Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional.

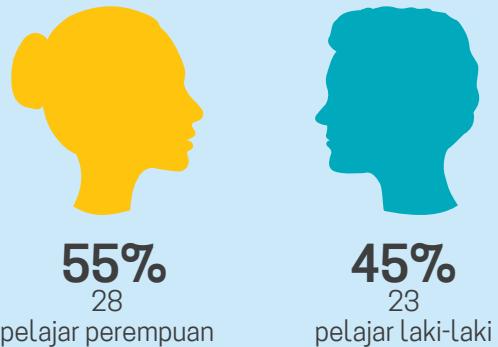
Jangka waktu pelaksanaan BPK-SIP PKL berkisar antara satu sampai dengan tiga bulan. Penempatan peserta BPK-SIP PKL akan diupayakan sesuai dengan jurusan siswa/i di sekolah, dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara fisik atau virtual sesuai dengan kebutuhan satuan kerja di BPK.

Selama Tahun 2021, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional menerima permohonan magang sebanyak 51 siswa/i, yang terdiri dari jenis kelamin perempuan sebanyak 28 anak (55%) dan jenis kelamin laki-laki sebanyak 23 anak (45%).

Komposisi peserta PKL berdasarkan jurusan, sebagian besar 14% berasal dari jurusan akuntansi, jurusan Teknologi Komputer Jaringan (TKJ) sebesar 8%, jurusan akuntansi dan keuangan lembaga sebesar 43%, jurusan multimedia sebesar 27%, dan jurusan OTK Perkantoran sebesar 8%. Peserta PKL Tahun 2021 berasal dari 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang terdiri dari sebanyak dua SMK Negeri dan tujuh SMK Swasta dari wilayah Jabodetabek.

PESERTA BPK-SIP PKL TAHUN 2021

KOMPOSISI PESERTA PER JENIS KELAMIN



KOMPOSISI PESERTA PER JURUSAN/KEAHLIAN



KOMPOSISI PESERTA BERDASARKAN ASAL SEKOLAH



3. Kerja Sama antara BPK dengan Asosiasi Profesi

Asosiasi Profesi merupakan pemangku kepentingan utama bagi BPK dalam rangka mendukung dan meningkatkan kompetensi serta profesionalisme dari para pelaksana di BPK, seperti : pelatihan dan seminar bersama. Kerja sama antara BPK dengan Asosiasi Profesi juga ditujukan untuk mengembangkan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dari sisi strategis, yang didiskusikan bersama dalam *focus group discussion* (FGD) maupun kegiatan audiensi lainnya. Selama Tahun 2021, BPK erat bekerja sama dengan asosiasi profesi meliputi namun tidak terbatas pada : Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Certified Public Accountant (CPA) Australia, dan Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI).

Pimpinan BPK juga turut berkontribusi sebagai keynote speaker maupun narasumber dalam kegiatan asosiasi profesi dan berperan serta dalam kepengurusan dari beberapa asosiasi profesi, seperti diantaranya: Ketua BPK menjadi *keynote speaker* dalam *National Anti Fraud Conference* (NAFC) ACFE Indonesia Chapter Tahun 2021 dan Wakil Ketua BPK menjadi Narasumber dalam kegiatan APAFest 2021 IAI.

Kerja sama antara BPK dengan Asosiasi Profesi juga dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU). Selama Tahun 2021, BPK telah menandatangi MoU dengan IAI dan IAPI yang diuraikan sebagai berikut.

MoU BPK dengan IAI tentang Peningkatan Peran Profesi Akuntan dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk Mendorong Tercapainya Tujuan Bernegara.

MoU BPK dengan IAPI tentang Kerja Sama Peningkatan Peran Profesi dan Standar Pemeriksaan di Bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4. Kerja Sama antara BPK dengan LSM

BPK menjalin hubungan yang baik dengan LSM dan Organisasi Masyarakat (Ormas) sebagai salah satu langkah untuk bersama-sama mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Kerja sama yang dijalin dengan LSM dan Ormas juga ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan peran BPK dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Selain itu, BPK juga terbuka dan menerima masukan dari LSM dan Ormas untuk beberapa topik strategis dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara. Bentuk kerja sama ini diwujudkan dalam berbagai Forum Diskusi dan Audiensi bersama antara BPK dengan LSM dan Ormas.

Selama Tahun 2021, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional telah berkoordinasi dan menerima audiensi dari beberapa LSM, antara lain *International Budget Partnership* (IBP), Perkumpulan Inisiatif, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). BPK juga mendukung kegiatan LSM dan Ormas dengan menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.

BPK menyadari bahwa upaya pemberantasan korupsi akan berhasil apabila didukung dengan sinergi dan kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk Lembaga Nonpemerintah seperti LSM dan Ormas. Salah satu upaya kolaborasi yang ingin diwujudkan bersama antara BPK dan LSM adalah *Public Participatory Audit* atau Pemeriksaan yang melibatkan partisipasi dari masyarakat dan LSM. Untuk saat ini BPK telah mengajak serta Lembaga Nonpemerintah dalam penyusunan rencana pemeriksaan melalui FGD dengan harapan sasaran pemeriksaan BPK menjadi lebih efektif. Masukan yang dimaksud berupa hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Lembaga Nonpemerintah yang relevan dengan bidang pemeriksaan keuangan Negara.

BERAGAM KISAH DALAM SOROTAN PUBLIK

MENGUAPNYA ALIRAN DANA BANSOS

Pemerintah menerapkan beragam kebijakan untuk menangani Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), salah satunya melalui Bantuan Sosial (Bansos). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap realisasi dan penyaluran anggaran Bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Dari pemeriksaan tersebut, terdapat sejumlah permasalahan signifikan yang ditemukan dalam realisasi dan penyaluran anggaran Bansos, setidaknya 4 (empat) permasalahan.

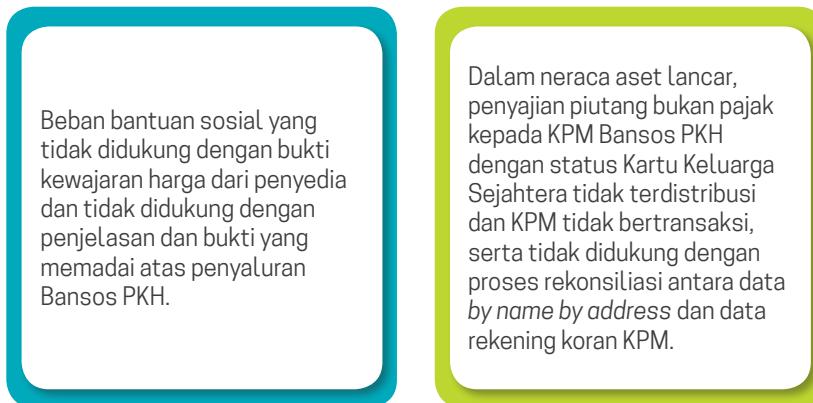
Permasalahan signifikan dalam realisasi dan penyaluran anggaran Bansos Kemensos:

- Saldo realisasi bantuan Program Sembako yang tidak dimanfaatkan oleh 1.614.831 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan belum dikembalikan ke kas negara sebesar Rp821,09 miliar.
- Realisasi Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) atas 96.483 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak dapat didistribusikan kepada KPM sebesar Rp91,34 miliar dan belum disetorkan ke kas negara.
- Sebanyak 959.003 KKS tidak dapat didistribusikan kepada KPM bantuan Program Sembako dan saldo yang ada di dalam KKS tersebut belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp519,32 miliar.
- Sisa dana Bansos tunai (BST) sebesar Rp51,71 miliar belum disetor ke kas negara.

OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN UNTUK KEMENSOS

BPK memberikan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Kementerian Sosial (Kemensos). Pemberian opini tersebut didasari pada dua permasalahan signifikan yang memengaruhi kewajaran penyajian akun dalam LKKL tahun 2020, yaitu dalam hal beban bantuan sosial dan aset lancar.

Dua Dasar Pemberian Opini WDP untuk Kemensos



PERKEMBANGAN OPINI LKKL KEMENSOS TAHUN 2016-2020

2016	2017	2018	2019	2020
WTP	WTP	WTP	WTP	WDP

Dari 86 Laporan LKKL dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang diperiksa BPK, Kemensos bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi dua lembaga yang tidak mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

PENGUATAN INFRASTRUKTUR

A. PENYEDIAAN HUNIAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas penyediaan hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Pemprov DKI Jakarta. Pemeriksaan dilakukan atas 1 (satu) objek pemeriksaan yaitu pemeriksaan atas penyediaan unit hunian yang terjangkau dan berkelanjutan untuk MBR Tahun Anggaran 2018-2020 pada Pemprov DKI Jakarta.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat 5 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan yang akan memengaruhi efektivitas upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan hunian untuk MBR di DKI Jakarta.

Beberapa masalah signifikan tersebut antara lain basis data untuk perencanaan penyediaan unit hunian yang terjangkau dan berkelanjutan belum memadai. Kemudian, sumber daya dalam penyediaan unit hunian yang terjangkau dan berkelanjutan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal serta pemenuhan unit hunian belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan MBR.

Akibat Pemenuhan Unit Belum Sesuai dengan Kebutuhan

Pengurangan *backlog* melalui penyediaan rusunawa untuk MBR berjalan lambat dan kekurangannya belum dapat terproyeksi dalam RPJMD periode berikutnya.

Target ketersediaan rusunawa dengan mekanisme BUMD dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 berpotensi tidak tercapai.

Rusunawa tidak dapat dihuni secara optimal.

Adanya potensi peningkatan pengeluaran serta menurunkan kehidupan sosial dan ekonomi MBR yang menghuni rusunawa.



Rekomendasi Untuk Gubernur DKI Jakarta

Mereviu keandalan data, konsep, dan penyempurnaan perencanaan penyediaan unit hunian. Kemudian menyusun kajian konsep maksimalisasi pemanfaatan lahan serta menyusun rencana penyediaan kebutuhan pendanaan pembangunan.

B. PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN DALAM MENCAPAI TARGET KEMANTAPAN JALAN

BPK menyoroti kinerja atas pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan dalam mencapai target kemantapan jalan yang dilaksanakan pada 7 objek pemeriksaan. Ketujuh objek pemeriksaan tersebut adalah 2 objek pemeriksaan atas efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; 1 objek pemeriksaan atas efektivitas program peningkatan kapasitas infrastruktur jalan dan jembatan; 3 objek pemeriksaan atas efektivitas program dan kegiatan pengelolaan infrastruktur jalan; dan 1 objek pemeriksaan atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kemantapan jalan.



Objek
Pemeriksaan



Instansi yang
Diperiksa dan Temuan

Pemeriksaan Efektivitas Program Pembangunan
dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pemerintah Provinsi Riau: 9 Temuan,
9 Permasalahan Ketidakefektifan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
11 Temuan, 11 Permasalahan Ketidakefektifan.





Objek
Pemeriksaan



Instansi yang
Diperiksa dan Temuan

Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas
Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat: 10 Temuan,
10 Permasalahan Ketidakefektifan.



Objek
Pemeriksaan



Instansi yang
Diperiksa dan Temuan

Efektivitas Program dan Kegiatan Pengelolaan
Infrastruktur Jalan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan: 7
Temuan, 7 Permasalahan Ketidakefektifan.

Pemerintah Provinsi Maluku: 9 Temuan, 9
Permasalahan Ketidakefektifan.



1
Rekomendasi BPK

Atas masalah-masalah yang diidentifikasi tersebut, BPK memberikan
rekomendasi kepada masing-masing instansi untuk dapat ditindaklanjuti.

PEMERIKSAAN EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN.

Instansi: Pemerintah Provinsi Riau



3

Permasalahan
Signifikan

Perencanaan dan pemeliharaan TA 2020 belum sepenuhnya didasarkan pada data dan informasi valid dan akurat.

Sarana dan prasarana belum mendukung target kemandirian jalan.

Belum sepenuhnya melakukan mitigasi faktor-faktor penghambat.



4

Rekomendasi

Koordinasi terkait pembangunan sistem atau aplikasi terpadu, mengangkat dan menetapkan penilik jalan, menyusun serta menetapkan RUJJP.

Menetapkan standar barang dan kebutuhan barang milik daerah.

Merevisi SOP tentang rekomendasi teknik pemanfaatan ruang milik jalan Provinsi Riau.

Menyusun pedoman pengawasan dan penindakan atas kelebihan muatan dalam penggunaan jalan.

Instansi: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung



3

Permasalahan Signifikan

Perencanaan program pembangunan dan pemeliharaan TA 2020 belum sepenuhnya didasarkan data dan informasi valid dan akurat.

Sarana dan prasarana belum mendukung target kemantapan jalan.

Belum sepenuhnya melakukan mitigasi faktor-faktor penghambat.



3

Rekomendasi

Menyusun rencana berdasarkan hasil survei kondisi jalan.

Membuat berita acara setiap ada perpindahan aset dan memutakhirkan informasi penanggung jawab dan lokasi aset.

Melaksanakan monev kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.

PEMERIKSAAN EFektivitas PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN.

Instansi: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat



3 Permasalahan Signifikan

Perencanaan program serta kegiatan peningkatan kapasitas belum sepenuhnya berdasarkan analisis yang memadai dan prioritas anggaran.

Belum adanya leger jalan dan RUJJP.

Belum sepenuhnya melakukan mitigasi faktor penghambat kemantapan jalan.



3 Rekomendasi

Menyusun SOP perencanaan dan kegiatan serta pengalokasian anggaran atas upaya peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.

Menyusun dokumen jalan dan RUJJP sesuai peraturan teknis.

Menyusun SOP standar pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan dan mengusulkan kelas jalan untuk seluruh ruas jalan provinsi setelah adanya revisi SK Penetapan Status Jalan Provinsi oleh kepala daerah.

EFEKТИVITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JALAN

Instansi: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan



3

Permasalahan
Signifikan

Perencanaan kegiatan preservasi jalan TA 2016-2020 tidak didasarkan pada data dan informasi yang valid dan akurat.

Perencanaan teknis fisik kegiatan preservasi jalan belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai.

Mitigasi faktor degradasi yang menghambat capaian kemantapan jalan belum sepenuhnya memadai.



3

Rekomendasi

Memetakan penanganan jalan dan penyusunan sistem informasi database jalan.

Melakukan survei muatan sumbu terberat pada ruas jalan provinsi yang menjadi kewenangannya.

Membuat dan menetapkan SOP pemberian izin rekomendasi pemanfaatan rumija.

Instansi: Pemerintah Provinsi Maluku**4**
**Permasalahan
Signifikan**

Perencanaan strategi, indikator sasaran, dan target capaian kemantapan jalan provinsi TA 2020 belum sepenuhnya selaras dengan RPJMD, Renstra Dinas PUPR, dan RKPD Provinsi Maluku.

Penyusunan rencana induk program dan kegiatan belum berdasarkan data dan informasi yang valid dan akurat.

Program dan kegiatan belum sepenuhnya didukung perencanaan yang andal.

Kegiatan monev belum optimal.

**4**
Rekomendasi

Menyusun target dan sasaran dalam dokumen perencanaan perangkat daerah

Koordinasi berkala terkait penyediaan data pendukung penyusunan LKIP dan mendokumentasikannya dengan baik.

Menyusun dan menetapkan RUJJP Maluku.

Menyusun pedoman/SOP terkait pelaksanaan monev.

Instansi: Pemerintah Provinsi Papua Barat



4
**Permasalahan
Signifikan**

Perencanaan strategi, indikator sasaran, dan target capaian kemantapan jalan provinsi TA 2020 belum sepenuhnya selaras dengan RPJMD, Renstra Dinas PUPR, dan RKPD Provinsi Maluku.

Penyusunan rencana induk program dan kegiatan belum berdasarkan data dan informasi yang valid dan akurat.

Program, kegiatan pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan belum sepenuhnya didukung dengan perencanaan yang andal.

Kegiatan monev belum optimal.



3
Rekomendasi

Menyusun pedoman teknis/SOP atas seleksi skala prioritas penetapan program dan kegiatan pengelolaan infrastruktur.

Menyusun mekanisme, formulasi dan kertas kerja yang jelas dalam menghitung tingkat pencapaian indikator kinerja pengelolaan infrastruktur.

Menyusun SOP/pedoman teknis atas proses pemeriksaan fisik hasil pekerjaan rekanan.

PEMERIKSAAN EFEKTIVITAS UPAYA PEMERINTAH DERAH DALAM MENCAPAI TARGET KEMANTAPAN JALAN

Instansi: Pemerintah Provinsi Maluku Utara



3

Permasalahan
Signifikan

Belum sepenuhnya merancang perencanaan program/kegiatan untuk mencapai target.

Penggunaan sarana dan prasarana belum optimal.

Pelaksanaan program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan belum sepenuhnya memadai.



3

Rekomendasi

Menyusun Rencana Umum Pemeliharaan Jalan sesuai dengan ketentuan.

Menyusun dan mengusulkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka mencapai target indikator kinerja proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap.

Pekerjaan pembangunan/pemeliharaan jalan supaya lebih tegas melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengawasan atas kesesuaian waktu pelaksanaan pekerjaan.

C. PEMBANGUNAN PRASARANA KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT SUMATERA SELATAN

BPK melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan (Sumsel). Hasilnya, pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games tahun 2018 itu telah sesuai dengan tujuannya. Kendati demikian, pelaksanaan pembangunannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran TA 2016-2019 pembangunan LRT Sumsel mengungkapkan 6 temuan yang memuat 6 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 1 kelemahan SPI dan 5 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,29 triliun.



3

**Temuan Pemeriksaan
yang Signifikan**

Kemahalan harga satuan pekerjaan pada pembangunan LRT Sumsel sebesar Rp1,22 triliun.

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas lima jenis barang pada equipment depo, namun belum dikenakan denda keterlambatan pekerjaan minimal Rp7,49 miliar.

Kelebihan perhitungan atas pembayaran termin sebesar Rp64,67 miliar.



**Rekomendasi
BPK**

Kelebihan pembayaran atas permasalahan harga satuan senilai Rp1,22 triliun, kelebihan perhitungan sebesar Rp64,67 miliar dan denda kepada penyedia sebesar Rp7,49 miliar untuk segera disetorkan kepada kas negara.

D. PENGELOLAAN PELAYANAN ANGKUTAN BARANG TOL LAUT

BPK menyoroti pengelolaan pelayanan angkutan barang Tol Laut tahun 2017-2018 (s.d. semester I 2018) dengan melakukan pemeriksaan kinerja terhadap Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Hasilnya, pengelolaan pelayanan angkutan barang Tol Laut masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif untuk mencapai target program angkutan barang Tol Laut. Sebanyak 10 temuan ditemukan, yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp712,55 juta.



3

**Temuan Pemeriksaan
yang Signifikan**

Aspek Perencanaan

Aspek Implementasi

Aspek Monitoring dan Evaluasi



**Rekomendasi
BPK**

Penyusunan peraturan teknis terkait perencanaan trayek dan perencanaan pembangunan infrastruktur Pelabuhan.

Peningkatan pengawasan terkait pelaksanaan pelayaran kapal angkutan barang Tol Laut.

Menyusun dan menetapkan SOP kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan angkutan barang Tol Laut sesuai dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

E. EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN JARINGAN GAS KOTA DAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR GAS

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) tahun 2015-semester I 2020 dilaksanakan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan instansi terkait lainnya.

BPK mencatat adanya upaya dan capaian yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam kegiatan pembangunan Jargas dan SPBG, salah satunya ialah output pelaksanaan pembangunan Jargas dari dana APBN melebihi jumlah sambungan rumah yang ditargetkan pada RPJMN 2015-2019. Meskipun demikian, dari hasil pemeriksaan ditemukan 17 temuan yang memuat 17 permasalahan ketidakefektifan.



3

Temuan Pemeriksaan yang Signifikan

Pemerintah belum optimal merumuskan tujuan dan alasan pembangunan Jargas dan SPBG.

Kementerian ESDM belum memiliki *roadmap* yang jelas dan terukur.

Monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pembangunan Jargas dan SPBG belum dapat menilai *outcome*.



Rekomendasi BPK

Berkoordinasi dengan Anggota Dewan Energi Nasional untuk melakukan kajian atas implementasi Jargas dan SPBG dan dampaknya.

Menginstruksikan Dirjen Migas untuk menyusun perencanaan jangka panjang kegiatan pembangunan Jargas dalam bentuk *roadmap* yang jelas dan terukur.

Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian *outcome*.

KECURANGAN DI ASABRI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri (Persero) selama tahun 2012-2019. Kecurangan itu berupa kesepakatan pengaturan, penempatan dana investasi pada beberapa pemilik perusahaan atau pemilik saham dalam bentuk saham dan reksa dana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menilai saham dan reksa dana yang menjadi instrumen investasi Asabri berisiko dan tidak likuid, yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan. Tindakan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dana investasi tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp22,78 triliun.

Pemeriksaan Investigatif tentang Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asabri (Persero) selama 2012-2019 telah dilakukan oleh BPK dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung pada 27 Mei 2021.

Pemeriksaan tersebut dilakukan atas dasar permintaan Kejaksaan Agung terhadap BPK untuk menghitung kerugian keuangan negara, pada 15 Januari 2021. Melalui penyerahan LHP tersebut, Kejaksaan Agung berterima kasih kepada BPK karena dokumen tersebut dapat membantu proses perkara di tahap selanjutnya.

Pemeriksaan tersebut juga merupakan salah satu bentuk dukungan BPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh instansi penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Pemeriksaan dapat terlaksana karena adanya dukungan dari Kejaksaan Agung, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan industri keuangan serta pihak-pihak lainnya.

“ Nilai kerugian negara yang timbul sebagai akibat adanya penyimpangan (atau perbuatan melawan hukum) dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri selama tahun 2012-2019 adalah sebesar Rp22,78 triliun. ”

Agung Firman Sampurna
Ketua BPK

The background of the image features a complex, abstract geometric pattern. It consists of a 3D grid that curves and slopes downwards from the top left towards the bottom right. The grid lines are thin and light-colored, creating a sense of depth and perspective. In the lower right quadrant, there is a series of horizontal lines that curve upwards and outwards, forming a stylized, open shape.

BAB 4

TANTANGAN

TANTANGAN KE DEPAN

TRANSFORMASI BIG DATA ANALYTIC

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono menyebutkan penggunaan big data pada sebagian besar *supreme audit institutions* (SAI) masih terbatas pada *introductory phase of implementing big data analytics* (BDA). Meskipun demikian, beberapa SAI telah menggunakan *big data* untuk menjadikan audit lebih efisien dan efektif.

Mengacu pada kondisi tersebut, SAI diharapkan mampu mendesain *big data governance framework* yang diperlukan untuk membantu SAI dalam memanfaatkan big data dalam mencapai tujuan audit. Dengan begitu, hasil pemeriksaan dapat didukung dengan argumentasi yang kuat karena berlandaskan data yang komprehensif.

Meskipun memberikan manfaat yang besar, penggunaan BDA juga memiliki risiko-risiko tertentu yang harus diantisipasi ke depannya.

Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024 menetapkan Pengembangan dan Pemanfaatan *Big Data Analytics* menjadi Inisiatif Strategis (IS) BPK dengan AKN II sebagai pengampu IS. Seluruh pimpinan BPK telah memberikan arahan dan harapan untuk implementasi IS tersebut dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan kebijakan kelembagaan BPK.

POTENSI RISIKO PENGGUNAAN BDA

Tantangan	Kemungkinan Masalah yang Dihadapi	Antisipasi/Penanganan
Data Security	Data diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.	Diperlukan penyusunan naskah dinas kebijakan pengelolaan, sharing, dan level user access.
Data Privacy	Penyalahgunaan data sensitif seperti data pribadi.	Penguatan kerangka hukum untuk menjamin pengelolaan informasi sensitif.
Biaya	Ketidakpastian kebutuhan anggaran pengembangan.	Monitoring dan evaluasi berkala serta melakukan pengukuran kinerja BDA dengan north star metric.
Bad Data	Kegagalan sharing data antarunit dan antarinstansi.	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan teknis sharing internal sebagai turunan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2020. Pengukuran kinerja satuan kerja atas BDA dan pembuatan nota kesepahaman dengan instansi pemilik data.
Regulasi	Dibutuhkan kerangka kerja tata kelola big data.	Menerbitkan regulasi big data governance sesuai standarisasi yang berlaku.

Mengingat pentingnya dan manfaat yang besar dari penggunaan BDA, BPK telah memiliki grand design BPK Big Data Analytics (Bidics). Hal itu dilengkapi dengan inisiatif strategis, pembentukan pokja, laboratorium Bidics, pengumpulan data, serta piloting Bidics untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta pemeriksaan strategis atau tematik.

Inisiasi pengembangan BDA di BPK sendiri telah dimulai sejak 2009 dengan pengenalan e-Audit dan dilanjutkan dengan sosialisasi pada periode 2010-2011 untuk memperoleh komitmen pemerintah pada inisiatif e-Audit tersebut. Kemudian, dalam rentang 2011 hingga 2019, BPK telah mengimplementasikan pemeriksaan dengan memanfaatkan big data. Sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2020-2024, BPK akan berupaya mengembangkan dan memanfaatkan BDA dalam pemeriksaan.

KENDALA HUKUM PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Salah satu rangkaian pemeriksaan BPK ialah penyelesaian ganti kerugian negara/daerah. Dalam pelaksanaannya, terdapat beragam tantangan dan upaya kecurangan.

BEBERAPA KENDALA PENGGANTI KERUGIAN NEGARA

1

Kasusnya terjadi dalam waktu yang sudah lama, sehingga kesulitan dokumen pendukung atau bendahara yang menghilang.

2

Banyak pihak yang sengaja mengulur proses penggantian agar kedaluwarsa. Padahal, proses tuntutan perbendaharaan tersebut tetap dapat dilanjutkan apabila ada proses penangguhan.

3

Kasusnya beririsan dengan proses hukum pidana. Dalam hukum pidana korupsi dikenal uang pengganti sebagai pidana tambahan selain pidana kurungan.

4

Uang pengganti yang ditetapkan dalam pengadilan tidak sesuai dengan nilai kerugian yang perlu dipulihkan.

Hal tersebut tentunya menjadi tantangan yang harus dibenahi oleh BPK baik saat ini maupun di masa mendatang. Saat ini, BPK mendorong penyelesaian ganti kerugian negara/daerah melalui sosialisasi yang gencar hingga ke berbagai daerah di Indonesia.

Hasilnya, penyelesaian ganti kerugian pada tahun 2020 dapat mencapai Rp43,8 miliar dari 41 kasus tuntutan perpendaharaan. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan rata-rata penyelesaian kerugian pada tahun-tahun sebelumnya yang berkisar Rp30 miliar.

Hal tersebut dapat terwujud karena adanya kerja sama dari seluruh perwakilan BPK di Indonesia. BPK mendorong penyelesaian ganti kerugian negara/daerah itu dapat diselesaikan dengan segera sehingga tidak berlarut-larut dalam waktu yang lama.

Untuk jangka panjang, penyelesaian tantangan dan masalah tersebut diharapkan dapat diakomodir dengan merevisi Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 yang selama ini menjadi landasan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah.

BPK juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, antara lain Tim Penyelesaian Kerugian Negara atau Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKN/TPKD). Pada level tersebut, BPK menggandeng menteri, kepala daerah, maupun inspektorat. Apabila kasus tersebut sudah meningkat hingga ke level Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), maka BPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Dalam hal kasus yang terjadi di daerah, BPK berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kerja sama itu untuk meningkatkan sosialisasi kepada pimpinan daerah dalam penyelesaian ganti kerugian daerah. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan untuk menjelaskan ketentuan yang berlaku dan menghindari ke salahpahaman seperti persoalan kedaluwarsa tuntutan.

KENDALA TUNTUTAN HUKUM ATAS PEMERIKSAAN DAN NON PEMERIKSAAN

Terkait dengan aktivitasnya sebagai lembaga pemeriksa atau Supreme Audit Institution (SAI), BPK memiliki risiko hukum yaitu berupa tuntutan hukum, baik yang berhubungan dengan pemeriksaan maupun non pemeriksaan. Risiko hukum tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK.

Dalam menangani kasus hukum tersebut, BPK mengalami sejumlah tantangan, utamanya terkait dengan proses pembuktian di muka persidangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, telah dilakukan sejumlah upaya dalam rangka mitigasi risiko yang perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemeriksa mengenai hal-hal yang perlu dilakukan pada saat pemeriksaan untuk meminimalisir risiko adanya tuntutan hukum. Misalnya, jika dikaitkan dengan pembuktian, terutama bukti surat sehingga jika terjadi tuntutan hukum terhadap BPK, bukti surat yang diajukan berupa Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) telah memenuhi syarat sebagai bukti hukum.

Tantangan

1. Tim pemeriksa dipindah tugaskan ke satuan kerja lain;
2. Tim pemeriksa kurang memahami prosedur pemeriksaan dan substansi temuan pemeriksaan;
3. KKP tidak mendukung substansi LHP/ Temuan Pemeriksaan (TP);
4. KKP tidak memenuhi syarat sebagai bukti yang lengkap dan sah secara hukum.

Mitigasi

1. Pelaksanaan Knowledge Transfer Forum (KTF) Penanganan Risiko Hukum dalam Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pembuktian dalam Proses Litigasi;
2. Pedoman Operasional Standar (POS) Penanganan Gugatan Perdata dan TUN terhadap BPK.

Sementara itu, sepanjang tahun 2021, BPK menghadapi 11 (sebelas) gugatan perdata dan 5 (lima) gugatan di bidang Tata Usaha Negara (TUN).

Akibat Pemenuhan Unit Belum Sesuai dengan Kebutuhan

Dari seluruh gugatan perdata dan TUN, sebanyak 7 (tujuh) gugatan perdata dan 3 (tiga) gugatan TUN berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Sebanyak 1 (satu) pengujian terhadap UU pada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan yang diuji yaitu Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006. Terhadap kasus hukum ini, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah memberikan amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Sebanyak 4 (empat) gugatan perdata telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Sebanyak 1 (satu) gugatan perdata dicabut oleh penggugat.

Sebanyak 5 (lima) gugatan perdata masih dalam proses persidangan.

Untuk gugatan TUN, 1 (satu) perkara dalam proses kasasi, 1 (satu) perkara dalam proses banding, 1 (satu) gugatan tidak dapat diterima, 1 (satu) gugatan dicabut oleh penggugat, dan 1 (satu) perkara masih dalam proses persidangan.

PENGEMBANGAN BPK ENTERPRISE ARCHITECTURE

Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024 menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah memasuki era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, sistem informasi dan teknologi menjadi komponen yang penting bagi keberhasilan BPK. Infrastruktur teknologi informasi merupakan salah satu investasi teknologi informasi yang diperlukan oleh BPK dalam mengelola segala kebutuhan teknologi informasi. Pengembangan enterprise architecture menjadi sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

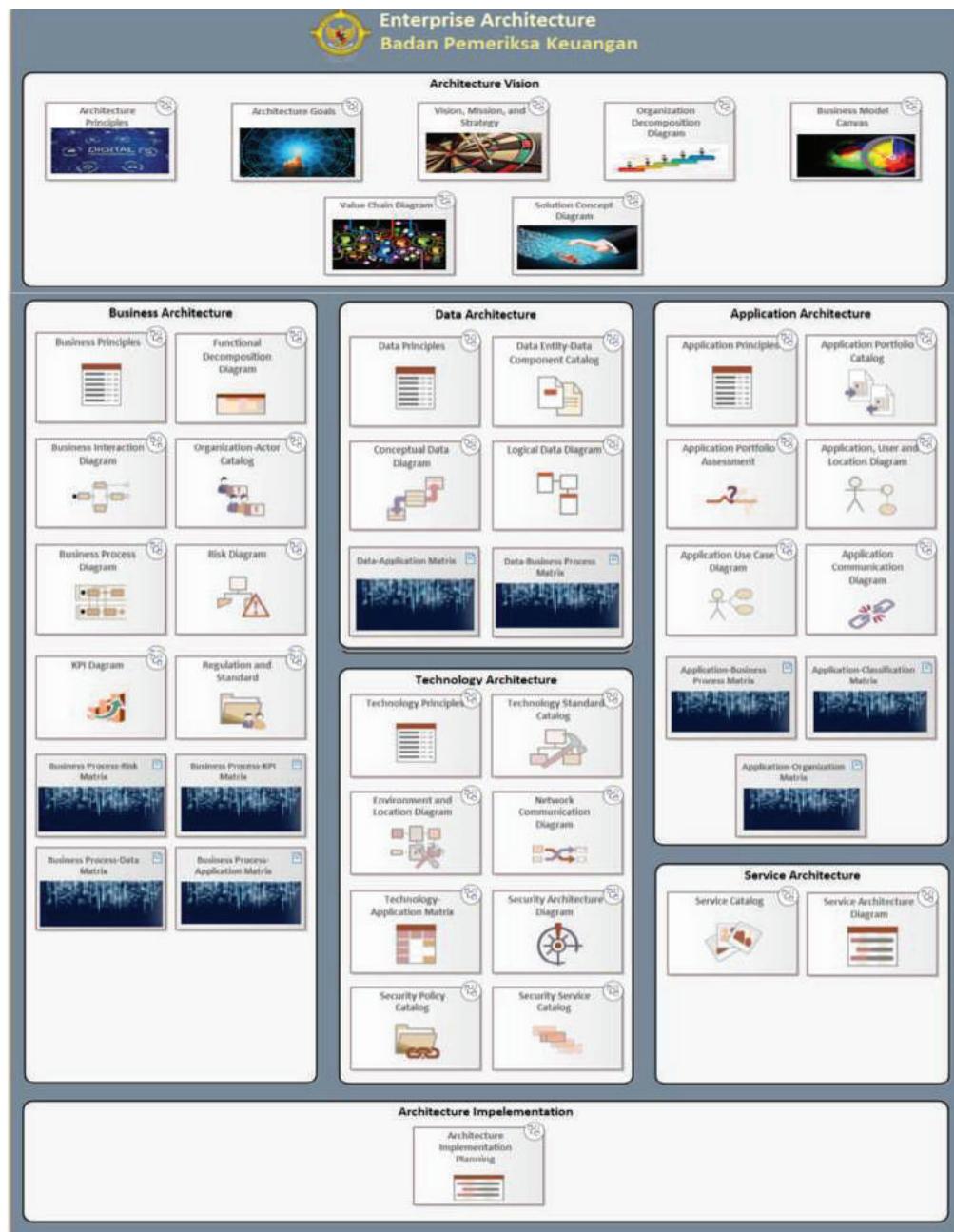
Enterprise architecture atau arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Pengembangan EA BPK bertujuan untuk:

- (a) Meningkatkan efektivitas proses bisnis dengan memodelkan proses bisnis secara komprehensif;
- (b) Meningkatkan efektivitas evaluasi dan analisis kinerja, kepatuhan, risiko dan standar pedoman pelaksanaan proses bisnis;
- (c) Meningkatkan kualitas data organisasi dengan menerapkan standar tata kelola dalam pengelolaan dan pengolahan data untuk mendukung pencapaian tujuan BPK;
- (d) Efisiensi portfolio layanan aplikasi. Mengukur kualitas layanan aplikasi dalam mendukung pelaksanaan proses bisnis BPK;
- (e) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pengembangan dan operasional layanan TI;
- (f) Meningkatkan efektivitas investasi TI dengan menyusun perencanaan kegiatan yang berkelanjutan pada pengembangan TI di BPK yang selaras dengan kebutuhan, tren dan inovasi pengembangan TI.

Kedepan, *enterprise architecture* bersifat tidak statis, sehingga lebih *agile* (cekatan) dan *resilience* (tangguh) dalam merespon perubahan kondisi lingkungan yang dinamis melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi. Oleh karena itu, BPK berinisiasi mengembangkan suatu model peta konseptual struktur dan operasionalisasi BPK

yang dibangun menggunakan *framework* yang diselaraskan dengan *Suprema Audit Institution – Performance Measurement Framework* (SAI-PMF) untuk memberikan arah pencapaian tujuan secara efisien. Model Konseptual yang dikembangkan ini disebut sebagai *BPK Digital Enterprise Architecture*.



TANTANGAN DI SEPUTAR AUDITORAT INVESTIGASI

Auditorat Utama Investigasi (AUI) dibentuk pada akhir 2016 sebagai salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui anggota yang ditetapkan BPK. AUI mempunyai tugas untuk melaksanakan pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli.

5 FUNGSI AUDITORAT UTAMA INVESTIGASI

- i**
Pengelolaan permintaan pemeriksaan investigatif, permintaan penghitungan kerugian negara/daerah, dan permintaan pemberian keterangan ahli dari instansi penegak hukum dan instansi lainnya;
- ii**
Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli pada lingkup tugas AUI, baik yang pemeriksannya dilakukan oleh AUI maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan;
- iii**
Pengusulan laporan hasil pemeriksaan investigatif dan laporan hasil penghitungan kerugian negara/daerah untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- iv**
Pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan investigatif dan laporan hasil penghitungan kerugian negara/daerah yang disampaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- v**
Pelaksanaan koordinasi pemeriksaan atas permasalahan yang berindikasi kecurangan/ *fraud*.

Hingga tahun 2021, sumber daya manusia (SDM) AUI masih terbatas jika dibandingkan dengan kasus yang harus ditangani. AUI hanya memiliki 103 pemeriksa yang terdiri dari 20 Pemeriksa Madya, 67 Pemeriksa Muda, dan 16 Pemeriksa Pertama. Namun pada tahun tersebut AUI telah menyelesaikan 217 kasus penghitungan kerugian negara (PKN) yang terdiri atas: 33 kasus sedang dalam pelaksanaan dan 184 kasus dalam koordinasi.

Statistik permintaan pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA)

Jenis Permintaan	Jumlah	Tindak Lanjut				
		Selesai/ Terbit LHP	Sedang Pelaksanaan/ Terbit ST	Sedang Pelaksanaan (Pending)	Penelaahan dan Koordinasi	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
PI	185	40	2	1	86	56
PKN	771	391	25	8	184	163
PKA	1.068	975	10	1	13	69

3 Tantangan Utama Auditorat Utama Investigasi

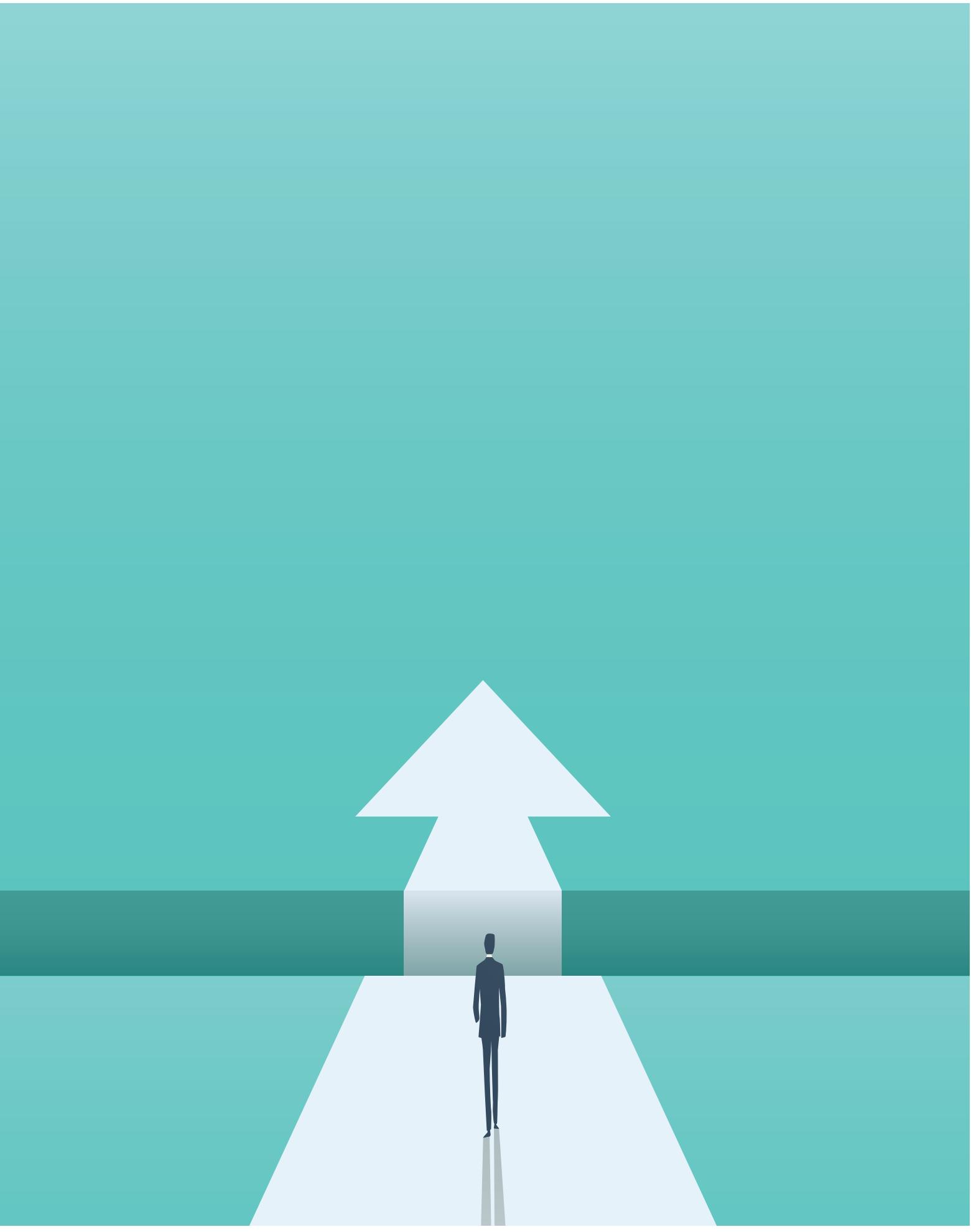
Aparat penegak hukum (APH) terkadang menilai pelaksanaan penghitungan kerugian negara relatif lambat, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana korupsi. Inilah 3 (tiga) penyebab utamanya:

- 1** Kurangnya jumlah pemeriksa yang menangani dibandingkan kasus yang dimintakan PKN oleh APH.
- 2** Kasus-kasus PKN yang bervariasi.
- 3** Belum optimalnya koordinasi teknis penanganan kasus PKN antara APH (penyidik) dengan BPK (pemeriksa) belum optimal.

8 Tawaran Solusi

BPK telah memiliki inisiatif strategis peningkatan peran BPK dalam pemberantasan korupsi melalui pengembangan strategi pencegahan berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan negara, seperti tertuang dalam rencana strategis (Renstra) 2020-2024. Inisiatif strategis tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* atas kinerja BPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan salah satu indikatornya adalah percepatan pemenuhan penghitungan kerugian negara.

- 1 Pembentukan *Investigative Audit Task Force* di 34 Perwakilan.
- 2 Rapat koordinasi BPK dengan APH.
- 3 Sinkronisasi data permintaan PKN dari APH dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- 4 Pengembangan aplikasi CaTcH dan InQuiRy.
- 5 Penambahan SDM dukungan pemeriksaan dari program Diploma 3 Sekolah Tinggi Akuntansi negara (STAN).
- 6 Komunikasi intensif dengan penyidik.
- 7 Penetapan status tidak dapat ditindaklanjuti (TDTL) dan pengembalian permohonan PKN.
- 8 Penyempurnaan dan *knowledge sharing* metodologi PI, PKN dan PKA.



Laporan Tahunan 2021 merupakan bentuk Akuntabilitas BPK RI kepada publik atas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK RI.



IN MEMORIAM OF: ANGGOTA BPK HARRY AZHAR AZIS



Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA,
Anggota V BPK i Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara V

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Harry Azhar Azis tutup usia pada 18 Desember 2021 di Jakarta. Pemakaman dilakukan dengan upacara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta pada 19 Desember 2021.

Harry Azhar Azis terakhir menjabat sebagai Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V. Karier dan pengabdian almarhum di BPK diawali periode 2014- 2019. Pada periode ini, almarhum menjabat Ketua BPK pada Oktober 2014 hingga April 2017. Selanjutnya, almarhum terpilih kembali sebagai Anggota BPK untuk periode 2019- 2024.

“Selamat jalan Pak Harry Azhar Azis, semoga api semangat untuk BPK yang semakin berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara semakin menjadi keniscayaan.”



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jalan Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210
Tel. (6221) 25549000, Faks. (6221) 57950288
Website: <http://www.bpk.go.id>
E-mail: eppid@bpk.go.id